

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2014

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

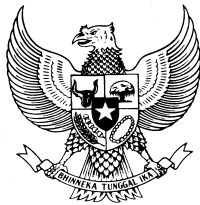
- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan sebuah perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien dalam kerangka *good governance* dan *clean governance* dan lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah;
 - b. bahwa konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan sinergitas pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan perlu dilakukan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah maupun program kewilayahan yang disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif, diperlukan dokumen perencanaan daerah;
 - d. bahwa dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, maka Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dituangkan dalam bentuk peraturan daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2005-2025;



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 3 -

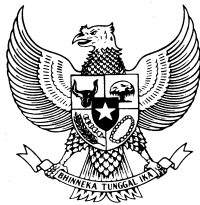
10. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5568);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 4 -

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 75);



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 5 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

MEMUTUSKAN:

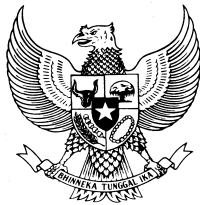
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN
2005-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah SKPD Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 6 -

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

RJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang memuat visi dan misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika RPJP Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2005 – 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 7 -

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Permasalahan Pembangunan
- 3.2. Isu Strategis

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

- 4.1. Visi
- 4.2. Misi
- 4.3. Tujuan dan Sasaran

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

- 5.1. Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi
- 5.2. Tahapan dan Prioritas

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 4

Penjabaran dari RPJPD ini akan ditindaklanjuti dengan RPJMD.

Pasal 5

Dalam menyusun materi kampanye, yang berisi visi, misi dan program pembangunan daerah, calon kepala daerah berpedoman kepada RPJPD serta memperhatikan RPJP nasional dan RPJM nasional.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, kepala daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 8 -

- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan kepala daerah berikutnya.
- (3) Untuk masa pemerintahan kepala daerah periode 2023-2028 berkewajiban menyusun RPJPD periode berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
Pada tanggal 22 Desember 2014
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko
Pada tanggal 22 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

REKY POSUMAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2014 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014

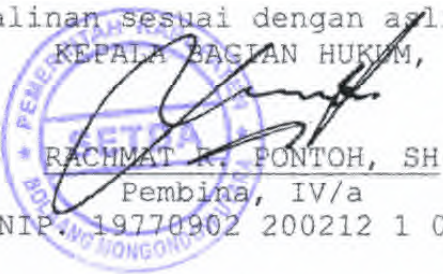
Salinan sesuai dengan aslinya

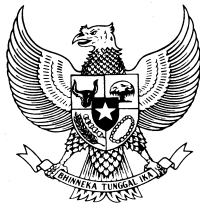
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RACHMAT R. PONTOH, SH

Pembina, IV/a

NIP. 19770902 200212 1 009





BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 9 -

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2014

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2005-2025

I. PENJELASAN UMUM

1) Dasar Pemikiran.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang berasaskan desentralisasi, dimana Pemerintah menyerahkan sebagian wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Sedemikian besarnya wewenang dan tugas Pemerintah Daerah sehingga memerlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan, dengan demikian diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang efektif dan efisien. Salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah wajib adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat visi, misi dan program pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

2) Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, isu-isu strategis, kebijakan pembangunan dan kaidah pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 10 -

3) Prinsip-prinsip

Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing

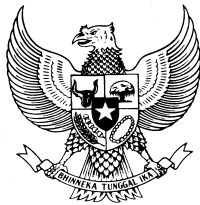
4) Tahapan Penyusunan RPJPD

a. Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Penyusunan rancangan awal RPJPD merupakan salah satu dari tahapan penyusunan RPJPD rancangan awal RPJPD provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan melalui dua tahapan rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

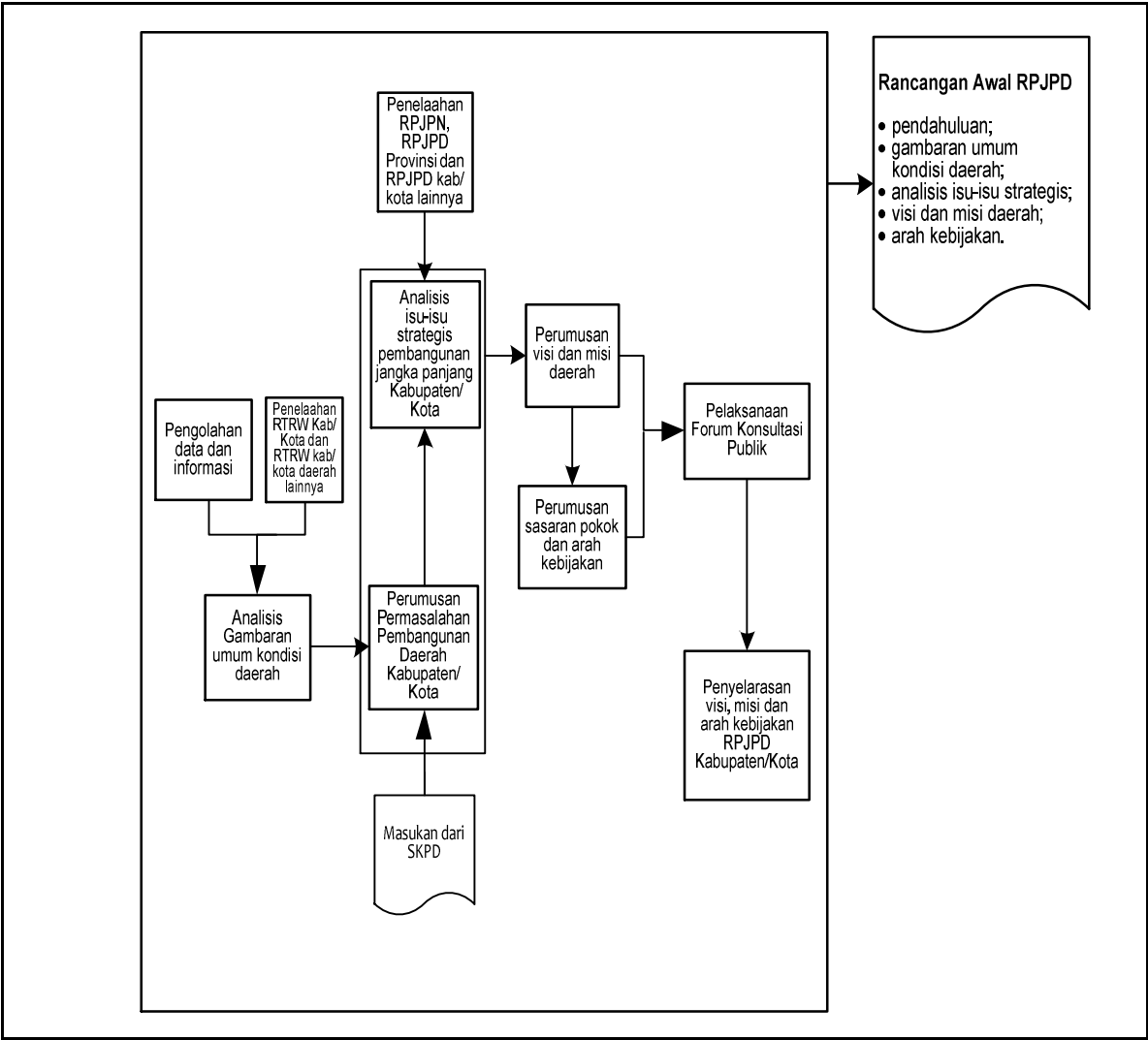
1. Tahap perumusan rancangan awal RPJPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan awal RPJPD.

Tahapan penyusunan rancangan awal RPJPD provinsi dan kabupaten/kota, dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 11 -



Gambar 1. Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

b. Tahapan Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD

Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD. Rancangan akhir RPJPD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil musrenbang RPJPD. Rancangan akhir RPJPD yang telah disempurnakan selanjutnya diajukan kepada kepala daerah untuk meminta persetujuan dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri terhadap rancangan akhir RPJPD provinsi dan kepada gubernur terhadap rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota.

1.1. Konsultasi Rancangan Akhir RPJPD

1. Setelah rancangan akhir RPJPD mendapatkan persetujuan dari kepala daerah untuk dikonsultasikan kepada Menteri/Gubernur,



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 12 -

Kepala Bappeda menyiapkan surat kepala daerah perihal permohonan konsultasi rancangan akhir RPJPD sebagai berikut:

- a. surat Gubernur perihal permohonan konsultasi rancangan akhir RPJPD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri; dan
 - b. surat Bupati/Walikota perihal konsultasi rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota kepada gubernur.
2. Surat kepala Daerah perihal permohonan konsultasi rancangan akhir RPJPD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari sebelum konsultasi dilakukan.
 3. Dalam surat permohonan konsultasi diberitahukan pokok-pokok substansi materi yang perlu dikonsultasikan dan dilampiri dengan dokumen rancangan akhir RPJPD beserta berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD serta hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
 4. Konsultasi rancangan akhir RPJPD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri bertujuan untuk memperoleh saran pertimbangan dari landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD provinsi, sinkronisasi dan sinergi, dengan RPJPN, RTRW provinsi dan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.
 5. Konsultasi rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota kepada gubernur untuk memperoleh saran pertimbangan dari landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD kabupaten/kota, sinkronisasi dan sinergi, dengan RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW kabupaten/kota serta RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.
- 1.2. Penyempurnaan Rancangan Akhir RPJPD Berdasarkan Hasil Konsultasi.

Gubernur menindak lanjuti hasil konsultasi RPJPD Provinsi dengan Menteri Dalam Negeri, dan Bupati/Walikota menindak lanjuti hasil konsultasi rancangan RPJPD kabupaten/kota dengan Gubernur. Tindak lanjut dimaksud yaitu menyempurnakan rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil-hasil konsultasi yang disampaikan dengan surat Menteri Dalam Negeri/Gubernur.

1.3. Melengkapi Sistematika Rancangan Awal RPJPD Menjadi Rancangan Akhir RPJPD

Penyajian rancangan akhir RPJPD disusun menurut sistematika yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan awal RPJPD provinsi dan kabupaten/kota. Kertas kerja yang muncul pada tahap penyusunan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dijelaskan pada subbab di atas menjadi dasar perubahan materi terkait dari isi rancangan akhir RPJPD.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- 13 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah sebuah perubahan terencana dalam mewujudkan visi sebuah tatanan. Perubahan terencana tersebut ditandai oleh terbukanya ruang bagi unsur-unsur penyusun tatanan untuk menyuarakan aspirasinya dan menentukan pilihannya didalam berkontribusi terhadap proses pencapaian visi tatanan. Agar kontribusi setiap unsur bisa efektif mempengaruhi arah dan kecepatan perubahan maka diperlukan sebuah koridor dalam bentuk dokumen perencanaan.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terbentuk sebagai entitas kesatuan wilayah dan pemerintahan yang otonom dengan mandat untuk mensejahterakan masyarakat dan berkontribusi terhadap perkembangan Provinsi Sulawesi Utara dan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan sebuah perencanaan jangka panjang sebagai arahan sosial tentang kondisi masa depan yang hendak diwujudkan dan upaya-upaya untuk mewujudkan cita-cita masa depan tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, sebuah Kabupaten harus memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, dengan masa berlaku 20 tahun yakni periode 2005-2025. Undang-Undang SPPN tahun 2004 juga menggariskan bahwa RPJP Daerah Kabupaten harus mengacu kepada RPJPD Provinsi dimana RPJP Daerah Provinsi mengacu pada RPJP Nasional. Dengan rumusan seperti itu maka terbangun sebuah sistem pembangunan jangka panjang yang saling terkait satu sama lain dari tingkat Kabupaten hingga tingkat Nasional sehingga perubahan yang didorong dapat lebih efektif mewujudkan visi daerah sekaligus visi nasional. RPJP Nasional memayungi arahan jangka panjang daerah sedangkan RPJP Daerah berkontribusi terhadap pencapaian arahan jangka panjang nasional tersebut.

Penyusunan RPJP Daerah melibatkan serangkaian proses yakni proses teknokratik, proses partisipatif, proses politik, dan proses *bottom up-top down*. Proses teknokratik dimaksudkan sebagai proses yang bersifat ilmiah, yang melibatkan sejumlah keahlian di dalam mengkaji kondisi daerah, menganalisis isu-isu strategis daerah, dan di dalam

merumuskan visi dan misi serta arah pembangunan jangka panjang. Proses partisipatif dimaksudkan sebagai proses, dimana para pihak terkait berkontribusi pikiran dan aspirasinya ke dalam substansi RPJP Daerah baik untuk aspek pemahaman kondisi daerah dan isu-isu strategisnya maupun untuk aspek rumusan visi dan misi serta arah jangka panjang pembangunan. Proses *bottom up-top down* dimaksudkan bahwa dalam penyusunan RPJP Daerah ini selain mengakomodir aspirasi yang sifatnya dari bawah, yakni para pihak terkait daerah, juga memerhatikan dan mengacu pada arahan yang sifatnya dari atas yakni visi, misi dan arah pembangunan pada tingkat provinsi dan nasional. Sedangkan proses politik adalah proses dimana substansi dari RPJP Daerah yang telah disusun secara teknokratik, partisipatif dan kombinasi *bottom up-top down*, mendapatkan masukan dan legitimasi politik melalui penetapan oleh wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. RPJPD dapat dilihat sebagai dokumen rencana yang mencoba untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan perkembangan, kecenderungan dan perubahan dari berbagai faktor eksternal dan internal di masa depan; memperkirakan pengaruhnya terhadap pengembangan daerah masa depan; mencoba memproyeksikan arah perjalanan pembangunan daerah hingga 20 tahun ke depan untuk mengantisipasi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dan; merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah untuk memanfaatkan peluang seoptimal mungkin dan mengatasi kendala dan ketidakpastian seefektif mungkin. Keberhasilan RPJPD terletak pada kemampuannya untuk mengorganisasikan stakeholder untuk bersama-sama merumuskan dan menyepakati arah perjalanan (*Road Map*) pembangunan daerah masa depan yang perlu ditempuh, untuk itu proses penyusunan dokumen RPJPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan RPJPD.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang terbentuk berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Untuk merealisasikan amanah undang-

undang tersebut maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dianggap perlu dan harus dilakukan untuk menciptakan sistem perencanaan daerah yang terarah berdasarkan visi misi dan arah kebijakan pembangunan. Ketidakhadanya dokumen RPJPD akan menimbulkan efek yang negatif terhadap perkembangan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Ketidakhadanya arah dan tujuan pembangunan akan mengakibatkan terbengkalainya amanah pemekaran daerah.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah, serta dalam bentuk potensi maupun permasalahan yang ada. Selain itu RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan idiil pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional yaitu:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287),
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355),
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389),
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4321),

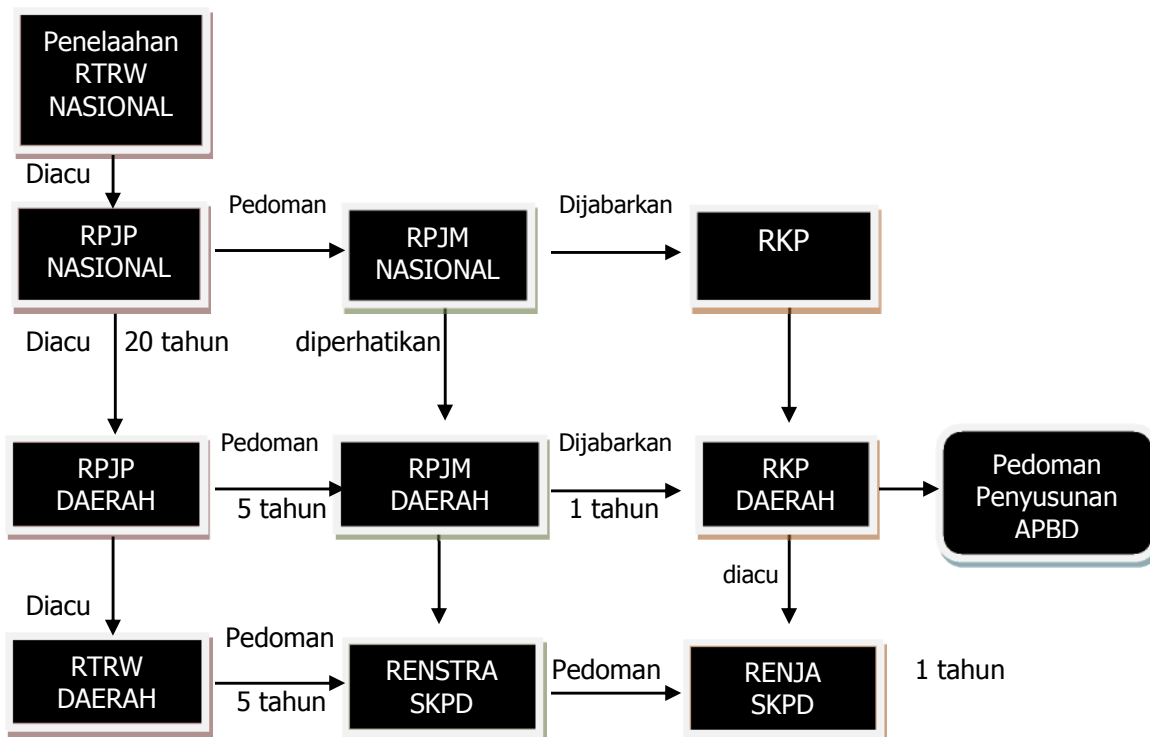
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438),
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4686),
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700),
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4723),
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725),
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737),

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817),
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4833)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lampiran II, tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah {RPJPD}).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah (Lampiran II Teknik Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lampiran III Pembentukan Produk Hukum Daerah)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Lampiran II, tentang Tahapan dan Tatacara Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2015)

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Penyusunan RPJP Bolaang Mongondow Utara 2005-2025 dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulawesi Utara, RTRW daerah berbatasan, RPJP Nasional, RPJPD Sulawesi Utara dan RPJPD wilayah perbatasan. Penyusunan RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga memperhatikan RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk menyelaraskan dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang kabupaten.



Gambar 1. Skema Sistem Perencanaan Nasional

Penelaahan RPJP Nasional dilakukan untuk menjamin keselarasan kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Nasional. Demikian juga dengan Penelaahan RTRW Nasional dan RTRW Bolaang Mongondow Utara bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya. Penelaahan RTRW Bolaang Mongondow Utara untuk menjamin agar arah kebijakan pembangunan jangka panjang dalam RPJP Bolaang Mongondow Utara selaras dan tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Nasional dan RTRW Bolaang Mongondow Utara. RPJP Bolaang Mongondow Utara harus memperhatikan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program Pemanfaatan Ruang.

Penelaahan RTRW Provinsi perbatasan bertujuan untuk tercipta sinkronisasi pembangunan jangka panjang antar provinsi, serta keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi perbatasan, terutama yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan provinsi/kabupaten/kota dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Penelaahan RPJP Provinsi perbatasan dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka panjang Bolaang Mongondow Utara dengan daerah Provinsi perbatasan. Hasil telaahan RPJP Provinsi

perbatasan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau tantangan bagi Bolaang Mongondow Utara selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang. Penelaahan dokumen-dokumen perencanaan tersebut diatas pada dasarnya ditujukan untuk mendukung pertumbuhan regional yang berkualitas, merata dan saling mendukung dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dibuat untuk menjadi dasar dalam penyusunan dokumen lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Membahas mengenai; Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya, Sistematika Penulisan serta Maksud dan Tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Bahasan dalam bab ini menguraikan tentang Pembahasan tentang: Aspek geografis dan demografi; Aspek kesejahteraan masyarakat; Aspek Pelayanan Umum dan Aspek daya saing daerah

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Menguraikan tentang pembahasan Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Bahasan dalam bab ini terdiri dari Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 20 tahun.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Bahasan dalam bab ini menguraikan tentang Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi serta Tahapan dan Prioritas pembangunan 20 tahunan.

BAB IV KAIDAH PELAKSANAAN

Penjabaran dan diuraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi, misi dan kebijakan yang disusun.

1.5. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah untuk menghasilkan rancangan awal RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang memenuhi prinsip perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan materi dalam pembahasan forum musrembang sebagai bagian dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2005-2025.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebagai berikut :

- a) Merumuskan visi misi, dan arah pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk 20 tahun mendatang berdasarkan data, informasi dan indikator pembangunan daerah
- b) Merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Utara, daerah sekitar dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- c) Mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional serta Millenium Deveopment Goals (MDGs).

BAB II

GAMBARAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara yang beribukotakan Boroko.

1) Luas dan batas wilayah administrasi

Luas wilayah kabupaten adaah 185.686 ha (1.856,86 km²) ± 12.3% dari luas Wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Terdapat 6 kecamatan yang terdiri dari 106 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan sangkub merupakan kecamatan terluas dan yang terjauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan luas wilayah 567,85 Km² dan dengan jarak tempuh 65 Km. Pusat Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongindow Utara terdapat pada wilayah administrasi kecamatan Kaidipang yang merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 85,09 Km² atau 4,58 % dari luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara keseluruhan. Selain kecamatan Sangkub dan kecamatan kaidipang yang merupakan kecamatan teruas dan terkecil, terdapat juga kecamatan Bintauna dengan luas wilayah 348,94 Km², Kecamatan Bolangitang Timur dengan luas wilayah 445,64 Km², Kecamatan Bolangitang Barat dengan luas wilayah 293,75 Km², dan Kecamatan Pinogaluman dengan luas wilayah 115,59 Km² dan merupakan kecamatan yang langsung berbatasan dengan Provinsi Gorontalo.

Tabel II.1. Nama Kecamatan, Luas Wilayah, Persentase Luas dan Jarak dari Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)	Jarak (Km)
Sangkub	567,85	30,58	65
Bintauna	348,94	18,79	42
Bolangitang Timur	445,64	24,00	34
Bolangitang Barat	293,75	15,82	4
Kaidipang	85,09	4,58	0
Pinogaluman	115,59	6,23	19

Sumber; BPS Kab. Bolaang Mongondow Utara dalam Angka 2012

Batas administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow utara adalah sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo

2) Letak dan kondisi geografis

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara teretak pada ujung bagian barat yang langsung berbatasan dengan Provinsi Gorontalo. Letak geografisnya berada pada $0^{\circ} - 30' 1^{\circ} - 0'$ Lintang Utara dan $123^{\circ} - 124^{\circ}$ Bujur Timur.

Memiliki panjang garis pantai 174 Km. Rata-rata ibu kota kecamatan berada pada ketinggian 1 (satu) M diatas permukaan Laut (dpl) kecuali ibu kota kecamatan sangkub yang berada pada ketinggian 10 (sepuluh) M dpl. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilintasi oleh sistem jaringan jalan trans sulawesi, yang menghubungkan antara Provinsi Sulawesi Utara dengan Provinsi lainnya di Pulau Sulawesi.

3) Topografi

Kondisi topografi tanah di Bolaang Mongondow Utara datar hingga berombak (25%), berombak sampai berbukit (40%) dengan keadaan tanah yang tergolong subur. Secara umum kondisi topografi tanah di kecamatan Sangkup rata dan yang berbukit di desa Sidodadi hingga 170 m dpl dan desa Pangkusa hingga 50 m dpl. Di kecamatan Bintauna pada umumnya rata dan yang berbukit hanya di desa Mome dan Huntuk s/d 8 m dpl. Di kecamatan Bolangitang Timur juga sebagian besar dataran kecuali desa Mokoditek berbukit ± 60 m dpl dan desa Biontong ± 18 m dpl. Wilayah berbukit juga terdapat di desa Solo dan Komus Dua kecamatan Kaidipang ± 15 m dpl, dan desa-desa Komus satu dan Batu tajam kecamatan Pinogaluman ± 25 m dpl diatas permukaan laut.

4) Hidrologi

Daerah Aliran Sungai yang terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari DAS Ayong, DAS Biontong, DAS Bigo, DAS Pontak, DAS Andagile, DAS Biyou, DAS Bolangitang, DAS Gambuta, DAS Lolak, DAS Maelang, dan DAS Sangkub.

Sedangkan untuk bendungan yang berfungsi membantu sistem pengairan sektor pertanian antara lain terdiri dari: Bendung Sangkub di Kec. Sangkub dengan kapasitas 4,02 m³/det; Bendung Buko di Kecamatan Pinogaluman; Bendung Pontak di Kecamatan Kaidipang; Bendung Ollot di Kecamatan Bolangitang Barat dan Bendung Saleo di Kecamatan Bolangitang Timur.

5) Klimatologi

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lebih banyak dipengaruhi oleh iklim tropis dengan suhu sekitar 20°C - 32°C, curah hujan rata-rata pertahun 1896 mm/tahun.

6) Penggunaan lahan

Penggunaan lahan Kawasan budidaya di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian besar pola pemanfaatan lahan, yaitu Kawasan hutan, pertanian dan permukiman. Kawasan hutan terdiri dari, Kawasan hutan lindung, hutan produksi yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan; terdiri dari Kawasan hutan produksi tetap, produksi terbatas dan produksi yang dapat dikonversi; Kawasan hutan rakyat dengan luas total kurang lebih 114769,38 Ha. Kawasan pertanian dengan luas kurang lebih 54.052 Ha, yang terdiri dari Kawasan pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura dan perkebunan; dan Kawasan permukiman yang terdiri dari pemukiman masyarakat, perkantoran dan sarana dan prasarana daerah.

Tabel II.2. Pola Penggunaan Lahan

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)
1.	Hutan	114769,38
2.	Pertanian	54052,00
3.	Pemukiman, perkantoran, sarana dan Prasarana daerah	16864,62
Luas Total		185.686,00

Sumber; BAPPEDA, RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, terdiri dari; Kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 27.062 Ha yang terdapat di Kecamatan Bintauna, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, Kaidipang, Pinogaluman, dan Kecamatan Sangkub; Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya seperti kawasan resapan air yang terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna, Kaidipang dan Pinogaluman; Kawasan perlindungan setempat; Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya (masuk lindung) terdiri dari Kawasan taman nasional Nani Wartabone yang terdapat di kecamatan Bintauna dan Sangkub, seluas kurang lebih 5.383 ha. Dan Kawasan pantai berhutan bakau yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan, dengan luas total kurang lebih 1.670,81 Ha.

2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki sumber daya alam yang begitu besar, antara lain dapat dilihat dari sektor pertanian, perikanan dan kelautan serta pariwisata.

1) Pertanian

Sektor pertanian terdiri dari Pertanian tanaman pangan yang menghasilkan komoditi berupa Padi, Jagung, Kedelai, Singkong dan umbi-umbian. Pertanian tanaman pangan tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Pengembangan pertanian tanaman pangan khususnya untuk komoditi padi ditunjang dengan keberadaan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu menjadikan Kabupaten Padi. Luas areal produksi padi pada tahun 2011 seluas 9789 Ha dengan produksi beras sebesar 36128,56 Ton. Untuk komoditi jagung luas areal produksi pada tahun 2011 sebesar 1845 Ha dengan jumlah produksi sebesar 3920 Ton.

Komoditi perkebunan kelapa pada tahun 2011 memiliki luas areal produksi sebesar 15.131,50 Ha dengan jumlah produksi sebesar 13.564,88 Ton. Untuk komoditi Kakao pada tahun 2011 luas areal sebesar 4819,50 Ha dengan jumlah produksi 905,14 Ton

Sektor pertanian untuk komoditi peternakan, yang memiliki populasi ternak terbesar ada pada jenis ayam petelur dengan jumlah 22.300 ekor pada tahun 2011 dan sapi potong yang berjumlah 12.691 ekor pada tahun 2011.

2) Kelautan dan Perikanan

Potensi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditunjang oleh letaknya yang cukup strategis karena memiliki garis pantai terpanjang di Provinsi Sulawesi Utara yaitu sepanjang 174 Km dan memiliki gugusan terumbu karang yang cukup eksotis. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mencoba mengarahkan pengembangan sektor kelautan dan perikanan kearah pengembangan Minapolitan yang berbasis agroindustri. Pusat pengembangan diarahkan kepada kecamatan Pinogaluman karena ditunjang oleh tingginya tingkat produktivitas hasil perikanan serta daya dukung sumberdaya alam.

Hasil tangkapan terbesar ada pada jenis ikan tuna yaitu 477.695 Kg pada tahun 2011, total produksi perikanan tangkap pada tahun 2011 sebesar 2.742.643 Kg. Untuk perikanan budidaya yang memiliki produksi terbesar adalah budidaya laut yang terdiri dari budidaya Ikan kuwe, Kerapu dan budidaya rumput laut. Pada tahun 2010 Ikan kerapu ditetapkan sebagai *branding* sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan dimulainya program budidaya ikan kerapu.

Selain itu juga, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki 18 gugusan pulau-pulau kecil yang sebagian besar merupakan pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia dan Philipina, serta berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah. Gugusan pulau-pulau kecil terluar tersebut antara lain Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Sambit, Lingian, Salando, Dolangan, Bongkil, Mantewaru, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Miangas, Marampit, Intata dan Kakarutan. Pulau-pulau kecil tersebut merupakan Kawasan Andalan (Strategis Nasional), sekaligus Kawasan Perbatasan Laut NKRI.

3) Pariwisata

Keindahan dan keunikan alam di beberapa wilayah menjadi daya tarik tersendiri pada sektor pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Di dominasi oleh wisata bahari, wisata alam, wisata sejarah dan budaya menghadirkan potensi dan daya tarik yang memiliki nilai jual tinggi bagi pengembangan dunia pariwisata.

Pantai batu pinagut, Pantai Tanjung Dulang, Pantai Wakat merupakan objek wisata bahari yang memiliki keunikan pasir putih dan gugusan bebatuan besar. Situs Komalig (istana raja), Jere (makam Raja-raja Kaidipang dan Makam Raja-raja Bintauna) mewakili objek wisata sejarah dan budaya.

Belum termanfaatkan secara optimal keseluruhan potensi dan daya tarik wisata yang ada mengakibatkan angka kunjungan wisata masih terbilang kecil bahkan belum terdata secara sistematis. Para wisatawan didominasi oleh wisatawan lokal dan terkonsentrasi pada saat momen-momen tertentu seperti saat masa liburan sekolah.

3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam yang terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pada umumnya dibagi menjadi empat wilayah berdasarkan jenis bencana yang ada. Antara lain, terdiri dari:

- 1) Kawasan rawan tanah longsor, sebarannya terdapat pada daerah-daerah berikut ini;
 - a) Desa Sampiro di Kecamatan Sangkub;
 - b) Desa Bohabak IV, Binuanga, Saleo dan Mokoditek di kecamatan Bolangitang Timur;
 - c) Desa Inomunga, Inomunga Utara Kecamatan Kaidipang dan Desa Komus I di kecamatan Pinogaluman; dan
 - d) Desa Iyok, Tote, Desa Paku, desa Goyo Kecamatan Bolangitang Barat.
- 2) Kawasan rawan tsunami, abrasi pantai dan gelombang pasang sebarannya antara lain terdapat pada daerah-daerah berikut :
 - a) Desa Sangtombolang, Desa Busisingo dan Desa Sampiro di Kecamatan Sangkub;
 - b) Desa Minanga, Desa Voa'a, Desa Talaga, Desa Bintauna Pantai dan Desa Kuhanga di kecamatan Bintauna;
 - c) Desa Biontong I, Desa Binjeita II, Desa Bohabak II di Kecamatan Bolangitang Timur;
 - d) Desa Wakat, Desa Tote, Desa Iyok, Desa Bolangitang, Desa Bolangitang I, dan Desa Bolangitang II di Kecamatan Bolangitang Barat;

- e) Desa Kuala Utara, Desa Solo dan Desa Inomunga Utara di kecamatan Kaidipang; dan
 - f) Desa Buko, Buko Utara, Tombulang Pantai Desa Dengi, Dalapuli timur, dalapuli barat, dalapuli, Desa Tuntung dan Desa Tanjung Sidupa di Kecamatan Pinogaluman.
- 3) Kawasan rawan abrasi tebing sungai; tersebar pada daerah-daerah berikut ini:
- a) Desa Nunuka, Desa Biontong, Desa Bohabak II dan Desa Saleo di kecamatan Bolangitang Timur;
 - b) Desa Sonuo, Paku, Paku Selatan, Desa Ollot, Ollot satu, ollot dua dan Desa Jambusarang, Wakat dan desa bolangitang dua di Kecamatan Bolangitang Barat;
 - c) Desa Inomunga, Pontak, Kuala Utara dan Bigo di kecamatan Kaidipang.
 - d) Desa Bintauna Pantai, Busisingo dan Desa Kuhang Kec. Bintauna;
 - e) Desa Busisingo, Desa Sang dan Desa Sampiro Kec. Sangkub; dan
 - f) Desa Tuntulow, batubantayo, kayuogu dan busato kecamatan pinogaluman.
- 4) Kawasan rawan banjir, terdapat pada daerah-daerah berikut.
- a) Desa Pangkusa di Kecamatan Sangkub;
 - b) Desa Bunia, Desa Kuhanga, Bintauna Pantai dan Desa Kopi di kecamatan Bintauna;
 - c) Desa Binuanga, Desa Binjeita, Binjeita dua, Nunuka, Desa Bohabak IV dan Desa Biontong di kecamatan Bolangitang Timur;
 - d) Desa Sonuo, Desa Ollot, Desa Ollot Satu, Desa Ollot Dua, Desa Paku, Desa Jambusarang, Desa Bolangitang, Desa Bolangitang I dan Desa Wakat di Kecamatan Bolangitang Barat;
 - e) Desa Pontak dan Desa Bigo Selatan di kecamatan Kaidipang; dan
 - f) Desa Dalapuli, Batubantayo, Kayuogu dan Busato Kec. Pinogaluman.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selain terdapat empat jenis kawasan rawan bencana, juga terdapat kawasan Rawan Bencana Alam Geologi, Kawasan rawan bencana alam geologi yang dimaksud, terdiri atas:

- a) Kawasan rawan gempa bumi, terdapat di wilayah Sesar Bolaang Mongondow Utara;
- b) Kawasan yang terletak di zona patahan aktif, terdapat di Kecamatan Kaidipang dengan luas kurang lebih sebesar 8.397 Ha; dan
- c) Kawasan rawan tsunami dan abrasi, terdapat disepanjang pesisir pantai pada enam Kecamatan (Sangkub, Bintauna, Bolangitan Timur, Bolangitan Barat, Kaidipang dan Pinogaluman) di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

4. Demografi

1) Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga

Jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2011 sebanyak 73.621 jiwa yang terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 37.670 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 35.951 jiwa. Untuk jumlah kepala keluarga pada tahun 2011 sebanyak 19271 kepala keluarga.

Tabel II.3. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Perkecamatan Tahun 2011

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			KK
		Laki-laki	Perempuan	Total	
1.	Sangkub	5534	5075	10609	2489
2.	Bintauna	6645	6150	12795	3443
3.	Bolangitan Timur	6612	6346	12958	3661
4.	Bolangitan Barat	7458	7455	14913	3692
5.	Kaidipang	6335	6113	12448	3561
6.	Pinogaluman	5086	4812	9898	2425
Jumlah		37670	35951	73621	19271

Sumber; BPS Statistik Kecamatan Se Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2012

2) Sex Rasio

Rasio Jens Kelamin (RJK)/Sex Rasio merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Angka ini dinyatakan dengan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu. Rasio jenis kelamin semakin kecil jika golongan umur semakin tua.

Tabel II.4. Analisis Sex Rasio menurut Kecamatan Tahun 2011

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Sex Rasio
	Laki-laki	Perempuan	
Sangkub	5534	5075	109
Bintauna	6645	6150	108
Bolangitang Timur	6612	6346	104
Bolangitang Barat	7458	7455	100
Kaidipang	6335	6113	104
Pinogaluman	5086	4812	106

Sumber; Hasil Analisis Tiem

Berdasarkan studi tipologi kabupaten penilaian sex rasio menggunakan kriteria sebagai berikut :

Sex rasio Tinggi : > 105

Sex rasio Sedang : 95-105

Sex Rasio Rendah : < 95

Berdasarkan kriteria tersebut Sex rasio Tinggi terdapat di seluruh kecamatan dengan nilai terbesar terdapat di kecamatan Sangkub sebesar 109, yang berarti jumlah penduduk perempuan 1% lebih sedikit dibandingkan penduduk laki-laki, atau setiap seratus perempuan terdapat 109 laki-laki. kondisi ini agak berbeda dari kondisi pada umumnya di mana persentase penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki.

3) Penyebaran dan Kepadatan Penduduk

Tahun 2011 penyebaran penduduk terbesar berada pada Kecamatan Bolangitang Barat dengan total jumlah penduduk sebesar 14.913 jiwa. Diikuti oleh Kecamatan Bolangitang Timur sebanyak 12.958 jiwa, Kecamatan Bintauna sebanyak 12.795 jiwa, Kecamatan Kaidipang sebanyak 12448 jiwa, Kecamatan Sangkub 10.609 jiwa dan Kecamatan Pinogaluman yang memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu sebanyak 9898 jiwa.

Tabel II.5 Kepadatan dan Penyebaran Penduduk Perkecamatan Tahun 2011

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan (jiwa/km ²)
1.	Sangkub	10609	567,85	18,68
2.	Bintauna	12795	348,94	36,67
3.	Bolangitang Timur	12958	445,64	29,08
4.	Bolangitang Barat	14913	293,75	50,77
5.	Kaidipang	12448	85,09	146,29
6.	Pinogaluman	9898	115,59	85,63
Jumlah		73621	1856,86	39,64

Sumber; BPS Statistik Kecamatan SeKabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Hasil analisis, 2012

Kecamatan Kaidipang memiliki jumlah penduduk ke empat terbanyak, tetapi merupakan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan yang tertinggi yaitu sebesar 146,29 jiwa/Km². Sedangkan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan terkecil adalah Kecamatan Sangkub yaitu 18,68 jiwa/Km².

4) Perkembangan penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditiga tahun terakhir secara umum mengalami pertambahan. Pada tahun 2011 tercatat jumlah penduduk sebanyak 73.621 jiwa yang sebelumnya pada tahun 2009 berjumlah 68.201 jiwa dan pada tahun 2010 tercatat sebanyak 71150 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tiga tahun terakhir berdasarkan hasil analisis dengan data yang tersedia, sebesar 3,89 %.

Tabel II.6. Perkembangan Penduduk 3 (tiga) Tahun Terakhir

No	Kecamatan	Tahun		
		2009	2010	2011
1.	Sangkub	9403	8906	10609
2.	Bintauna	12846	12654	12795
3.	Bolangitang Timur	14232	12859	12958
4.	Bolangitang Barat	9728	14042	14913
5.	Kaidipang	11428	12334	12448
6.	Pinogaluman	10564	10355	9898
Jumlah		68201	71150	73621

Sumber; BPS Statistik Kecamatan SeKabupaten Bolaang Mongondow Utara dan hasil analisis, 2012

Proyeksi pertumbuhan penduduk diperlukan dalam perencanaan pembangunan untuk memperkirakan jumlah penduduk di akhir periode perencanaan dan merubah kecendrungan laju pertumbuhan penduduk dalam rangka menanggulangi dinamika penduduk yang terlalu pesat.

Tabel II.7. Proyeksi Penduduk Tahun 2012-2025

Tahun	2012	2015	2020	2025
Penduduk	76.490	85.787	103.861	125.741

Sumber; Hasil Rancangan Awal RPJPD Bolaang Mongondow Utara 2012

Berdasarkan proyeksi penduduk diatas diketahui penduduk pada tahun 2025 mencapai angka 125.741 jiwa, dengan rata-rata persentase laju pertumbuhan 3,89%.

5) Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki jumlah penduduk terbanyak berada pada status Tamat Sekolah Dasar, yaitu sebanyak 22.476 jiwa yang tercatat pada tahun 2011, jumlah tersebut terbanyak berasal dari Kecamatan Bolangitang Timur. Disusul oleh jumlah penduduk yang berstatus Tidak/Belum Sekolah sebanyak 14.199 jiwa.

Tabel II.8. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Dirinci Per Kecamatan

No	Tingkat Pendidikan	Kecamatan						Jumlah
		Sangkub	Bintana	Bolangitang Timur	Boangitang Barat	Kaidipang	Pinogaluman	
1.	Tidak/belum sekolah	2569	2114	2018	3054	1517	2927	14199
2.	Belum tamat SD	2434	2945	1948	3140	1622	1805	13894
3.	Tamat SD	3226	3896	5646	2908	3615	3185	22476
4.	Tamat SLTP	1424	2001	1700	3017	3148	1258	12548
5.	Tamat SLTA	806	1417	1377	2449	1989	951	8989
6.	DI – DIII	110	231	163	220	313	146	1183
7.	S1, S2, S3	40	190	110	124	245	84	793

Sumber; BPS Statistik Kecamatan SeKabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2012

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang memiliki jumlah terkecil adalah penduduk yang memiliki jenjang pendidikan Strata yaitu berjumlah 793 Jiwa, 245 jiwa di antaranya tercatat sebagai penduduk di Kecamatan Kaidipang.

6) Penduduk Menurut Kelompok Umur

Kelompok umur 5 - 9 tahun merupakan kelompok umur terbanyak yang tercatat pada tahun 2011 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan jumlah sebanyak 8.554 jiwa, 1518 jiwa di antaranya berasal dari Kecamatan Bolangitang Barat. Jumlah kelompok umur kedua terbanyak adalah kelompok umur 0 – 4 tahun, yaitu sebanyak 7439 jiwa. Sedangkan untuk kelompok umur yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah penduduk dengan kelompok umur 60 -64 tahun sebanyak 1.714 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.9. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dirinci Per Kecamatan

No	Kelompok Umur	Kecamatan						Jumlah
		Sangkub	Bintana	Bolangitang Timur	Boangitang Barat	Kaidipang	Pinogaluman	
1.	0-4	1118	1227	1231	1518	1360	985	7439
2.	5-9	1260	1382	1504	1712	1505	1191	8554
3.	10-14	1068	1296	1308	1436	1229	1079	7416
4.	15-19	856	1119	1065	1209	1122	915	6286
5.	20-24	687	738	1005	1015	857	689	4991
6.	25-29	832	1036	1112	1147	1019	766	5912
7.	30-34	892	1012	1051	1147	1024	829	5955
8.	35-39	910	1098	1131	1235	1030	790	6194
9.	40-44	707	909	818	928	833	714	4909
10.	45-49	675	816	680	788	702	589	4250
11.	50-54	511	698	649	727	531	413	3529
12.	55-59	390	517	485	541	408	314	2655
13.	60-64	248	331	284	364	269	218	1714
14.	>65	454	616	634	686	560	408	3358

Sumber; BPS Statistik Kecamatan Se Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2012

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi menjadi tiga sektor utama, yaitu Sektor Primer yang terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan dan energi. Sektor Sekunder terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan. Sektor Tersier terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor Jasa-jasa.

Rata-rata struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mengalami peningkatan di setiap tahunnya pada lima tahun terakhir. Sektor

Primer merupakan sektor yang terbanyak memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan PDRB ADHK. Sektor Tersier merupakan sektor ke dua yang memberikan konstribusi terhadap pertumbuhan PDRB ADHK.

Tabel II.10. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) lima Tahun Terakhir (Juta Rupiah)

STRUKTUR PDRB ADHK	2008		2009		2010		2011		2012	
	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%
Pertanian	127,948	38,06	131,235	36,55	137.011	35,45	141,774	34,13	146,789	32,62
Pertambangan & Galian	28,020	8,34	30,270	8,43	32.530	8,42	35,047	8,44	37,574	8,35
II										
Industri Pengolahan	10,750	3,20	10,871	3,03	10.993	2,84	11,618	2,80	12,301	2,73
Listrik, Gas & Air Bersih	955,15	0,28	974,14	0,27	995,34	0,26	1,034	0,25	1,100	0,24
Bangunan	36,670	10,91	40,213	11,20	44.161	11,43	49,094	11,82	55,388	12,31
III										
Perdag, Hotel & Restoran	29,080	8,65	29,717	8,28	30.676	7,94	32,675	7,87	34,626	7,70
Pengangkutan & Komunikasi	9,348	2,78	9,639	2,68	10.063	2,60	10,623	2,56	11,235	2,50
Kuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	10,392	3,09	10,909	3,04	11.404	2,95	11.998	2,89	12,652	2,81
Jasa-jasa	82,954	24,68	95,262	26,53	108.615	28,11	121,518	29,25	138,268	30,73
TOTAL	336,131	100,00	359,094	100,00	386.453	100,00	415,386	100,00	449,937	100,00

Sumber; BPS, PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2008-2012

Tabel II.10 memperlihatkan Struktur PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Sektor tersier memiliki nilai tertinggi yaitu 196.781 (juta rupiah) dibandingkan dengan Sektor Primer dengan nilai 184.363 (juta rupiah) dan Sektor Sekunder dengan nilai 68.789 (juta rupiah). Sub sektor pertanian sebagai bagian dari sektor primer pada tahun 2012 memiliki nilai yang lebih tinggi di bandingkan sub sektor jasa-jasa yang berada pada sektor tersier. Sub sektor pertanian memiliki nilai 146.789 (juta rupiah) sedangkan sub sektor jasa-jasa memiliki nilai 138.628 (juta rupiah) dalam struktur PDRB ADHK Bolaang Mongondow Utara. Jika melihat trend data yang disajikan dalam tabel II.10, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan berada pada trend positif dimana sub sektor pertanian merupakan sub sektor yang menggerakkan perekonomian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Trend positif juga diperlihatkan oleh sub sektor jasa-jasa yang menyumbangkan angka signifikan. Peningkatan sumbangan PDRB dari sektor jasa memperlihatkan bahwa dimasa yang akan datang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bisa menjadi sebuah daerah maju. Salah satu ciri khas daerah maju adalah pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sebagian besar didorong oleh pertumbuhan sektor jasa. Untuk menuju kearah tersebut maka pembangunan sektor pertanian diarahkan pada peningkatan sub sektor jasa-jasa

Seperti halnya struktur PDRB harga konstan maka Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), lima tahun terakhir mulai mengalami peningkatan (Tabel II.11). Tercatat pada tahun 2012 Sektor Tersier memiliki nilai tertinggi yaitu 386.811,36 (juta rupiah) berada di atas dibandingkan dengan Sektor Primer dengan nilai 397.350 (juta rupiah) dan Sektor Sekunder dengan nilai 150.562, 3 (juta rupiah). Sub sektor pertanian sebagai bagian dari sektor primer pada tahun 2012 memiliki nilai yang lebih tinggi di bandingkan sub sektor jasa-jasa yang berada pada sektor tersier. Sub sektor pertanian memiliki nilai 333.065,84 (juta rupiah) sedangkan sub sektor jasa-jasa memiliki nilai 276.908,87 (juta rupiah) dalam struktur PDRB ADHB Bolaang Mongondow Utara.

Tabel II.11. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) lima Tahun Terakhir (Juta Rupiah)

STRUKTUR PDRB ADHB	2008		2009		2010		2011		2012	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1. Pertanian	202,605.21	35.86	227,288.46	34.88	260,448.00	36.83	312,359.91	37.67	333,065.84	35.63
2. Pertambangan & Penggalan	42,345.51	7.49	47,462.65	7.28	53,218.58	7.53	58,090.90	7.01	64,284.99	6.88
3. Industri Pengolahan	18,968.89	3.36	19,390.39	2.98	19,963.50	2.82	22,570.03	2.72	25,289.49	2.71
4. Listrik, Gas & Air Bersih	1,317.61	0.23	1,371.23	0.21	1,439.67	0.20	1,543.80	0.19	1,691.80	0.18
5. Konstruksi	64,327.45	11.38	74,224.99	11.39	86,292.21	12.20	104,843.04	12.65	123,580.99	13.22
6. Perdag., Hotel & Restoran	47,492.35	8.40	51,350.53	7.88	56,989.65	8.06	63,777.77	7.69	72,227.45	7.73
7. Pengangkutan & Komunikasi	10,617.74	1.88	11,065.66	1.70	12,060.52	1.71	13,693.58	1.65	15,290.30	1.64
8. Keu. Real Estat & Jasa Perusahaan	15,785.86	2.79	16,940.59	2.60	18,137.68	2.56	20,203.36	2.44	22,384.74	2.39
9. Jasa-Jasa	161,590.26	28.60	202,615.91	31.09	198,624.94	28.09	232,014.49	27.98	276,908.87	29.62
PDRB	565,050.88	100.00	651,710.41	100.00	707,174.75	100.00	829,096.88	100.00	934,724.47	100.00

Sumber; BPS PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow 2013

Tabel II.12. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) & Atas Dasar Harga Berlaku

Struktur PDRB	2008		2009		2010		2011		2012	
	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb
Pertanian	38,06	35.86	36,55	34.88	35,45	36.83	34,92	37.67	32,62	35.63
Pertambangan & Galian	8,34	7.49	8,43	7.28	8,42	7.53	8,27	7.01	8,35	6.88
Industri Pengolahan	3,20	3.36	3,03	2.98	2,84	2.82	2,90	2.72	2,73	2.71
Listrik, Gas & Air Bersih	0,28	0.23	0,27	0.21	0,26	0.20	0,24	0.19	0,24	0.18
Bangunan	10,91	11.38	11,20	11.39	11,43	12.20	11,75	12.65	12,31	13.22
Perdag, Hotel & Restoran	8,65	8.40	8,28	7.88	7,94	8.06	7,88	7.69	7,70	7.73
Pengangkutan & Komunikasi	2,78	1.88	2,68	1.70	2,60	1.71	2,51	1.65	2,50	1.64
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	3,09	2.79	3,04	2.60	2,95	2.56	2,84	2.44	2,81	2.39
Jasa-jasa	24,68	28.60	26,53	31.09	28,11	28.09	28,69	27.98	30,73	29.62
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber; BPS PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow 2013

Untuk mengetahui pergeseran ekonomi di kabupaten Bolaang Mongondow Utara digunakan Metode analisis Shift share. Metode Analisis Shift share digunakan untuk mengetahui kinerja ekonomi, pergeseran struktur ekonomi, posisi relatif sektor-sektor ekonomi dan identifikasi sektor-sektor “unggulan” dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dalam 2 atau lebih titik waktu.

Tabel II.13. Sektor Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Dengan Metode Analisis Pergeseran Struktur Ekonomi Wilayah

NO	SEKTOR EKONOMI	PDRB KAB. BOLMUT		PDRB PROP. SULUT		RASIO KAB. BOLMUT	RASIO PROV. SULUT	RASIO PDRB AGREGAT
		2007	2010	2007	2010			
		(E _{ij})	(E' _{ij})	(E _j)	(E' _j)			
1	PERTANIAN	174.592,75	260.448,00	4.945.024,63	7.184.579,03	1,49	1,45	1,52
2	PERTAMBANGAN & GALIAN	37.912,80	53.218,58	1.030.649,53	1.483.379,20	1,40	1,44	
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	18.553,97	19.963,50	2.124.100,06	2.972.700,68	1,08	1,40	
4	LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	1.265,56	1.439,67	199.456,83	287.980,74	1,14	1,44	
5	BANGUNAN	56.109,35	86.292,21	4.006.172,15	6.079.577,42	1,54	1,52	
6	PERDAGANGAN, HOTEL & REST.	43.774,78	56.938,52	3.773.773,76	6.248.751,11	1,30	1,66	
7	ANGKUTAN & KOMUNIKASI	10.187,06	12.060,52	2.963.469,93	4.232.408,76	1,18	1,43	
8	KEUANG.,PERSEW&JASA PERS.	14.708,43	18.137,68	1.358.037,38	2.247.611,84	1,23	1,66	
9	JASA-JASA	130.544,77	250.624,94	3.873.345,75	6.097.803,86	1,92	1,57	
JUMLAH		87.649,47	759.123,62	24.274.030	36.834.792,64	12,28	13,57	

Sumber; Hasil Rancangan Awal Penyusunan RPJP Bolaang Mongondow Utara, 2012

Dari hasil analisis diatas dapat diketahui rasio PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 12,28 masih dibawah rasio PDRB Kabupaten Sulawesi Utara sebesar 13,57, hal ini menunjukkan perlu ada upaya peningkatan terhadap keseluruhan sektor-sektor ekonomi yang ada.

Tabel II.14. Perubahan PDRB Untuk masing-masing Sektor Ekonomi

RPJP DAERAH BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2005-2025

NO	SEKTOR EKONOMI	PDRB KAB. BOLMUT		Perubahan Dalam PDRB <i>(E'ij-Eij)</i>	Komponen Perubahan			Pergeseran Bersih <i>(IMG+RSG)</i>
		2007	2010		NG	IMG	RSG	
		<i>(Eij)</i>	<i>(E'ij)</i>		<i>(Eij(Ra-1))</i>	<i>(Eij(Ri-Ra))</i>	<i>(Eij(ri-Ri))</i>	
1	PERTANIAN	174.592,75	260.448,00	85.855,25	90.344,21	-11.272,82	6.783,86	-4.488,96
2	PERTAMBANGAN & GALIAN	37.912,80	53.218,58	15.305,78	19.618,24	-2.964,42	-1.348,04	-4.312,46
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	18.553,97	19.963,50	1.409,53	9.600,88	-2.188,37	-6.002,98	-8.191,35
4	LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	1.265,56	1.439,67	174,11	654,87	-93,19	-387,58	-480,76
5	BANGUNAN	56.109,35	86.292,21	30.182,86	29.034,17	5,38	1.143,31	1.148,69
6	PERDAGANGAN, HOTEL & REST.	43.774,78	56.938,52	13.163,74	22.651,56	6.057,53	-15.545,34	-9.487,82
7	ANGKUTAN & KOMUNIKASI	10.187,06	12.060,52	1.873,46	5.271,36	-909,33	-2.488,57	-3.397,90
8	KEUANG.,PERSEW&JASA PERS.	14.708,43	18.137,68	3.429,25	7.610,98	2.023,69	-6.205,42	-4.181,73
9	JASA-JASA	130.544,77	250.624,94	120.080,17	67.551,28	7.420,43	45.108,46	52.528,89
JUMLAH		487.649,47	759.123,62	271.474,15	252.337,55	-1.921,10	21.057,70	19.136,60

Sumber; Hasil Rancangan Awal Penyusunan RPJP Bolaang Mongondow Utara, 2012

Berdasarkan tabel II.14 diatas diketahui terjadi beberapa sektor ekonomi yang mengalami pergeseran negatif kecuali sektor Bangunan dan Jasa-jasa dengan nilai masing-masing sebesar 1.148,69 dan 52.528,89. Rangkings untuk setiap sektor ekonomi berturut-turut adalah sektor jasa-jasa, Bangunan dan Pertanian sedangkan yang menempati urutan terakhir adalah sektor industri pengolahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.15. Ranking Struktur PDRB untuk masing-masing Sektor

NO	SEKTOR EKONOMI	Komponen Perubahan			Efek Bersih	% Kenaikan Aktual	Rangking
		NG	IMG	RSG			
		(%)	(%)	(%)	(IMG+RSG)	(NG+(IMG+RSG))	(Dalam Romawi)
1	PERTANIAN	51,75	-6,46	3,89	-2,57	49	III
2	PERTAMBANGAN & GALIAN	51,75	-7,82	-3,56	-11,37	40	IV
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	51,75	-11,79	-32,35	-44,15	8	IX
4	LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	51,75	-7,36	-30,62	-37,99	14	VIII
5	BANGUNAN	51,75	0,01	2,04	2,05	54	II
6	PERDAGANGAN, HOTEL & REST.	51,75	13,84	-35,51	-21,67	30	V
7	ANGKUTAN & KOMUNIKASI	51,75	-8,93	-24,43	-33,36	18	VII
8	KEUANG.,PERSEW&JASA PERS.	51,75	13,76	-42,19	-28,43	23	VI
9	JASA-JASA	51,75	5,68	34,55	40,24	92	I

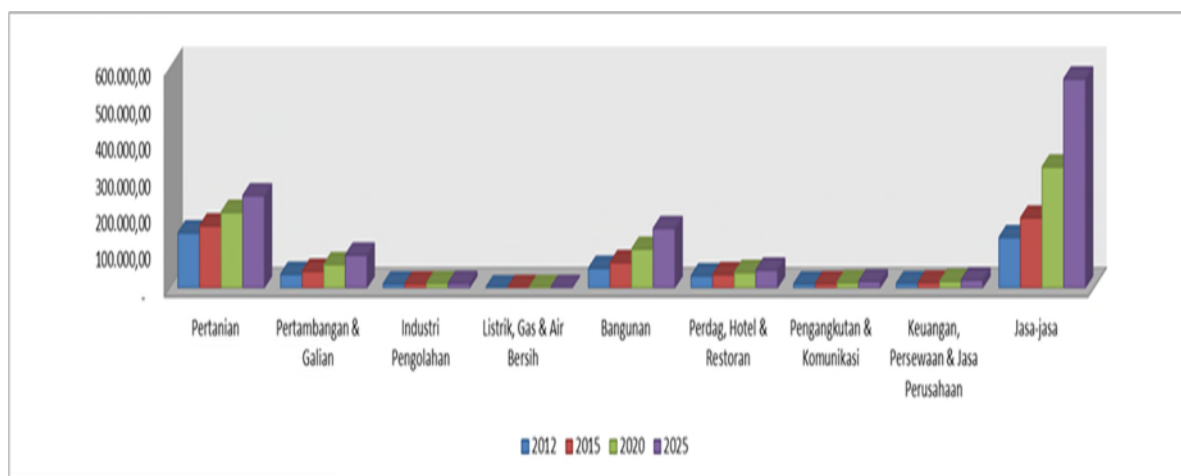
Sumber; Hasil Rancangan Awal Penyusunan RPJP Bolaang Mongondow Utara, 2012.

Untuk mengetahui perkembangan struktur PDRB-ADHK dan PDRB-ADHB dalam kurun waktu perencanaan maka dilakukan proyeksi terhadap sturuktur PDRB. Pada tahun akhir perencanaan sektor pertanian mengalami peningkatan kontribusi terbesar kedua setelah sektor jasa-jasa, dengan kontribusi sebesar 254.338,80 dan sektor dengan jumlah kontribusi terendah adalah sektor Listrik, Gas dan Air bersih sebesar 1.340,80 pada PDRB-ADHK sedangkan pada Proyeksi PDRB-ADHB terjadi hal yang sama

Mengingat pesatnya dinamika pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara maka diprediksi pada tahun 2025 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bisa menjadi pusat perekonomian di Sulawesi Utara. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya kontribusi sub sektor jasa-jasa dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Meskipun demikian prediksi ini harus disertai dengan kebijakan ekonomi yang tepat. Salah satu yang bisa dilakukan adalah menjadikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai pusat pengembangan pertanian modern dengan segala fasilitas/infrastruktur pendukungnya. Kebijakan pengembangan pertanian modern diprediksi bisa menumbuhkan sub sektor ekonomi lain, seperti jasa-jasa. Pada tahun 2025 sub sektor pertanian diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 254.338,80 (juta) dan sub sektor jasa 554.017,50 (juta) seperti yang terlihat pada tabel II.16

Tabel II.16. Proyeksi Struktur PDRB-ADHK

Struktur PDRB-ADHK	2012	2015	2020	2025
Pertanian	146,789.240	171.068,80	208.589,10	254.338,80
Pertambangan & Galian	37,574.690	45.326,96	63.617,51	89.288,76
Industri Pengolahan	12,301.480	12.669,92	13.386,31	14.143,20
Listrik, Gas & Air Bersih	1,100.340	1.099,44	1.214,13	1.340,80
Bangunan	55,388.790	69.059,33	105.741,20	161.907,30
Perdag, Hotel & Restoran	34,626.180	37.109,58	43.053,31	49.949,03
Pengangkutan & Komunikasi	11,235.560	12.105,35	14.454,52	17.259,57
Keu., Persewaan & Jasa Perusah	12,652.410	14.090,75	17.480,98	21.686,90
Jasa-jasa	138,268.960	185.709,70	320.759,20	554.017,50
Total	449,937.640	548.239,80	788.296,30	1.163.932,00



Gambar II.2. Proyeksi Struktur PDRB-ADHK

Tabel II.17. Proyeksi Struktur PDRB-ADHB

Struktur PDRB-ADHB	2012	2015	2020	2025
Pertanian	352.224,78	513.541,65	962.724,31	1.804.796,35
Pertambangan & Galian	65.871,44	89.273,11	148.169,86	245.922,95
Industri Pengolahan	25.177,39	29.842,25	39.615,61	52.589,75
Listrik, Gas & Air Bersih	1.575,96	1.789,53	2.211,72	2.733,51
Bangunan	117.161,09	173.704,78	334.856,76	645.515,04
Perdag, Hotel & Restoran	74.722,63	100.218,41	163.470,64	266.644,12
Pengangkutan & Komunikasi	13.965,46	16.711,78	22.540,76	30.402,85
Keu, Persewaan & Jasa Perusah	20.626,22	25.000,52	34.448,04	47.465,71
Jasa-jasa	358.250,58	601.658,87	1.427.653,11	3.387.622,96
TOTAL	1.029.575,56	1.551.740,90	3.135.690,80	6.483.693,25

Sumber; Hasil Rancangan Awal Penyusunan RPJP Bolaang Mongondow Utara, 2012

2) PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), mengalami peningkatan di setiap tahun pada lima tahun terakhir. PDRB per kapita ADHK pada tahun 2007 memiliki nilai 4,74 juta rupiah terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 5,81 juta rupiah pada tahun 2011. Sedangkan PDRB perkapita ADHB pada tahun 2011 bernilai 12,43 juta rupiah yang sebelumnya pada tahun 2007 bernilai 7,33 juta rupiah.

Tabel II.18. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 5 Tahun Terakhir

PDRB per Kapita	(juta Rupiah)				
	2007	2008	2009	2010	2011
ADHK	4,74	4,98	5,24	5,47	5,81
ADHB	7,33	8,37	9,50	10,74	12,43

Sumber; BPS PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2007-2011

Pada kurun waktu perencanaan proyeksi PDRB Perkapita-ADHK dan PDRB Perkapita ADHB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga akhir perencanaan pada tahun 2025. Untuk lebih jelasnya proyeksi PDRB-ADHK dan PDRB-ADHB dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.19. Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2012 – 2025

PDRB per Kapita	(juta Rupiah)			
	2012	2015	2020	2025
ADHK	5,84	6,39	7,59	9,26
ADHB	13,46	18,09	30,19	51,56

Sumber; Hasil Rancangan Awal Penyusunan RPJP Bolaang Mongondow Utara, 2012

3) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara semenjak tahun 2008 selalu mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi mencapai angka 8,17 %, lebih tinggi di bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara, yang hanya mencapai angka 6,5 % dan 7,3 %.

Tabel II.20. Pertumbuhan Ekonomi 5 (lima) Tahun Terakhir

Skala	Pertumbuhan (%)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Nasional	6,28	6,06	4,3	6,1	6,5
Prov. Sulut	6,47	7,56	7,83	7,12	7,3
Kab. Bolmut	6,80	6,50	6,83	7,62	8,17

Sumber; BPS Provinsi Sulawesi Utara dan Hasil Rancangan Awal Penyusunan RPJP Bolaang Mongondow Utara, 2012

Sebelumnya pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Bolaang Mongondow Utara hanya mencapai angka 7,62 %. Berdasarkan hasil analisis proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 terjadi kembali penurunan menjadi 6,84 %, tetapi terus mengalami peningkatan lagi hingga pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi mencapai 8,33%

Tabel II.21 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2012 - 2025

Skala	Proyeksi Pertumbuhan (%)			
	2012	2015	2020	2025
Kab. Bolmut	6,84	7,19	7,77	8,33

Sumber; Hasil Rancangan Awal Penyusunan RPJP Bolaang Mongondow Utara, 2012

4) Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2011 sebesar 9,82 % atau masih di atas angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara yaitu berkisar 8,46 % tetapi masih di bawah angka kemiskinan Nasional yaitu 12,49 %. Pada tahun 2010 angka kemiskinan Bolaang Mongondow Utara mengalami peningkatan yaitu sebesar 10,23 % dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2009 sebesar 9,93 %.

Tabel II.22. Angka Kemiskinan 5 (lima) Tahun Terakhir

Skala	Penduduk miskin/tahun (%)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Nasional	16,58	15,42	14,15	13,33	12,49
Prov. Sulut	11,42	10,10	9,79	9,10	8,46
Kab. Bolmut	13,03	10,44	9,93	10,23	9,82

Sumber; BPS Provinsi Sulawesi Utara 2012

Berdasarkan proyeksi hingga tahun 2025 angka kemiskinan selalu mengalami penurunan hingga mencapai angka 1,10% di tahun 2025. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dipicu oleh membaiknya struktur perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat di tahun 2025. Hal ini sesuai dengan proyeksi PDRB yang mengalami peningkatan cukup tajam di tahun 2025

Tabel II.23. Proyeksi Angka kemiskinan 2012 - 2025

Skala	Proyeksi Angka Kemiskinan (%)			
	2012	2015	2020	2025
Kab. Bolmut	9,05	8,70	7,21	5,10

Sumber; Hasil Rancangan Awal Penyusunan RPJP Bolaang Mongondow Utara, 2012

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang selalu meningkat dalam setiap tahun, di lima tahun terakhir. Pada tahun 2007 nilai Indeks Pembangunan Manusia adalah 71 dan terus meningkat menjadi 73,06 pada tahun 2011. IPM Bolaang Mongondow Utara masih di bawah IPM Provinsi Sulawesi Utara yang pada tahun 2012 bernilai 76, 51.

Tabel II.24. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 5 (lima) Tahun Terakhir

Skala	Indeks Pembangunan Manusia/tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Prov. Sulut	75,16	75,16	75,16	75,16	76,51
Kab. Bolmut	71,84	72,27	72,63	73,06	73,48

Sumber; BPS Provinsi Sulawesi Utara 2012. Data IPM Sulut 2012 adalah data tahun 2011

Indikator Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Kemampuan Daya Beli. Masing-masing indikator yang menyusun IPM di setiap tahunnya di selang waktu lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan.

Tabel II.25. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 5 Tahun Terakhir

Indikator IPM	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Angka Harapan Hidup	69,45	69,68	69,91	70,06	70,22
Angka Melek Huruf	98,30	98,31	98,39	98,39	98,43
Rata-rata Lama Sekolah	7,10	7,31	7,31	7,42	7,44
Kemampuan Daya Beli	620,13	620,13	620,13	620,13	632,27

Sumber; BPS Provinsi Sulawesi Utara 2012

Angka Harapan Hidup mengalami peningkatan disetiap tahunnya, tercatat pada tahun 2011 memiliki nilai sebesar 70,06 yang pada tahun 2010 hanya mencapai angka 69,91. Artinya rata-rata umur hidup penduduk Sulawesi Utara adalah 70 tahun. Angka Melek Huruf pada tahun 2011 memiliki nilai 98,39 yang sebelumnya pada tahun 2010 memiliki nilai 98,39. Suatu saat nanti Wilayah Sulawesi Utara termasuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bebas dari buta huruf

Indikator IPM untuk rata-rata lama sekolah memiliki nilai sebesar 7,42 pada tahun 2011 dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk Kemampuan daya beli, pada tahun 2007 bernilai Rp.615.130 terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2011 bernilai Rp 628.180.

Tabel II.26. Skenario Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2012 - 2025

Skenario IPM	2012	2015	2020	2025
	73,48	75,27	77,93	80,78

Sumber; Hasil Rancangan Awal Penyusunan RPJP Bolaang Mongondow Utara, 2012

Hasil proyeksi untuk Indeks Pembangunan Manusia yang dapat dirumuskan sebagai skenario, berdasarkan data yang ada maka IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan mencapai target nasional pada tahun 2025 yaitu dengan nilai 80,78. Artinya indeks harapan hidup, angka melek huruf dan kemampuan daya beli semakin meningkat seiring dengan membaik ekonomi masyarakat

2) Jenis Kegiatan Utama

Jenis kegiatan utama berupa angkatan kerja pada tiga tahun terakhir mengalami fluktuatif. Pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 25.867 jiwa yang sebelumnya pada tahun 2009 sebesar 34.020 jiwa. Pada tahun 2011 mengalami penambahan kembali menjadi 30.531 jiwa.

Tabel II.27. Jenis Kegiatan Utama Masyarakat dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 3 (tiga) Tahun Terakhir

No.	Jenis Kegiatan Utama	(jiwa)		
		2009	2010	2011
1.	Angkatan Kerja	34.020	25.867	30.531
	Bekerja	31.376	24.104	28.996
	Menganggur	2.644	1.763	1.535
2.	Bukan Angkatan Kerja	24.900	21.913	17.795
	Sekolah	4.892	4.184	4.624
	Mengurus Rumah Tangga	18.181	14.538	11.251
	Lainnya	1.827	3.191	1.920
	Jumlah	58.920	47.780	48.326
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %		57.74	54.14	63.13

Sumber; BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka 2012

Jenis kegiatan utama bukan angkatan kerja, mengalami penurunan di tiga tahun terakhir. Pada tahun 2009 tercatat sebanyak 24.900 jiwa menurun menjadi 21.913 jiwa pada tahun 2010 dan mengalami terus penurunan hingga pada tahun 2011 menjadi 17.795 jiwa.

Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 54,14 % yang pada tahun 2009 berada pada nilai 57,74 %. Pada tahun 2011 meningkat kembali menjadi 63,13 %.

3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Masyarakat awal yang mendiami wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada dahulu kala terdiri dari kelompok masyarakat yang homogen. Mereka merupakan gabungan pribumi sekitar Lagang Kadu dan Kelompok-kelompok yang berasal dari lereng gunung Kabia, Dumoga, Moibagu dan Doloduo. Dalam rentang waktu perjalanan kelompok masyarakat ini kemudian menyatu membentuk sebuah

identitas bersama, memperjuangkan kepentingan bersama, berperadaban dan tertata dalam suatu tatanan masyarakat yang teratur.

Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow utara dahulunya terdiri dari dua kerajaan atau swapraja yaitu Swapraja Kaidipang Besar dan Swapraja Bintauna. Ke dua swapraja inilah yang kemudian mewariskan budaya dan adat istiadat masyarakat yang masih bertahan sampai sekarang.

Adat dan budaya yang masih ada hingga saat ini yang di wariskan oleh ke-dua swaparaja tersebut antara lain adalah Musyawarah dalam pengambilan keputusan, sekarang ini budaya tersebut bisa kita lihat dalam upacara adat dalam penentuan masuknya hari-hari besar ke agamaan untuk umat muslim. Selain itu juga adat istiadat dan tradisi dari ke-dua swapraja ini bisa dilihat pada prosesi-prosesi adat yang lain seperti pada upacara adat pernikahan dan penyambutan/penjemputan tamu. Budaya Gotong royong dan saling membantu sesama dapat juga terlihat dalam pola interaksi di kehidupan keseharian masyarakat.

Dalam perkembangannya Kabupaten Bolaang mongondow Utara, banyak pendatang yang kemudian bermukim dan menetap di beberapa wilayah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Inilah kemudian yang membentuk kembali pola masyarakat yang heterogen yang mampu menciptakan pola hidup berdampingan secara aman dan tentram antara masyarakat awal/asli yang beretnis Bintauna, Bolangitang, Kaidipang dan Mongondow dengan masyarakat pendatang seperti etnis Arab, Gorontalo, Minahasa, Jawa, Makassar, Bugis dan lainnya.

Tabel II.28. Jumlah Sanggar Seni

No	Nama Sanggar	Alamat	Nama Pemimpin	Jenis Seni	
				Tari	Musik
1.	Mania	Bolangitang	Alfi Basri	✓	✓
2.	Sengkanaung	Batu tajam	Roterham Kakanis		✓
3.		Bintauna	S. Manayang	✓	✓
4.	Inomasa	Pimpi	Yanti Datunsolang	✓	✓
5.	Mokopia	Boroko	Idris Patajenu	✓	✓
6.	Pomama	Ollot	Fatlun Paputungan	✓	

Sumber; Dinas Perhubungan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi kabupaten Bolaang Mongondow, 2012

Sebagai bagian pembinaan terhadap generasi muda, Dunia keolah ragaan di kabupaten Bolaang Mongondow Utara coba di tingkatkan dengan melaksanakan beberapa kegiatan keolahragaan baik secara umum maupaun lewat sekolah-sekolah yang ada. Yang menjadi kendala terhadap perkembangan dunia olah raga adalah belum mencukupinya sarana dan prasarana olah raga serta belum adanya program pembinaan yang berkelanjutan terhadap beberapa cabang olah raga yang telah ada.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

1. Fokus Layanan Urusan Wajib

1) Pendidikan

Salah satu indikator terhadap peningkatan sumber daya manusia adalah melalui dunia pendidikan. Dunia pendidikan bukan hanya sebagai wadah pentransferan ilmu dan pengetahuan tetapi lebih sebagai proses penggodokan terhadap mental dan karakteristik generasi penerus pembangunan bangsa.

Tercatat jumlah penduduk terbanyak berada pada status Tamat Sekolah Dasar, yaitu sebanyak 22.476 jiwa yang tercatat pada tahun 2011, jumlah tersebut terbanyak berasal dari Kecamatan Bolangitang Timur. Disusul oleh jumlah penduduk yang berstatus Tidak/Belum Sekolah sebanyak 14.199 jiwa. Untuk penduduk yang menyelesaikan jenjang pendidikan Strata baik S1, S2 maupun S3 tercatat pada tahun 2011 sebanyak 783 orang.

- **Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) terdiri dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK untuk jenjang pendidikan SD/MI, pada tahun 2007 memiliki nilai 99,91. Mengalami peningkatan hingga tahun 2011 menjadi 105,54. Artinya populasi murid SD/MI yang bersekolah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melebihi batas usia sekolahnya. Untuk jenjang pendidikan SLTP/MTs, APK ditahun 2007 memiliki nilai 77,09 dan pada tahun 2008 menurun menjadi 73,69. Pada tahun 2009 hingga 2011 terjadi peningkatan kembali hingga mencapai nilai 79,33 pada tahun 2011. Pada jenjang pendidikan SLTA/MA/SMK, APK terus mengalami peningkatan dari tahun 2007 sampai tahun 2011. Pada tahun 2007, memiliki nilai 52,71 dan menjadi 60,62 pada tahun 2011.

Tabel II.29. Angka Partisipasi Kasar (APK) di 5 (lima) Tahun Terakhir

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
APK SD/MI	99.91	101.68	103.54	105.35	105.54
APK SLTP/MTs	77.09	73.69	74.39	76.98	79.33
APK SLTA/MA/SMK	52.71	57.40	57.48	57.64	60.62

Sumber; Hasil Rancangan Awal RPJPD Bolaang Mongondow Utara, 2012

Angka Partisipasi Murni untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2007 memiliki nilai 83,90. Pada tahun 2008 menurun menjadi 80,66 dan mengalami peningkatan hingga tahun 2011 bernilai 87,78. APM untuk SMP/MTs mengalami fluktuasi. Pada tahun 2008 dan 2010 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2011 meningkat kembali menjadi 76,60. APM SLTA/MA/SMK mengalami penurunan pada tahun 2009 dan meningkat kembali pada tahun 2011 menjadi 59,60.

Tabel II.30. Angka Partisipasi Murni (APM) di 5 (lima) Tahun Terakhir

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
APM SD/MI	83.90	80.66	78.51	83.95	87.78
APM SLTP/MTs	75.90	71.41	67.57	65.05	76.60
APM SLTA/MA/SMK	52.39	57.40	43.99	47.21	59.60

Sumber; Hasil Rancangan Awal RPJPD Bolaang Mongondow Utara, 2012

Hasil proyeksi Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang pendidikan SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA/SMK secara umum mengalami peningkatan dalam kurun waktu perencanaan hingga tahun 2025. Untuk proyeksi APK SD/MI pada tahun 2025 memiliki nilai 127,86. untuk proyeksi APK SLTP/MTs memiliki nilai 87,67 pada tahun proyeksi 2025 sedangkan untuk APK SLTA/MA/SMK memiliki nilai 98,93.

Tabel II.31. Proyeksi Angka Partisipasi Kasar (APK) hingga tahun 2025

Jenjang Pendidikan	Tahun			
	2012	2015	2020	2025
APK SD/MI	107.00	111.49	119.39	127.86
APK SLTP/MTs	79.90	81.63	84.60	87.67
APK SLTA/MA/SMK	62.78	69.73	83.05	98.93

Sumber; Hasil Analisis Tim

Untuk Proyeksi Angka Partisipasi Murni (APM) hingga akhir tahun perencanaan untuk jenjang SD/MI mengalami peningkatan pada tahun 2025 hasil proyeksi APM sebesar 103,11. Angka Partisipasi Murni SLTP/MTs dan SLTA/MA/SMK secara umum mengalami peningkatan hingga tahun 2025. tahun proyeksi 2025 untuk APM SLTP/MTs dan SLTA/MA/SMK masing-masing memiliki nilai 81,24 dan 77,30. Ini berarti pemerataan atau akses masyarakat terhadap pendidikan SMP dan SMA masih rendah

Tabel II.32. Proyeksi Angka Partisipasi Murni (APM) hingga tahun 2025

Jenjang Pendidikan	Tahun			
	2012	2015	2020	2025
APM SD/MI	89.02	92.09	97.44	100.00
APM SLTP/MTs	78.83	79.38	80.30	81.24
APM SLTA/MA/SMK	50.85	56.01	65.80	77.30

- Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan gedung sekolah dan penduduk usia sekolah di dapat dengan cara membagi jumlah penduduk usia sekolah jenjang tertentu dengan jumlah gedung sekolah pada jenjang tertentu.

Di tingkat SD/MI, rasio ketersediaan sekolah mengalami peningkatan rasio selama 5 lima tahun terakhir, di mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Untuk tingkat SMP/MTs dari tahun 2007 samapi dengan 2010 mengalami peningkatan rasio

tetapi pada tahun 2011 turun kembali menjadi 1 : 63, hal tersebut di karenakan terjadi penurunan jumlah penduduk di usia 13-15 tahun. Untuk tingkat SMA/MA/SMK terjadi fluktuatif, pada tahun 2007 dan 2008 mengalami peningkatan, tetapi ditahun 2009 hingga 2011 mengalami peningkatan dari 1 : 574 menjadi 1 : 600.

Tabel II.33. Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah 5 (lima) Tahun Terakhir

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	SD/MI					
1.1.	Jmlh Gedung Sekolah	88	88	88	88	88
1.2.	Jmlh Pnddk Usia 7-12 tahun	9.014	9.645	10.320	11.043	11.263
1.3.	Rasio	102	110	117	125	128
2.	SMP/MTs					
2.1.	Jmlh Gedung Sekolah	24	24	25	25	25
2.2.	Jmlh Pnddk Usia 13-15 tahun	4.099	4.386	4.693	4.921	4.073
2.3.	Rasio	171	183	188	197	163
3.	SMA/MA/SMK					
3.1.	Jmlh Gedung Sekolah	6	6	7	7	7
3.2.	Jmlh Pnddk Usia 16-18	3.821	3.965	4.017	4.141	4.198
3.3.	Rasio	637	661	574	592	600

Sumber; Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Hasil Rancangan Awal RPJPD Bolaang Mongondow Utara, 2012

- Rasio guru/murid

Rasio guru berbanding murid di tingkat SD/MI pada tahun 2007 sampai dengan 2010 mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2011 menurun kembali menjadi 1:17. Untuk tingkat SMP/MTs rasio perbandingan guru-murid pada tahun 2007 sampai 2010 mengalami peningkatan dan pada tahun 2011 mengalami penurunan kembali menjadi 1:12. Untuk tingkat SMA/MA/SMK rasio guru berbanding murid terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir.

Tabel II.34. Rasio Jumlah Guru dan Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan di 5 (lima) Tahun Terakhir

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	560	575	590	605	637
1.2.	Jumlah Murid	9006	9807	10685	11634	10887
1.3.	Rasio	16	17	18	19	17
2.	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	259	265	269	272	275
2.2.	Jumlah Murid	3160	3232	3491	3788	3231
2.3.	Rasio	12	12	13	14	12
3.	SMA/MA/SMK					
3.1.	Jumlah Guru	112	134	159	178	197
3.2.	Jumlah Murid	2014	2276	2309	2387	2545
3.3.	Rasio	18	17	15	13	13

Sumber; Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Hasil Rancangan Awal RPJPD Bolaang Mongondow Utara, 2012

2) Kesehatan

• Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi pada bayi sebelum mencapai usia satu tahun. AKB di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2011 adalah 17,1 per 1000 kelahiran hidup, Jika di dibandingkan dengan tahun 2010 yang memiliki nilai 8,1 per 1000 kelahiran hidup maka angka ini menunjukan peningkatan. Pada tahun 2009 AKB bernilai 5,6 per 1000 kelahiran hidup yang artinya pada tahun 2011 terjadi peningkatan yang pesat terhadap AKB. AKB tertinggi ada pada Kecamatan Sangkub dan Kecamatan Kaidipang.

Ketersediaan fasilitas medis yang memadai, tenaga medis yang terampil, akses terhadap pelayanan kesehatan, serta pola hidup sehat akan mampu menekan angka kematian bayi di tahun-tahun mendatang.

• Angka Kematian Balita

Angka kematian Balita (AKABA) adalah kematian yang terjadi pada anak sebelum usia lima tahun. Berdasarkan data yang dikumpulkan menunjukan terjadi penurunan AKABA dari 5,6 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2008 menjadi 5,3 per 1000

kelahiran hidup pada tahun 2009. Pada tahun 2010 AKABA bernilai 5,7 per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2011 terjadi peningkatan yaitu 19,6 per 1000 kelahiran hidup.

Berdasarkan data dan informasi yang didapat, AKABA rata-rata terjadi diakibatkan oleh adanya penyakit penyerta pada balita tersebut atau kelainan bawaan sejak lahir.

- Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu (AKI) maternal adalah angka kematian pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas. Pada tahun 2008 terjadi empat kasus kematian ibu yang di akibatkan oleh pendarahan. Pada tahun 2009 terjadi penurunan menjadi tiga kasus yang disebabkan juga oleh pendarahan. Ditahun 2010 terjadi tiga kasus dan pada tahun 2011 terjadi satu kasus di Kecamatan BIntauna.

- Status Gizi

Tahun 2011 jumlah gizi buruk di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menurut profil puskesmas tahun 2011 sebanyak 12 orang penderita gizi buruk atau 0,34%. Kecamatan Sangkub merupakan wilayah yang mempunyai kontribusi terbesar dalam jumlah kasus gizi buruk Di Bolaang Mongondow Utara.

- Angka Kesembuhan Penderita TB Paru

Angka kesembuhan TB Paru pada tahun 2011 mencapai 79,4%, sebelumnya pada tahun 2010 mencapai angka 82,47%, yang artinya terjadi penurunan angka kesembuhan. Angka kesembuhan pada tahun 2009 yaitu sebesar 74,70%, angka tersebut terjadi peningkatan dari tahun 2008 yang memiliki nilai persentase sebesar 45,16%.

Berdasarkan data dinas kesehatan, jumlah penderita klinis TB Paru di puskesmas sebanyak 277 orang dengan jumlah penderita positif TB Paru sebanyak 100 orang. Jumlah yang diobati sebanyak 97 orang sedangkan yang sembuh adalah 80 orang.

- Angka Kesakitan Malaria

Berdasarkan data dari dinas kesehatan, menunjukkan angka kesakitan malaria pada tahun 2011 yang positif sebesar 5,4 atau 393 kasus per 1000 penduduk, pada tahun 2010 yang positif sebesar 2,32 atau 141 kasus per 1000 penduduk dan angka kesakitan malaria klinis 19,22 sedangkan jika di bandingkan pada tahun 2009 yaitu 3,05 per 1000 penduduk.

- Persentase Penderita Kusta Selesai Berobat

Indonesia telah mencapai eliminasi kusta pada pertengahan tahun 2000, namun sampai saat ini penyakit kusta masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat Bolaang Mongondow Utara. Tercatat penderita kusta pada tahun 2008 berjumlah 32 orang. Pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 22 orang. Pada tahun 2010 bertambah menjadi 29 orang dan di tahun 2011 total penderita menjadi 27 orang dan jumlah penderita baru yang kontakannya telah diperiksa adalah 17 penderita.

- Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang dimaksud adalah sarana gedung atau tempat yang dilakukannya proses konsultasi, pengobatan atau pemberian imunisasi terhadap masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan atau memiliki keluhan terhadap kesehatan.

Tabel II.35. Jumlah Fasilitas Kesehatan Per Kecamatan Tahun 2011

No	Kecamatan	Puskesmas	Pustu	Posyandu	Dokter Umum	Dokter Gigi	Total
1.	Sangkub	1	3	27			31
2.	Bintauna	2	3	15	2	1	23
3.	Bolangitang Timur	1	3	10			14
4.	Bolangitang Barat	1	1	18	1		21
5.	Kaidipang	1	2	13	2	1	19
6.	Pinogaluman	2	2	21	1		26
Total		8	14	104	6	2	134

Sumber; BPS, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka 2012

Fasilitas kesehatan yang ada di Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2011 tercatat terdiri dari Puskesmas yang berjumlah 8 Unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 14 unit, Posyandu sebanyak 104 unit, Praktek Dokter Umum 6 unit dan Praktek Dokter Gigi sebanyak 2 unit. Jumlah keseluruhan fasilitas kesehatan yang ada di Bolaang Mongondow Utara sebanyak 134 unit.

3) Pekerjaan Umum

- Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik.

Jalan merupakan prasarana untuk memperlancar kegiatan ekonomi. Makin meningkatnya usaha pembangunan menuntut pula peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar hubungan transportasi

antar daerah, terutama daerah pedesaan, daerah perbatasan dan daerah-daerah terpencil.

Panjang jaringan jalan Nasional yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2011 adalah 470 Km. Panjang jalan yang berada dibawah wewenang Negara hanya 93,1 Kilometer, dibawah wewenang Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak ada dan sisanya berada dibawah wewenang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Untuk Jalan yang pengelolaannya dibawah wewenang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari Jalan Umum, Jalan Desa, Jalan Produksi dan Jalan Usahatani.

Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan tipe permukaan pada tahun 2011 terdiri dari 210,80 Km jalan kerikil dan 4.549,42 Km jalan aspal. Sedangkan berdasarkan kondisi pada tahun 2011 terdiri dari kondisi rusak sepanjang 71,20 Km, sedang sepanjang 97,95 Km dan dalam kondisi baik sepanjang 4.591, 06 Km. Proporsi jaringan jalan dengan kondisi yang baik berbanding dengan total panjang jalan adalah sebesar 0,96.

- Jaringan Irigasi

Irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian. Irigasi yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara umumnya merupakan sistem irigasi yang menyadap langsung disungai melalui bangunan bendungan maupun melalui bangunan pengambian bebas (*free Intake*) kemudian air irigasi dialirkan secara gravitasi melalui saluran sampai ke lahan pertanian. Untuk pengaturan air dilakukan dengan menggunakan pintu air melalui proses gravitasi bumi.

Berdasarkan PP No.20 Tahun 2006 Tentang Irigasi, pembagian kewenangan pengelolaan irigasi primer dan sekunder diberikan kepada Pemerintah Pusat (lebih dari 3.000 Ha), Pemerintah Provinsi (1.000 Ha – 3.000 Ha) dan Pemerintah Kabupaten (kurang dari 1.000 Ha). Saluran Irigasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan mengacu kepada peraturan pemerintah tersebut. Akan tetapi data dan informasi yang dapat ditampilkan saat ini yaitu panjang total saluran sebesar 34.967,22 Km yang tersebar dibeberapa kecamatan yang berfungsi untuk mengaliri air ke areal pertanian seluas 8.828 Ha. Rasio panjang jaringan irigasi pada tahun 2011 adalah 3,96 Km/Ha.

4) Perumahan

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik lingkungan.

- Rumah Layak Huni

Selayaknya rumah yang ditempati memiliki kriteria sehat atau layak huni, yaitu rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan. Berdasarkan profil kesehatan puskesmas dan Bidang P2 dan Wabah Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2011, persentase rumah sehat yang ada sebesar 59,4 % artinya rumah sehat yang ada sudah melebihi setengah dari total jumlah rumah yang ada secara keseluruhan.

- Jumlah Rumah Berdasarkan Akses Terhadap Air Bersih

Sumber air bersih dan air minum yang digunakan rumah tangga dibedakan menurut air kemasan, ledeng, pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, mata air tidak terlindung, air sungai dan air hujan. Berdasarkan data profil kesehatan puskesmas, menunjukkan bahwa jumlah rumah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang menggunakan air kemasan sebesar 2 unit, ledeng sebanyak 877 unit, sumur gali lobang (SGL) sebanyak 9.198 unit, sumur pompa tangan (SPT) sebanyak 22 unit, mata air sebanyak 30 unit, dan sisanya menggunakan sumber air lainnya. Tercatat di Kecamatan Bolangitang Barat terdapat pengguna air ledeng terbanyak.

- Persentase Rumah Memiliki Sarana Sanitasi Dasar

Rumah dengan kepemilikan sarana sanitasi dasar adalah rumah tangga yang memiliki jamban sehat, tempat sampah dan tempat pembuangan air limbah. Pada tahun 2011 tercatat di dalam profil kesehatan puskesmas, jumlah keluarga yang memiliki jamban sebesar 61,6% dari total jumlah hunian yang ada. Memiliki tempat sampah 42,8 % hunian dan yang memiliki tempat pengelolaan air limbah sebanyak 41,2% dari jumlah keseluruhan rumah yang ada.

5) Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Untuk urusan penataan ruang salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja berikut.

- Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau (RTH) yang dimaksud adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Untuk memenuhi kebutuhan RTH di kawasan perkotaan, salah satu yang dapat dilihat adalah jalur hijau yang memanfaatkan median (bagian tengah) jalan di awlainnya.

- Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh pemerintah setempat untuk melakukan kegiatan membangun yang dapat diterbitkan jika rencana bangunan dinilai telah memenuhi ketentuan yang meliputi aspek pertanahan, planologis, teknis bangunan, kesehatan, kenyamanan dan aspek Lingkungan.

Tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan proses pengurusan IMB terbilang cukup rendah, 2 tahun terakhir tercatat tidak lebih dari 30 IMB yang diterbitkan. Kondisi tersebut di karenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemahaman IMB dan kurangnya sosialisasi dari instansi terkait.

6) Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan dapat di artikan sebagai suatu tahapan awal dalam proses pembangunan, yang akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan juga merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi yang ada.

Beberapa dokumen perencanaan pembangunan yang telah di miiki Kabupaten Bolaang Mongondow Utara antara lain adalah; Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang saat ini di tahun 2012 masih dalam proses pembuatan peraturan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja SKPD.

Berdasarkan informasi yang didapat, untuk kegiatan pembangunan infrastruktur seringkali tidak di dahului oleh sebuah proses perencanaan. Ini mengakibatkan ketidak jelasan arahan pembangunan Kabupaten bolaang Mongondow Utara.

7) Perhubungan

Pelayanan perhubungan yang ada saat ini masi berupa perhubungan darat yang menghubungkan antara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan daerah lain di Pulau Sulawesi. Hal ini di karenakan oleh belum tersedianya sistem perhubungan laut maupun udara.

Letak adminstrasi yang di lintasi oleh jalur trans sulawesi memberi keuntungan tersendiri buat daerah ini, lalu lalang arus angkutan umum baik barang maupun penumpang selayaknya dapat memberi konstribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Belum tersedianya berbagai sarana dan prasarana yang menunjang aktifitas perhubungan menjadikan kendala terhadap perkembangan sektor perhubungan di daerah ini. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah, Terminal angkutan darat dan Pelabuhan penyebrangan.

8) Lingkungan Hidup

Upaya pembinaan kesehatan lingkungan dilakukan terhadap institusi dalam menjaga kualitas lingkungannya secara berkala. Upaya yang dilakukan mencakup pemantauan dan pemberian rekomendasi terhadap aspek-aspek penyediaan fasilitas sanitasi dasar (air bersih dan jamban), pengelolaan sampah, sirkulasi udara, pencahayaan dan lain-lain.

- Persampahan

Sistem pengolahan persampahan dikawasan perkotaan telah menggunakan pola pengumpulan di setiap tempat pembuang sampah sementara (TPS) yang di bangun pemerintah di beberapa titik yang di anggap strategis untuk pengumpulan sampah. Setelah sampah terkumpul di TPS sampah kemudian di angkut dan di bawah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Masih terlihat juga sistem tradisional dengan cara membakar ataupun menimbung di pekarangan rumah warga.

- Ekosistem pesisir

Ekosistem pesisir yang dimaksud adalah ekosistem mangrove/bakau yang tersebar diseluruh kecamatan dengan total luas areal sebsar 1.670 Ha. Saat ini ekosistem mangrove belum temanfaatkan dengan baik dan di beberapa titik terlihat adanya kerusakan.

9) Pertanahan

Urusan yang terkait dengan pertanahan salah satunya dapat dilihat adalah dengan persentase lahan yang bersertifikat. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan/mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian di dalam kepemilikan lahan. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan. Analisis indikator ini belum terlaksanakan karena belum adanya data terkait persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

10) Kependudukan dan Catatan Sipil

Gambaran kondisi daerah berkenaan dengan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat melalui beberapa indikator berikut;

- Pendataan Penduduk

Saat ini proses pendataan penduduk yang dilakukan instansi teknis terkait hanya melauai proses pembedaan Kartu Tanda Penduduk (KTP), hal ini mengakibatkan adanya perbedaan data penduduk yang signifikan dengan data yang ada di Kecamatan maupun pusat statistik. Kurangnya sinkronisasi dan konfirmasi membuat terjadi kesimpangsiuran data, misalnya tentang data jumlah penduduk, perkembangan penduduk dan beberapa data kependudukan lainnya.

- Pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Proses pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat dari tingkat pengurusan masyarakat berhubungan dengan; pembuatan KTP, kartu keluarga, akte kelahiran dan akte kematian.

Berdasarkan data terakhir, jumlah Kepala keluarga yang telah memiliki Kartu keluarga per september 2012 sebanyak 24.278 Keluarga dari jumlah kepala keluarga secara keseluruhan. Untuk pengurusan KTP, saat ini masih sedang dilakukan dan

disesuaikan dengan program nasional e-KTP, tercatat kurang lebih 90% penduduk usia 17 tahun ke atas telah melakukan proses pembuatan KTP.

11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Salah satu tujuan MDGs (*Millennium Development Goals*) Tahun 2015 yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Upaya untuk mencapai pembangunan yang berwawasan gender. Indikatornya bisa kita lihat pada keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan.

Proporsi pejabat perempuan pada pemerintahan daerah untuk eselon II sebanyak 3 orang, eselon III sebanyak 36 orang dan eselon IV sebanyak 61 orang, terjadi peningkatan sebesar 19% dari tahun sebelumnya. Selain itu, di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdapat juga keterlibatan perempuan dengan menduduki satu kursi di lembaga legislatif tersebut.

Secara keseluruhan pada tahun 2011 tercatat jumlah pegawai negeri sipil perempuan berjumlah 1.409 PNS, angka ini lebih banyak di bandingkan dengan jumlah PNS berjenis kelamin laki-laki. Yang hanya berjumlah 925 PNS. Hal ini dapat di artikan bahwa tingkat partisipasi dan keterlibatan perempuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lebih banyak dari tahun ke tahun.

Pada tahun terakhir jumlah kasus kekerasan terhadap rumah tangga sebanyak 17 kasus, 12 di antaranya kasus kekerasan fisik dan 5 kasus kekerasan seksual.

12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Gambaran umum kondisi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terkait dengan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat dari indikator kinerja berikut;

- Keluarga Berencana

Jumlah pasangan usia subur, tercatat pada tahun 2011 sebanyak 13.754 PUS, jumlah tersebut terbanyak ada di kecamatan Bintauna dengan jumlah 2.869 PUS dan yang tersedikit ada di Kecamatan Sangkub dengan jumlah PUS sebanyak 1.868.

Peserta KB terbanyak ada di Kecamatan Binatuan dengan jumlah 2.380 peserta, Total secara keseluruhan peserta KB aktif di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebanyak 11.618 peserta. Perbandingan antara pasangan usia subur dan peserta KB

aktif yang tidak begitu besar mengindikasikan tingginya kesadaran masyarakat terhadap program keluarga berencana.

Tabel II.36. Pasangan Usia Subur dan Pencapaian KB Aktif Per Kecamatan Tahun 2011

No	Kecamatan	Pasangan Usia Subur	Peserta KB Aktif
1.	Sangkub	1.868	1.520
2.	Bintauna	2.869	2.380
3.	Bolangitang Timur	2.225	1.832
4.	Bolangitang Barat	2.562	2.043
5.	Kaidipang	2.149	1.712
6.	Pinogaluman	2.091	1.681
	Jumlah	13.764	11.168

Sumber; Badan Kependudukan KB Daerah dan PP Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2012

- Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Tercatat pada tahun 2011 terdapat 5.444 keluarga pra sejahtera dengan populasi terbanyak ada di Kecamatan Bolangitang Barat sebanyak 1.356 dan tersedikit ada di Kecamatan Bintauna yaitu sebanyak 518 KK.

Untuk keluarga sejahtera I (satu) secara keseluruhan berjumlah 6.385 dengan jumlah terbanyak ada di kecamatan Bintauna. Jika melihat tabel di bawah ini maka terlihat jelas bahwa angka keluarga sejahtera I (satu) lebih banyak di bandingkan dengan jumlah keluarga pra sejahtera.

Tabel II.37. Jumlah Status Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (satu) Per Kecamatan Tahun 2011

No	Kecamatan	Pra Sejahtera	KS I
1.	Sangkub	732	609
2.	Bintauna	518	1.627
3.	Bolangitang Timur	1.264	1.015
4.	Bolangitang Barat	1.356	1.342
5.	Kaidipang	982	791
6.	Pinogaluman	592	1.001
	Jumlah	5.444	6.385

Sumber; Badan Kependudukan KB Daerah dan PP Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2012

13) Sosial

Salah satu indikator kinerja yang dapat diukur dari urusan sosial untuk melihat kondisi daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, adalah tersedianya fasilitas peribadatan. Fasilitas peribadatan yang dimaksud adalah tempat melakukan ibadah oleh umat beragama yang diakui oleh pemerintah. Tempat ibadah yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara antara lain terdiri dari Masjid dan Musholah untuk umat Islam dan Gereja untuk umat Kristen Protestan.

Jumlah fasilitas peribadatan di Bolaang Mongondow Utara tercatat pada tahun 2011 sebanyak 156 unit yang terdiri dari 95 unit Masjid, 7 unit Musholah dan 54 unit Gereja.

Tabel II.38. Jumlah Fasilitas Peribadatan Per Kecamatan Tahun 2011

No	Kecamatan	Masjid	Musholah	Gereja	Gereja Katolik	Pura	Vihara
1.	Sangkub	11	1	14	*	*	*
2.	Bintauna	17	1	10	*	*	*
3.	Bolangitang Timur	16	1	17	*	*	*
4.	Bolangitang Barat	19	1	*	*	*	*
5.	Kaidipang	13	2	9	*	*	*
6.	Pinogaluman	19	1	4	*	*	*
Jumlah		95	7	54	-	-	-

Sumber; BPS, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka 2012

Urusan Sosial juga berkenaan dengan pemberian perhatian terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan penanganan tertentu, seperti gangguan kejiwaan, anak terlantar dan lain-lain.

14) Ketenagakerjaan

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran

Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 54,14 % yang pada tahun 2009 berada pada nilai 57,74 %. Pada tahun 2011 meningkat kembali menjadi 63,13 %. Tingkat pengangguran di tiga tahun terakhir terlihat terjadi penurunan. Pada tahun 2009 angka pengangguran bernilai 7,77 dan menjadi 6,82 pada tahun 2010. Pada tahun 2011 turun menjadi 5,03, ini mengindikasikan terjadi trend positif dengan mengalami penurunan tingkat pengangguran di setiap tahunnya.

Tabel II.39. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran

Uraian	2009	2010	2011
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	57.74	54.14	63.13
Tingkat Pengangguran	7,77	6,82	5,03

Sumber; BPS, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka 2012

- Serapan Tenaga Kerja Per Sektor Ekonomi

Jumlah serapan tenaga kerja berdasarkan kelompok sektor ekonomi secara keseluruhan berjumlah 28.996 jiwa, penyerapan tenaga kerja terbesar ada pada sektor primer dengan jumlah 16.375 jiwa yang di dominasi oleh sektor pertanian. Sektor tersier berada pada urutan ke dua yang memiliki angka serapan tenaga kerja terbesar dengan jumlah 9.431 jiwa. Sedangkan sektor sekunder berada pada urutan terakhir yang memiliki tingkat daya serap tenaga kerja terkecil dengan jumlah 3.190 jiwa.

Tabel II.40. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Kelompok Sektor Ekonomi

Kelompok Sektor Ekonomi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sektor Primer	13.575	2.800	16.375
Sektor Sekunder	2.778	412	3.190
Sektor Tersier	3.834	5.597	9.431
Total	20.187	8.809	28.996

Sumber; BPS, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka 2012

15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah koperasi di Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2011 tercatat sebanyak 22 koperasi dengan berbagai jenis koperasi. Koperasi serba usaha merupakan jenis koperasi yang terbanyak dengan jumlah 6 unit yang tersebar 4 wilayah kecamatan. Sebelumnya pada tahun 2009 berdasarkan data BPS jumlah koperasi yang ada sebanyak 64 unit dengan jumlah koperasi terbanyak adalah jenis kopersi produksi. Kurangnya anggota menyebabkan terjadinya penutupan atau tidak berfungsinya lagi koperasi yang ada sehingga pada tahun 2011 tersisa 22 unit koperasi.

Usaha kecil menengah yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow Utara, berdasarkan data terbaru sebanyak 507 unit usaha secara keseluruhan, jenis usaha yang terbesar adalah pada jenis usaha pangan dengan jumlah 257 unit. Jumlah keseluruhan unit usaha kecil dan menengah ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 601 unit maka terjadi penurunan.

16) Penanaman Modal

Urusan yang terkait dengan penanaman modal salah satunya dapat dilihat adalah dengan jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA). Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan/mengetahui seberapa besar perputaran modal yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Semakin besar persentase jumlah investor dan nilai investasinya maka menggambarkan semakin besar tingkat pertumbuhan ekonomi yang ada. Analisis indikator ini belum terlaksanakan karena belum adanya data terkait jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

17) Kebudayaan

Masyarakat awal yang mendiami wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada dahulu kala terdiri dari kelompok masyarakat yang homogen. Mereka merupakan gabungan pribumi sekitar Lagang Kadu dan Kelompok-kelompok yang berasal dari lereng gunung Kabia, Dumoga, Moibagu dan Doloduo. Dalam rentang waktu perjalanan kelompok masyarakat ini kemudian menyatu membentuk sebuah identitas bersama, memperjuangkan kepentingan bersama, berperadaban dan tertata dalam suatu tatanan masyarakat yang teratur.

Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow utara dahulunya terdiri dari dua kerajaan atau swapraja yaitu Swapraja Kaidipang Besar dan Swapraja Bintauna. Ke dua swapraja inilah yang kemudian mewariskan budaya dan adat istiadat masyarakat yang masih bertahan sampai sekarang.

Adat dan budaya yang masih ada hingga saat ini yang di wariskan oleh ke-dua swapraja tersebut antara lain adalah Musyawarah dalam pengambilan keputusan, sekarang ini budaya tersebut bisa kita lihat dalam upacara adat dalam penentuan masuknya hari-hari besar ke agamaan untuk umat muslim. Selain itu juga adat istiadat dan tradisi dari ke-dua swapraja ini bisa dilihat pada prosesi-prosesi adat yang lain seperti pada upacara adat pernikahan dan penyambutan/penjemputan tamu. Budaya Gotong royong dan saling membantu sesama dapat juga terlihat dalam pola interaksi di kehidupan keseharian masyarakat.

Dalam perkembangannya Kabupaten Bolaang mongondow Utara, banyak pendatang yang kemudian bermukim dan menetap di beberapa wilayah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Inilah kemudian yang membentuk kembali pola masyarakat yang

heterogen yang mampu menciptakan pola hidup berdampingan secara aman dan tentram antara masyarakat awal/asli yang beretnis Bintauna, Bolangitang, Kaidipang dan Mongondow dengan masyarakat pendatang seperti etnis Arab, Gorontalo, Minahasa, Jawa, Makassar, Bugis dan lainnya.

Pengembangan nilai budaya melalui pelestarian dan aktualisasi budaya daerah dapat dilihat dengan masih dilestarikannya beberapa tradisi seperti tarian Daiye, tarian tinggulu, tarian giomu dan tari joke. Begitu juga dengan adat istiadat menyangkut prosesi pernikahan, penjemputan tamu dan hari-hari besar keagamaan.

18) Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan kepemudaan dapat dilihat dari adanya organisasi ditingkat kepemudaan. Organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, antara lain terdiri dari Karang Taruna, PPMIBU dan KNPI. Saat ini organisasi kepemudaan yang ada mencoba melibatkan diri dalam mendukung dan mengawal proses pembangunan yang sedang berjalan di Bolaang Mongondow Utara.

Kegiatan keolahragaan di Bolaang Mongondow Utara belum terlihat memiliki kemajuan, belum adanya proses pembinaan yang komprehensif dan berkelanjutan membuat masyarakat kurang memiliki ketertarikan untuk melibatkan diri dalam pengembangan dunia keolahragaan. Saat ini di beberapa pusat kecamatan dan beberapa desa telah memiliki lapangan rumput yang dapat berfungsi sebagai sarana olah raga, hanya saja karena belum di dukung oleh keseriusan pemerintah daerah sehingga aktifitas olah raga yang dilakukan masyarakat terkesan hanya sekedar alternatif kegiatan untuk mengisi waktu lowong.

19) Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

Kondisi daerah Bolaang Mongondow Utara terkait dengan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat dilihat dari indikator kinerja rasio jumlah LINMAS.

Rasio jumlah LINMAS terbesar ada pada Kecamatan Bolangitang Timur dengan nilai rasio sebesar 49,39 atau dengan kata lain di setiap 10.000 jiwa penduduk tersedia jumlah LINMAS sebanyak 49-50 orang. Untuk nilai rasio terkecil ada di Kecamatan Sangkub dengan nilai rasio 35,81.

Semakin besar jumlah LINMAS maka akan semakin besar ketersediaan LINMAS yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tabel II.41. Rasio Jumlah Linmas Per Kecamatan Tahun 2011

No	Kecamatan	Jumlah LINMAS	Jumlah Penduduk	Rasio
1.	Sangkub	38	10.609	35,81
2.	Bintauna	58	12.795	45,33
3.	Bolangitang Timur	64	12.958	49,39
4.	Boangitang Barat	62	14.913	41,57
5.	Kaidipang	46	12.448	36,95
6.	Pinogaluman	46	9.898	46,47
	Jumlah	314	73.621	42,65

Sumber; BPS, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka dan Hasil Analisis 2012

20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Tahun 2008 dan 2009 Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah. Di tahun 2010 Badan Pemeriksa Keuangan kemudian memberikan Opini Tidak Wajar (TW) dan pada tahun 2011 pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bersama dengan tujuh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan predikat Tidak Memberikan pendapat (TMP) atau *disclaimer of opinion* dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pemberian Peredikat *disclaimer of opinion* terhadap Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2011 disebabkan antara lain ditemukannya 15 kasus dalam kelemahan sistem pengendalian intem dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 30 kasus (sumber ringkasan eksekutif ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2012, BPK-RI).

Melihat pemberian opini dari BPK terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah, dapat di katakan bahwa masih lemahnya proses pengolahan keuangan daerah. Hal tersebut juga dapat dilihat dengan adanya ketidak profesionalan dalam pengolahan sumber-sumber pendanaan dalam menunjang pelaksanaan program pembangunan.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang terbentuk berdasarkan amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 masih terbilang baru dan masih giat-giatnya membenahi sistem pemerintahan dan tata kelolah. Salah satunya adalah dengan peningkatan kualitas Sumber daya manusia. Pada tahun 2011 tercatat

Pegawai negeri sipil di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berjumlah 2334 Pegawai dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah Starata satu (S1) yaitu sebanyak 1002 pegawai atau sebesar 42 % dari jumlah keseluruhan pegawai negeri sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Tabel II.42. Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2011

No	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Sampai dengan SD	7	3	10	0,43
2.	SLTP/Sederajat	14	12	26	1,11
3.	SLTA/Sederajat	182	233	415	17,78
4.	Diploma I/II/III	247	598	845	36,20
5.	Strata 1	447	555	1002	42,93
6.	Strata 2	28	8	36	1,54
7.	Strata 3	*	*	*	*
Jumlah/Total		925	1409	2334	100,00

Sumber; BPS, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka 2012

21) Ketahanan Pangan

• Situasi dan Pola Konsumsi Pangan

Situasi dan pola konsumsi pangan tingkat rumah tangga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2011, menunjukkan bahwa masyarakat mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang melebihi kebutuhan, hal ini ditunjukkan dalam jumlah kalori/energi yang dikonsumsi sebesar 2005kka, jumlah tersebut mencapai 100,3 dari total konsumsi energi yang dianjurkan sebesar 2.000 kkal. Tingkat mutu pola konsumsi masyarakat masih kurang beragam, bergizi dan seimbang. Hal ini ditunjukkan dari skor 87,1 atau kurang dari skor PPH ideal sebesar 100.

Kelompok pangan padi-padian menyumbang energi paling besar yaitu 1.151 kkal perkapita per hari (57,4 % dari total konsumsi energi, atau 57,6% dari angka kecukupan energi), diikuti minyak dan lemak 397,8 kkal (19,8% atau 19.9%), pangan hewani 235,9 (11,8%), sayur dan buah 112,8 kkal (5,6%)

• Peta Rawan Pangan

Berdasarkan dokumen peta dan situasi pangan dan gizi kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2011, menunjukkan bahwa dari 6 kecamatan yang ada, terdapat 4 kecamatan termasuk resiko ringan (prioritas 3) (66,7%) dan 2 kecamatan resiko tinggi (prioritas 1) (33,3%). Untuk kecamatan yang termasuk resiko rendah,

ketiga indikator masuk pada kategori yang relatif baik. Namun demikian walaupun pada nilai Composit (gabungan) masuk pada kategori baik (warna hijau) yang didorong oleh dua Indikator yaitu, Indikator Pertanian dan Kesehatan, namun perlu diwaspadai beberapa Kecamatan yang persentase KK Miskin (Prasejahtera dan Sejahtera I) > 50%, dan masih terlacak adanya kasus gizi kurang dan gizi buruk yang membutuhkan perhatian dan penanganan.

Kecamatan yang termasuk kategori resiko tinggi yaitu Kecamatan Bintauna dan Kecamatan Bolangitang Timur disebabkan oleh tingginya persentase KK miskin. Selain itu juga perlu diwaspadai adanya kasus gizi kurang dan gizi buruk. Hasil Analisis Peta Situasi Pangan dan Gizi sampai di tingkat kecamatan dapat dilihat pada di bawah ini

Tabel II.43. Daerah Rawan Pangan Per Kecamatan Tahun 2011

Kabupaten	Kecamatan		
	Resiko Ringan (prioritas 3)	Resiko Sedang (Prioritas 2)	Resiko Tinggi (Prioritas 1)
Bolaang Mongondow Utara	Sangkub, Pinogaluman, Bolangitang Barat, Kaidipang	-	Boangitang Timur dan Bintauna
Jumlah Kecamatan	4	-	2

Sumber; Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2012

22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada jumlah kelompok binaan LPM sebanyak 97 pada tahun 2013, Jumlah LSM sebanyak 7 LSM, PKK sebanyak 104 Organisasi, Posyandu sebanyak 97 Pos. Berdasarkan data tersebut kecenderungan upaya pemberdayaan masyarakat desa masih harus mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah.

23) Statistik

Salah satu tahapan awal dalam proses perencanaan adalah pengumpulan data dan informasi baik dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif. Dokumen statistik merupakan salah satu sumber data dan informasi yang berisikan kebijakan pemerintah, profil dan potensi daerah.

Kelemahan yang ada di Bolaang Mongondow Utara ada pada lemahnya tingkat akurasi data statistik dan ketidak harmonisan data statistika dari setiap instansi teknis terkait.

24) Kearsipan

Arsip merupakan merupakan dokumen yang berisikan data dan informasi serta rekam jejak program dari setiap instansi. Ketersediaannya sangat penting untuk mendapatkan gambaran di masa lalu sebagai pijakan awal untuk merumuskan perencanaan kedepan.

Berdasarkan hasil survey, ditemukan masih lemahnya sistem kersipan di hampir setiap Instansi teknis. Hal ini di indikasikan sebagai bentuk kekurangpahaman pihak instansi dalam memaknai fungsi dan pentingnya kearsipan yang ada.

25) Komunikasi dan Informatika

Pemenuhan kebutuhan komunikasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara saat ini menggunakan jaringan komunikasi seluler yang disediakan oleh beberapa perusahaan telekomunikasi seluler swasta dan yang disediakan oleh PT. Telkom yang merupakan perusahaan telekomunikasi milik negara.

Sistem komunikasi saat ini adalah sistem jaringan nirkabel yang dikelola dengan sistem menara telekomunikasi, yaitu menara BTS (*Base Transceiver System*) yang terdapat di beberapa lokasi yang dianggap strategis dalam pelemparan frekwensi telekomunikasi. Di kabupaten Bolaang Mongondow Utara, berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Komunikasi Informasi, jumlah Tower/BTS yang ada, adalah sebanyak 23 Tower/BTS.

26) Perpustakaan

Terdapat 1 unit perpustakaan daerah dan terdapat juga perpustakaan di beberapa sekolah, adapun perpustakaan yang ada di sekolah terdiri dari SD 51 unit perpustakaan, SMP 11 unit perpustakaan, SMA 3 unit perpustakaan dan SMK 1 unit perpustakaan.

Perpustakaan merupakan wadah yang dihimpunya bahan pustaka untuk masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kuitas hidup masyarakat dalm bidang ilmu pengetahuan dan menunjang dunia pendidikan. Dengan banyaknya jumlah fasilitas

perpustakaan maka menunjukkan adanya peningkatan mutu kehidupan masyarakat di bidang ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan.

2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1) Pertanian

- Tanaman Pangan

Berdasarkan data dan informasi dari Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Komoditi pertanian terdiri dari Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung, Kedelai Singong dan Umbi-umbian. Untuk Komoditi Padi Sawah, pada tahun 2010 sempat mengalami pertambahan Luas area produksi menjadi 10.469 Ha dan diikuti oleh meningkatnya produksi beras menjadi 63.812,80 Ton, tetapi pada tahun 2011 mengalami penurunan luas areal produksi menjadi 8.248 luas areal produksi dan 56.977,50 Ton produksi beras.

Komoditi Jagung selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan luas areal produksi dan diikuti juga dengan penurunan produktifitas jagung. Pada tahun 2007 Luas areal produksi 8.595 Ha dan menjadi 1.845 Ha pada tahun 2011, Sedangkan tingkat produksi menurun menjadi 3.920 Ton pada tahun 2011 yang pada tahun 2007 sempat mengalami tingkat produksi tertinggi dalam waktu 5 tahun terakhir yaitu 27.504 Ton. Tahun 2009, luas area produksi untuk komoditi kedelai, mencapai 367 Ha dengan jumlah produksi 370 Ton, pada tahun 2010 mengalami penurunan yang signifikan yaitu, untuk areal produksi 83 Ha dan jumlah produksi turun mencapai 97, 40 Ton, tetapi pada tahun 2011 mengalami peningkatan kembali menjadi 138 Ha untuk luas areal produksi dan 151, 80 Ton untuk jumlah produksi komoditi kedelai.

Komoditi Singkong dan Umbi-umbian dilihat dari luas areal produksi dan jumlah produksinya di setiap tahun mengalami fluktuatif. Di tahun 2011 luas area produksi 451 Ha yang sebelumnya pada tahun 2010 hanya seluas 376 Ha. Tetapi jumlah produksinya mengalami penurunan di tahun 2010 jumlah produksi singkong dan umbi-umbian mencapai angka 1.721 Ton dan mengalami penurunan menjadi 810,50 Ton pada tahun 2011.

Tabel II.44. Komoditi Pertanian Berdasarkan Luas Area Produksi dan Produktifitas 5 (lima) Tahun Terakhir

No	Komoditi	Tahun					Satuan
		2007	2008	2009	2010	2011	
1.	Padi Sawah						
	Luas areal produksi	6.175,00	6.175,00	5.478	10.469,00	8.248,00	Ha
	Produksi GKP	1.722,00	29.101,00	25.640,04	63.812,80	56.977,50	Ton
	Gabah Kering Giling	1.480,92	25.026,86	22.050,43	54.879,01	49.000,65	Ton
2.	Padi Ladang						
	Luas areal produksi	1.157,00	1.157,00	146,00	829,00	1.541,00	Ha
	Produksi GKP	2.090,00	2.978,00	303,26	1.654,70	3.236,10	Ton
	Gabah Kering Giling	1.797,40	2.561,08	260,80	1.423,04	2.783,05	Ton
3.	Jagung						
	Luas areal produksi	8.595,00	5.765,00	2.925,00	2.829,00	1.845,00	Ha
	Produksi	27.504,00	15.579,00	6.422,00	8.300,00	3.920,00	Ton
4.	Kedelai						
	Luas areal produksi	253,00	180,00	367,00	83,00	138,00	Ha
	Produksi	*	314,00	370,00	97,40	151,80	Ton
5.	Singkong dan umbi-umbian						
	Luas areal produksi	441,00	264,00	326,70	376,00	451,00	Ha
	Produksi	*	3.463,00	362,53	1.721,00	810,50	Ton

Sumber; Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan & Kehutanan Bolaang Mongondow Utara, 2012

Untuk memenuhi kebutuhan akan komoditi pertanian sub sektor tanaman pangan dalam kurun waktu perencanaan hingga akhir tahun 2025, target luas areal produksi padi sawah harus bisa dipertahankan tetapi harus meningkatkan produksi gabah kering panen sebesar 232.676,34 Ton. Untuk target luas areal produksi Padi Ladang bisa ditingkatkan hingga 3.762,50 Ha pada tahun 2025 dan produksi Gabah Kering Panen bisa mencapai angka 5.337,91 Ton. Jagung dengan jumlah produksi sebesar 22.685 ton dengan luas areal produksi sebesar 9.945 Ha, Kedelai sebesar 22.685 ton dengan luas areal produksi 9945 ton, sedangkan singkong dan umbi-umbian dengan target produksi sebesar 3.946,29 ton dengan luas areal produksi sebesar 1321,1 Ha.

Tabel II.45. Target Produksi Komoditi Pertanian dan Luas Area Produksi Hingga akhir tahun 2025

No	Komoditi	Target Luas Areal & Produksi				Satuan
		2012	2015	2020	2025	
1.	Padi Sawah					
	Luas areal produksi	8.248,00	8.248,00	8.248,00	8.248,00	Ha
	Produksi GKP	74.333,40	110.874,08	171.775,21	232.676,34	Ton
	Gabah Kering Giling	63.926,72	95.351,71	147.726,68	200.101,65	Ton
2.	Padi Ladang					
	Luas areal produksi	1.377,00	1.927,50	2.845,00	3.762,50	Ha
	Produksi GKP	2.574,45	3.212,17	4.275,04	5.337,91	Ton
	Gabah Kering Giling	2.214,03	2.762,47	3.676,54	4.590,60	Ton
3.	Jagung					

4.	Luas areal produksi	4005	4545	7245	9945	Ha
	Produksi	8924	10175	16430	22685	Ton
5.	Kedelai					
	Luas areal produksi	303	358	633	908	Ha
5.	Singkong dan umbi-umbian					
	Produksi	315	369,4	641,4	913,4	Ton
5.	Singkong dan umbi-umbian					
	Luas areal produksi	637,45	699,6	1010,35	1321,1	Ha
	Produksi	1482,455	1706,44	2826,365	3946,29	Ton

Sumber; Hasil Rancangan Awal RPJPD Bolaang Mongondow Utara, 2012.

- Perkebunan

Komoditi Perkebunan yang masih memiliki luas areal produksi terbesar adalah komoditi kelapa kemudian di ikuti oleh komoditi Kakao. Sedangkan yang memiliki luas areal produksi terkeci adalah komoditi kemiri dan lada. Tahun 2009 luas areal produksi kelapa sebesar 14.959 Ha dan pada tahun 2011 bertambah menjadi 15.131,50 Ha sedangkan untuk produktifitasnya mengalami peningkatan pada tahun 2011 yaitu sebesar 13.564,88 Ton yang sebelumnya pada tahun 2010 dan tahun 2009 jumlah produksinya masing-masing sebesar 15.096,50 dan 11.740.

Kakao sebagai komoditi kedua tersbesar dari sektor perkebunan setelah kelapa, memiliki luas areal produksi yang di tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 luas areal produksi sebesar 4.709 Ha, pada tahun 2010 menjadi 4.755 Ha dan pada tahun 2011 menjadi 4.819,50 Ha. Sedangkan untuk jumlah produktifitasnya, pada tahun 2009 adalah sebesar 878 Ton. Pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 749,82 Ton dan pada tahun 2011 naik kembali menjadi 905,14 Ton.

Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki komoditi perkebunan yang lain, yaitu komoditi Lada, Vanili, Kopi, Cengkeh, Kemiri dan Pala, tetapi dari segi luas areal dan tingkat produksi komoditi yang lain belum mampu menyamai komoditi kelapa dan kakao.

Tabel II.46. Komoditi Perkebunan Berdasarkan Luas Area Produksi dan Produktifitas 3 (tiga) Tahun Terakhir

No	Komoditi	Tahun			Satuan
		2009	2010	2011	
1.	Kakao				
	Luas areal produksi	4.709	4.755	4.819,50	Ha
	Produksi beras	878	749,82	905,14	Ton
2.	Lada				
	Luas areal produksi	8,50	8,50	6,50	Ha
	Produksi	*	*	*	Ton
3.	Vanili				

	Luas areal produksi	143	128	121	Ha
	Produksi	8,75	*	*	Ton
4.	Kelapa				
	Luas areal produksi	14.959	15.096,50	15.131,50	Ha
	Produksi	11.740	12.993,06	13.564,88	Ton
5.	Kopi				
	Luas areal produksi	241	121,75	144,75	Ha
	Produksi	60,75	43,48	37,19	Ton
6.	Cengkeh				
	Luas areal produksi	289	276	276,50	Ha
	Produksi	*	*	*	Ton
7.	Kemiri				
	Luas areal produksi	20	27	29	Ha
	Produksi	*	*	*	Ton
8.	Pala				
	Luas areal produksi	22,50	30,25	43,50	Ha
	Produksi	*	*	*	Ton

Sumber; Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan & Kehutanan Kab.Bolaang Mongondow Utara, 2012

Target produksi komoditi perkebunan untuk sektor pertanian sebesar 1095,12 ton dan luas areal produksi sebesar 5.593 Ha pada akhir tahun 2025, untuk komoditi kelapa sebesar 26.339,04 ton dengan luas areal 16.339 ton sedangkan untuk sektor 213 ton dengan luas areal produksi 866,625 Ha pada akhir tahun perencanaan.

Tabel II.47. Target Produksi Komoditi Perkebunan Berdasarkan dan Luas Areal Produksi hingga tahun 2025

No	Komoditi	Target Luas Areal & Produksi				Satuan
		Tahun				
		2013	2015	2020	2025	
1.	Kakao					
	Luas areal produksi	4930	5040,5	5116,75	5193	Ha
	Produksi beras	932,28	959,42	1027,27	1095,12	Ton
2.	Kelapa					
	Luas areal produksi	15304	15476,5	15907,75	16339	Ha
	Produksi	15389,76	17214,64	21776,84	26339,04	Ton
3.	Kopi					
	Luas areal produksi	289,125	385,375	626	866,625	Ha
	Produksi	72,53	96,09	154,99	213,89	Ton

Sumber; Hasil Analisis Tim.

- **Peternakan**

Sektor Peternakan yang terbesar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah peternakan Ayam Petelur yang pada tahun 2011 berjumlah 22.300 Ekor, jumlah tersebut mengalami penurunan jika di dibandingkan pada tahun 2010 dan 2009 yang

pada tahun-tahun tersebut sempat mencapai 25.500 ekor dan 23.000 ekor. Jenis peternakan unggas, selain ayam petelur, ayam pedaging dan itik manila juga memiliki populasi yang cukup banyak, yaitu untuk ayam pedaging pada tahun 2011 berjumlah 7.200 ekor dan mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, begitu juga dengan itik manila yang pada tahun 2009 berjumlah 1.042 ekor meningkat menjadi 2.374 ekor pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 bertambah menjadi 5325 ekor.

Jenis hewan ternak besar, sapi potong memiliki jumlah populasi yang terbanyak yaitu berjumlah 12.691 ekor pada tahun 2011 dan mengalami penambahan dari tahun-tahun sebelumnya. Selain sapi potong terdapat juga ternak kambing dengan jumlah populasi pada tahun 2011 sebanyak 6.294 ekor, babi sebanyak 866 ekor dan kuda sebanyak 92 ekor pada tahun 2011.

Rata-rata di setiap tahunnya sektor peternakan mengalami peningkatan populasi kecuali di beberapa hewan yang sempat mengalami penurunan, seperti ternak kuda, ayam petelur dan burung dara.

Tabel II.48. Komoditi Peternakan Berdasarkan Luas Area Produksi dan Produktifitas 3 (tiga) Tahun Terakhir

No	Komoditi	Tahun			Satuan
		2009	2010	2011	
1.	Sapi Potong	7.087	7.300	12.691	Ekor
2.	Kambing	5.552	5.997	6.294	Ekor
3.	Babi	715	787	866	Ekor
4.	Kuda	102	112	92	Ekor
5.	Ayam petelur	23.000	25.500	22.300	Ekor
6.	Ayam pedaging	4.500	6.500	7.200	Ekor
7.	Itik	1.271	1.335	1.402	Ekor
8.	Itik manila	1.042	2.374	5.325	Ekor
9.	Burung dara	372	314	362	Ekor
10.	Angsa	37	43	58	Ekor

Sumber; Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan & Kehutanan Kab.Bolaang Mongondow Utara, 2012

Sektor pertanian dalam struktur PDRB ADHK lima tahun terakhir mengalami peningkatan dan menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan PDRB ADHK, tercatat pada tahun 2011 sebesar 143.744,73 (juta rupiah)

2) Kehutanan

Produksi Kayu bulat dari sektor kehutanan pada tahun 2009 sebesar 995,94 M³ dan menurun menjadi 492,78 M³ pada tahun 2010 dan menurun lagi menjadi 227,72 M³

pada tahun 2011. Berbeda dengan kayu bulat, kayu gergajian mengalami peningkatan di setiap tahunnya pada tiga tahun terakhir. Pada tahun 2011 produksinya mencapai 530,8455 M³, sebelumnya pada tahun 2010 produksinya sebanyak 491,5527 M³ dan di tahun 2009 sebanyak 238,1239 M³. Untuk hasil hutan ikutan, produksinya pada tahun 2011 mengalami penurunan di bandingkan dengan tahun 2010. Pada tahun 2010 produksinya mencapai 220 M³ dan berkurang menjadi 80 M³ pada tahun 2011.

Tabel II.49. Komoditi Kehutanan Berdasarkan Produktifitas 3 (tiga) Tahun Terakhir

No	Komoditi	Tahun			Satuan
		2009	2010	2011	
1.	Kayu Bulat	995,94	492,78	227,72	M ³
2.	Kayu Gergajian	238,1239	491,5527	530,8455	M ³
3.	Hasil hutan ikutan	80	220	80	M ³

Sumber; Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan & Kehutanan Kab.Bolaang Mongondow Utara, 2012

3) Pertambangan

erdasarkan data dan informasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bahwa potensi tambang didominasi oleh tambang non-migas antara lain biji besi, emas, granit, pasir kuarsa dan batuan lanau. Komoditi emas merupakan jenis barang tambang yang memiliki penyebaran terbanyak, yaitu tersebar diempat desa (Huntuk, Paku, Bigo dan Tuntung). Potensi tambang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih dalam tahap eksplorasi awal, sehingga pemerintah belum dapat menyajikan data secara spesifik mengenai kandungan mineral non-migas tersebut. Sampai saat ini belum terdapat aktifitas eksploitasi dari investor, kecuali beberapa kelompok masyarakat yang mencoba melakukan penambangan secara tradisional dengan perlengkapan seadanya.

Tabel II.50. Potensi Sektor Pertambangan dan Bahan Galian

No.	Potensi Tambang	Lokasi
1.	Biji Besi	Desa Mokoditek
		Desa Iyok
2.	Emas	Desa Huntuk
		Desa Paku
		Desa Bigo
		Desa Tuntung
3.	Granit	Desa Ollot
		Desa Inomunga
4.	Pasir Kuarsa	Desa Keakar
		Desa Inomunga
5.	Batuan Lanau	Desa Sangkub I

Sumber; Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Bolaang Mongondow Utara, 2012

4) Pariwisata

Sektor pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di dominasi oleh wisata bahari, wisata alam, wisata sejarah dan budaya. Ragam Potensi dan obyek daya tarik wisata tersebar merata di hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Wisata bahari didominasi wisata pantai dengan rata-rata memiliki daya tarik berupa keindahan pasir putih, air laut yang bersih, gugusan bebatuan besar dan terumbu karang yang eksotis. Wisata alam yang ada berupa ekosistem hutan mangrove, air terjun, agrowisata dan keindahan alam pegunungan/perbukitan. Sedangkan wisata sejarah dan budaya terdiri dari peninggalan sejarah dan adat istiadat dari dua kerajaan besar yaitu Kerajaan Bintauna dan Kaidipang Besar.

Tabel II.51. Potensi dan Obyek Wisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No.	Potensi dan Obyek Wisata	Kecamatan
1.	Kota Bersejarah Boroko	Kaidipang
2.	Hutan Mangrove (bakau)	Kaidipang
3.	Puncak Komus	Kaidipang
4.	Makam Raja-raja Kaidipang (jere)	Kaidipang
5.	Situs Komalig (istana raja)	Kaidipang
6.	Pulau Damar	Kaidipang
7.	Air Belanda	Kaidipang
8.	Pantai Batu Pinagut	Kaidipang
9.	Pantai Dolongulo	Kaidipang
10.	Tanjung Dulang	Kaidipang
11.	Air terjun Pontak	Kaidipang
12.	Bendungan Pontak	Kaidipang
13.	Gunung Gulantu	Kaidipang
14.	Pantai Iyok dan Tanjung Buaya	Bolangitang Barat
15.	Pantai Wakat dan Tanjung Haji	Bolangitang Barat
16.	Kawasan Agrowisata Olot-Paku	Bolangitang Barat
17.	Bendungan Irigasi Paku	Bolangitang Barat
18.	Rumah dan Makam Raja Pontoh	Bolangitang Barat
19.	Pantai Bohabak	Bolangitang Timur
20.	Pantai Biontong	Bolangitang Timur
21.	Agrowisata Padi	Bintauna
22.	Pantai Batu Lintik	Bintauna
23.	Pantai Kuhanga	Bintauna
24.	Makam Raja-raja Bintauna	Sangkub
25.	Bendungan Sangkub	Sangkub
26.	Pantai Batu Meja	Sangkub
27.	Pantai Busisingo	Sangkub
28.	Pantai Talaga	Sangkub
29.	Gerbang Perbatasan & <i>Resting Area</i>	Pinogaluman
30.	Pulau Bongkil	Pinogaluman
31.	Pulau Keramat dan Pantai Dalapuli	Pinogaluman
32.	Tanjung Sidupa	Pinogaluman

Sumber; Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Komunikasi Informasi Kab.Bolaang Mongondow Utara, 2012

5) Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan juga merupakan salah satu sektor andalan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Potensi sektor kelautan dan perikanan ditunjang oleh letak wilayahnya yang cukup strategis, karena memiliki garis pantai yang panjangnya mencapai 174 Km, serta gugusan terumbu karang yang eksotis, asli dan masih alami. Dalam memanfaatkan potensi sektor kelautan dan perikanan yang ada, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan mengembangkan konsep Minapolitan dengan pendekatan agroindustri. Pusat pengembangan Kawasan Minapolitan diarahkan di Kecamatan Pinogaluman karena daerah tersebut menjadi sentra produksi sektor kelautan dan perikanan.

Tabel II.52. Komoditi Perikanan Tangkap Berdasarkan Produksi 2 (dua) Tahun Terakhir

No.	Komoditi	Produksi (Kg)	
		2010	2011
1.	Tuna	477.492	477.695
2.	Cakalang	355.006	358.442
3.	Selar	348.969	350.427
4.	Lemulu	284.799	289.208
5.	Tandipang	175.189	183.551
6.	Kerapu	20.719	24.299
7.	Kakap Putih	43.824	46.310
8.	Lobster	8.136	9.145
9.	Kakap Merah	38.995	48.348
10.	Teri	274.555	275.362
11.	Layur daun tebu	5.255	5.319
12.	Hiu	15.731	16.192
13.	Sotong/Cumi	14.568	14.917
14.	Malalugis	240.217	242.228
15.	Sardin	56.802	58.888
16.	Gurita	4.155	4.463
17.	Terbang Anton	75.980	76.098
18.	Tongkol	208.381	220.161
19.	Baronang	11.019	11.161
20.	Pari	1.572	1.575
21.	Kuwe/Bobara	28.353	28.854
Jumlah		2.687.717	2.742.643

Sumber; Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Bolaang Mongondow Utara, 2012

Sektor kelautan dan perikanan yang terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap (semua komoditi perikanan), mengalami peningkatan produksi yang cukup signifikan dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini (tahun 2010 – tahun 2011). Pada

tahun 2010 jumlah total produksi perikanan tangkap sebesar 2.687.717 Kg dan meningkat menjadi 2.742.643 Kg pada tahun 2011.

Hasil perikanan tangkap yang memiliki produksi tertinggi adalah jenis ikan tuna, yaitu sebesar 477.695 Kg selanjutnya disusul jenis ikan cakalang, selar dan lemulo. Jenis komoditi tersebut produksinya cukup tinggi diantara komoditi perikanan tangkap lainnya karena jenis ikan-ikan tersebut merupakan ikan-ikan khas yang terdapat di perairan teluk tomuni. Produksi perikanan tangkap dapat ditingkatkan lagi oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan penggunaan alat tangkap modern dan berteknologi tinggi, namun dengan tidak melampaui *Maximum Sustainability Yield (MSY)*.

Sedangkan untuk sektor kelautan dan perikanan yang berbasis pada perikanan budidaya, jenis budidaya laut berupa ikan Kuwe (dalam bahasa lokal di sebut ikan bobara) merupakan komoditi yang sangat potensial untuk dikembangkan karena produksinya paling tinggi dibandingkan komoditi perikanan budidaya lainnya. Selain Ikan kuwe, rumput laut juga merupakan salah satu komoditi perikanan budidaya yang memiliki produksi yang cukup tinggi.

Tabel II.53. Produksi Budidaya Sektor Perikanan dan Kelautan Tahun 2011

No.	Jenis Budidaya	Produksi (Kg)
1.	Budidaya Laut	
	Rumput Laut	5.074,00
	Kerapu	-
	Kuwe	11.751,00
2.	Budidaya Kolam Air Tenang	
	Mas	0,71
	Nila	1,03
3.	Budidaya Tambak/Air Payau	
	Udang Windu	-
	Bandeng	0,49
	Jumlah	16. 827,23

Sumber; Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Bolaang Mongondow Utara, 2012

6) Perdagangan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perdagangan salah satunya dapat dilihat dari indikator berupa ketersediaan fasilitas perdagangan. Saat ini belum tersedia pasar induk sebagai salah satu fasilitas di kawasan perkotaan. Untuk aktifitas perdagangan skala besar dilakukan jadwal mingguan per kecamatan. Untuk kawasan perkotaan dan kecamatan bintauan terdapat dua kali hari pasar dalam seminggu dengan melayani masyarakat di daerah sekitarnya.

Untuk perdagangan skala kecil tersebar di seluruh kecamatan dalam bentuk warung atau pun mini market. Sumbangsih sektor perdagangan terhadap pertumbuhan PDRB ADHK dan ADHB, selalu mengalami peningkatan di lima tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2011 nilai sumbangsih sektor perdagangan bersama-sama dengan hotel dan restoran, pada PDRB ADHK sebesar 32.172,94 (juta rupiah) sedangkan pada PDRB ADHB sebesar 64.201,33 (juta rupiah).

7) Transmigrasi

Urusan pilihan terkait dengan Transmigrasi berhubungan dengan jumlah UPT atau Unit Permukiman Transmigrasi, Saat ini unit permukiman transmigrasi terdapat di Kecamatan Sangkub dan Kecamatan Bolangitang Barat (Desa Ollot) yakni Transmigrasi Goyo.

8) Industri

Terkait dengan urusan industri, di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum tersedia industri dengan skala besar dan menengah. Saat ini industri yang ada baru berskala kecil dan industri rumah tangga.

Tabel II.54. Jumlah Industri Perjenis Unit Usaha Tahun 2011

No	Uraian Industri	Unit Usaha	Nilai Investasi (Rp.1000)	Nilai Produksi (Rp.1000)
1.	Pangan	206	2.623.112	989.201
2.	Sandang	25	121.440	165.669
3.	Kimia dan Bahan Bangunan	52	1.094.733	1.900.821
4.	Logam dan Electronika	57	679.110	435.400
5.	Kerajinan	92	48.000	192.000
6.	Aneka Industri	169	360.000	35.000
	Jumlah	601	4.926.395	3.718.091

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Terdiri dari pengeluaran konsumsi pangan dan Pengeluaran Konsumsi non Pangan. Pengeluaran konsumsi merupakan kebutuhan terhadap 9 bahan pokok ditambah dengan asupan gizi yang lain sedangkan untuk konsumsi nonpangan terdiri dari, sandang, papan dan kebutuhan finansial lain.

Dilihat dari data yang ada maka terjadi peningkatan kemampuan daya beli masyarakat dalam setiap tahun di lima tahun terakhir. Ini mengindikasikan terjadinya trend positif. Saat ini kemampuan daya beli masyarakat mencapai Rp 632,270/bulan. Artinya rata-rata pengeluaran masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mencapai Rp 632,270/bulan

Tabel II.55. Kemampuan Daya Beli di 5 (lima) Tahun Terakhir

Uraian	Tahun (ribu)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Kemampuan Daya Beli	620,13	620,13	620,13	620,13	632,27

Sumber; BPS Provinsi Sulawesi Utara 2012

2) Produktivitas Total Daerah

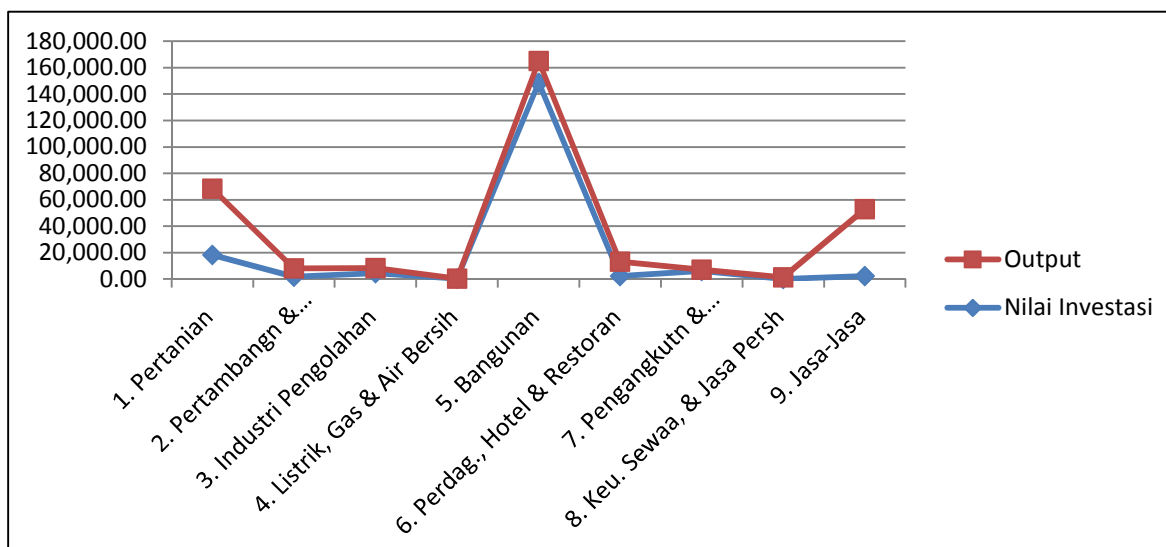
Produktifitas daerah dapat di wakili dengan melihat tingkat produktifitas tiap sektor dalam menunjang pertumbuhan PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Sektor-sektor tersebut terdiri dari; Pertanian; Pertambangan dan galian; Industri pengolahan; Listrik, gas, dan air bersih; Bangunan; Perdagangan, hotel dan Restoran; Pengangkutan dan komunikasi; Keuangan persewaan dan jasa perusahaan; dan Jasa-jasa. Produktifitas sektor dapat dilihat dari besaran investasi, output yang dihasilkan, ICOR dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2011 digambarkan pada tabel 56. Tabel tersebut menunjukkan bahwa walaupun investasi yang masuk dalam perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih relatif kecil namun sangat efektif dalam meningkatkan output. Sehingga itu diperlukan usaha dan kerja keras oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan nilai investasi yang masuk dalam perekonomian daerah, sehingga dapat menciptakan peningkatan output secara signifikan dan membuka lapangan usaha baru. Lapangan usaha yang sangat produktif adalah jasa-jasa dengan nilai investasi Rp.2.221,66 (milyar) dapat menghasilkan output sebesar Rp.50.767,54 (milyar), dengan pertumbuhan ekonomi 10,43%. Sedangkan lapangan usaha yang kurang produktif adalah sektor bangunan, walaupun dengan jumlah investasi Rp.148.554,24 (milyar) hanya menghasilkan output Rp. 16.455,92 (milyar).

Tabel II.56. Nilai Investasi, Output, ICOR dan Pertumbuhan Ekonomi (PE)

LAPANGAN USAHA	INVESTASI		OUTPUT		ICOR	PE (%)
	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%		
1. Pertanian	18,278.53	9.94	50,175.75	35.66	0.36	6.54
2. Pertambangan & Penggalian	1,763.37	0.96	6,305.04	4.48	0.28	6.24
3. Industri Pengolahan	4,442.50	2.42	3,827.00	2.72	1.16	10.28
4. Listrik, Gas & Air Bersih	192.92	0.10	70.92	0.05	2.72	2.03
5. Bangunan	148,544.24	80.75	16,455.92	11.69	9.03	11.21
6. Perdag., Hotel & Restoran	2,353.02	1.28	10,818.41	7.69	0.22	7.41
7. Pengangkutan & Komunikasi	6,053.35	3.29	1,093.73	0.78	5.53	4.38
8. Keu. Sewaa, & Jasa Persh	98.66	0.05	1,207.67	0.86	0.08	3.98
9. Jasa-Jasa	2,221.66	1.21	50,767.54	36.08	0.04	10.43
JUMLAH	183,948.24	100	140,721.99	100	1.31	8.17

Sumber; BPS Kabupaten Bolaang Mongondow 2012

Grafik berikut menggambarkan perbandingan antara investasi dan output setiap lapangan usaha di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2011.



Gambar II.3. Perbandingan Investasi dan Output

2. Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

1) Rasio Panjang Jalan Per jumlah Kendaraan

Tercatat panjang jalan yang ada pada tahun 2011 sebanyak 4760,21 Km dan jumlah kendaraan yang ada sebanyak 5950 Unit. Rasio panjang jalan per jumlah penduduk di dapat sebesar 0,8.

2) Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Jumlah Bank yang ada terdiri dari 3 unit cabang pembantu Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berada di Kecamatan Kaidipang, Kacamatan Bolangitang Barat dan Kecamatan Bintauana. 1 Cabang Bank Sulut yang terltak di pusat pemerintahan yaitu di kecamatan Kaidipang.

Ketersediaan fasilitas perbankan sangat penting dalam menunjang aspek daya saing daerah, khususnya tentang keancaran lalu lintas keuangan dan proses simpan pinjam dalam mendukung pembangunan daerah.

3) Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran

Ketersediaan restoran dan rumah makan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi. Gambaran umum daerah terkait dengan ketersediaan restoran dan rumah makan adalah dengan melihat jumlah restoran dan rumah makan yang tersedia. Pada tahun 2011 berdasarkan data yang di data jumlah restoran berjumlah 28 restoran sedangkan untuk rumah makan sebanyak 74 rumah makan.

4) Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel

Ketersediaan penginapan/hotel sangat menunjang pembangunan daerah. Banyaknya penginapan/hotel menunjukkan perkembangan perekonomian dan potensi-potensi yang ditimbulkannya. Gambaran umum tentang ketersediaan penginapan/ hotel dapat dilihat dari jumlah ketersediaan penginapan/hotel yang ada di suatu daerah.

Pada saat ini tercatat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdapat tiga unit penginapan/hotel. Pada tahun sebelumnya hanya terdapat 3 unit penginapan/hotel.

3. Fokus Iklim Berinvestasi

1) Angka Kriminalitas

Jenis kejahatan yang terdata di laporkan pada pihak berwajib di kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2011 terdiri dari 10 jenis kejahatan. Jenis kejahatan terbanyak adalah kasus penganiayaan biasa dengan jumlah 12 kasus dan yang terselesaikan sebanyak 9 kasus.

Secara keseluruhan jumlah kasus yang di laporkan sebanyak 49 kasus dan yang mampu di selesaikan sebanyak 30 kasus. Jenis kejahatan Perzinaan dan Penipuan merupakan jenis kejahatan yang paling sedikit yang di laporkan, tercatat masing-masing pada tahun 2011 hanya memiliki satu kasus kejahatan. Angka Kriminalitas pada tahun 2011 sebesar 6,65.

Tabel II.57. Angka Kriminalitas yang Dilaporkan dan Diselesaikan 2011

Jenis Kejahatan	Dilaporkan	Diselesaikan
Kejahatan Susila	7	5
Pembunuhan	5	4
Aniaya Biasa	12	9
Pencurian Biasa	3	2

Pencabulan	6	2
Perzinaan	1	
Pemeriksaan	5	2
Penipuan	1	1
Pengancaman	6	3
Penghinaan	3	1
Serobot		1
Jumlah	49	30

Sumber; BPS, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka 2012

4. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu variabel dalam menunjang proses pembangunan daerah. Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM dari tahun ke tahun harus ditingkatkan.

1) Tingkat Ketergantungan/Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban tanggungan penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun sedangkan yang tidak produktif adalah yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun.

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting karena dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah. Pada tahun 2011 jumlah penduduk produktif di Bolaang Mongondow Utara tercatat berjumlah 46.395 jiwa, sedangkan penduduk tidak produktif berjumlah 25.767 jiwa. Dari data tersebut maka di dapatkan nilai dari rasio ketergantungan Bolaang Mongondow Utara sebesar 57,69.

2) Kualitas Tenaga Kerja (rasio lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakatnya. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi pula kualitas tenaga kerja yang ada. Tahun 2011 tercatat penduduk dengan lulusan pendidikan S1, S2 dan S3 sebanyak 793 jiwa dan jumlah total penduduk Bolaang Mongondow Utara sebanyak 73621 jiwa, maka rasio lulusan S1, S2 dan S3 sebesar 107,71.

Tabel II.58
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2007	2008	2009	2010	2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1.1	PDRB – ADHK	315.607,82	336.130,91	359.094,08	386.453,09	416.865,84	Bertumbuh	Tercapai
1.1.1.2	PDRB – ADHB	487.649,47	565.050,87	651.710,41	759.123,63	892.236,32	Bertumbuh	Tercapai
1.1.1.3	PDRB – ADHK Perkapita (juta rupiah)	4,7	4,98	5,24	5,47	5,81	Bertumbuh	Tercapai

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.4	PDRB – ADHB Perkapita (juta rupiah)	7,33	8,37	9,50	10,74	12,43	bertumbuh	Tercapai
1.1.1.5	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,80	6,50	6,83	7,62	7,87	>7	Melampaui
1.1.1.6	Angka Kemiskinan (%)	13,03	10,44	9,93	10,23	9,82	berkurang	Tercapai
1.1.1.7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			57,74	54,14	63,13	65	Belum Tercapai
1.2.	Kesejahteraan Sosial							
1.2.1	Pendidikan							
1.2.1.1	Angka melek huruf	98,30	98,30	98,31	98,39	98,39	99	Belum Tercapai
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah	7,10	7,10	7,31	7,31	7,42	9	Belum Tercapai
1.2.1.3	Indeks Pembangunan Manusia	71	72	72	73	73,06	80	Belum Tercapai
2.	PELAYANAN UMUM							
2.1	Pelayanan Urusan Wajib							
2.1.1	Pendidikan							
2.1.1.1	Pendidikan dasar (SD/MI)							
2.1.1.1.1	Angka Partisipasi Kasar	99,91	101,68	103,54	105,35	96,66	>100	Belum Tercapai
2.1.1.1.2	Angka Partisipasi Murni	99,72	82,50	86,63	97,54	96,66	>95	Tercapai
2.1.1.1.3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1 : 102	1 : 110	1 : 117	1 : 125	1 : 128	1 : 120	Sesuai
2.1.1.1.4	Rasio guru terhadap murid	1 : 16	1 : 17	1 : 18	1 : 19	1 : 17		Sesuai
2.1.1.2	Pendidikan menengah (SLTP/MTs)							
2.1.1.2.1	Angka Partisipasi Kasar	77,09	73,69	74,39	76,98	79,33	>95	Belum Tercapai
2.1.1.2.2	Angka Partisipasi Murni	75,90	71,41	72,09	70,19	79,08	>95	Belum Tercapai
2.1.1.2.3	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	1 : 171	1 : 183	1 : 188	1 : 197	1 : 163	1 : 200	Sesuai
2.1.1.2.4	Rasio guru terhadap murid	1 : 12	1 : 12	1 : 13	1 : 14	1 : 12		Sesuai
2.1.1.3	Pendidikan menengah Atas (SMA/SMK/MA)							
2.1.1.3.1	Angka Partisipasi Kasar	52,71	57,40	57,48	57,64	60,62	>70	Belum Tercapai
2.1.1.3.2	Angka Partisipasi Murni	52,39	57,40	43,99	47,21	59,60	>70	Belum Tercapai
2.1.1.3.3	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	1 : 637	1 : 661	1 : 574	1 : 592	1 : 600	1 : 400	Sesuai

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.1.3.4	Rasio guru terhadap murid	1 : 18	1 : 17	1 : 15	1 : 13	1 : 13		Sesuai
2.1.2	Kesehatan							
2.1.2.1	Angka Harapan Hidup	69,18	69,45	69,68	69,91	70,06	>70	Tercapai
2.1.2.2	Angka Kematian Bayi			5,6	8,1	17,1	23	Tercapai
2.1.2.3	Angka Kematian Balita		5,6	5,3	5,7	19,6		
2.1.3	Angka Kematian Ibu		4	3	3	1	<102	Tercapai
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan							
2.2.1	Pertanian							
2.2.1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
	a. Padi	19310	*	23013	37919	36128,46	menurun	Belum Tercapai
	b. Jagung	27504	15579	6422	8300	3920	Menurun	Belum Tercapai
	c. Kedelai	*	314	370	97,40	151,80	Meningkat	Belum Tercapai
	d. Singkong & Umbi-umbian	*	3463	362,53	1721	810,50	Menurun	Belum Tercapai
2.2.1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB - ADHK	38,69	38,06	36,55	35,45	34,48	Menurun	Belum Tercapai
2.2.1.3	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB – ADHB	35,80	35,86	34,88	34,31	33,94	Menurun	Belum Tercapai
3.	DAYA SAING DAERAH							
3.1	Kemampuan Ekonomi							
3.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.1.1.1	Kemampuan Daya Beli (Rp)	615.130	620.130	622.010	624.890	628.180	meningkat	Belum tercapai

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
3.2.1	Perhubungan							
3.2.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan					0,8		
3.2.1.2	Angka Kriminalitas					6,65		
3.2.1.3	Rasio Ketergantungan					57,69		
3.2.1.4	Rasio Lulusan S1, S2 & S3					107,71		

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang menghadapi permasalahan dan tantangan baik yang bersifat lokal (daerah) maupun yang bersifat global. Permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah terkait dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan akselerasi pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah bertumpuh kepada gambaran Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan akan menjadi andasan daam penyusunan Isu-isu strategis.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tidak semua permasalahan tiap urusan dijadikan sasaran pokok selama 20 (dua puluh) tahun ke depan, mengingat keterbatasan pendanaan, isu strategis yang muncul, fokus kepada agenda paling strategis, dan hubungannya dengan agenda-agenda pembangunan yang telah berhasil dicapai di periode sebelumnya. Dengan pendekatan manajemen strategis, permasalahan pada urusan atau gabungan urusan yang akan dijadikan sebagai dasar penentuan sasaran pokok adalah permasalahan-permasalahan yang memiliki dampak paling tinggi terhadap pembangunan dan kriteria-kriteria lain yang sesuai peraturan perundang-undangan.

1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Wajib Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Menurut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Pasa 7 ayat 1, Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari;

1) Pendidikan

Salah satu indikator terhadap peningkatan sumber daya manusia adaah melalui dunia pendidikan. Dunia pendidikan bukan hanya sebagai wadah pentransferan ilmu dan pengetahuan tetapi lebih sebagai proses penggodokan terhadap mental dan karakteristik generasi penerus pembangunan bangsa.

Berdasarkan hasil pengolahan data dan informasi yang ada, permasalahan untuk urusan pendidikan antara lain terdiri dari:

- a) Masih terdapat penduduk usia sekolah yang belum/tidak melanjutkan pendidikan
- b) Masih rendahnya APK dan APS untuk jenjang pendidikan SLTA/MA/SMK
- c) Belum meratanya penyebaran tenaga pendidik
- d) Belum memadai kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
- e) Belum memadai kualitas dan kuantitas tenaga pendidik;
- f) Pembiayaan pendidikan yang masih belum sepenuhnya gratis

2) Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator dalam melihat kualitas sumber daya manusia. Meningkatnya kualitas kesehatan akan mempengaruhi juga kualitas sumber daya manusia dan secara berurutan akan mempengaruhi kualitas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Permasalahan terhadap urusan kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, berdasarkan hasil pengolahan data dan informasi terdiri dari:

- a) Tingginya angka kematian bayi
- b) Masih adanya angka kematian ibu dalam setahun
- c) Masih adanya kasus gizi buruk dalam setiap tahun
- d) Masih kurang dan belum meratanya distribusi tenaga medis (dokter umum dan spesialis)
- e) Belum meratanya sarana kesehatan di setiap desa serta fasilitas medis yang memadai
- f) Kesadaran akan pola hidup sehat masih kurang khususnya untuk masyarakat berpendidikan rendah/masyarakat miskin.
- g) Kurang maksimalnya pelayanan terhadap pasien

3) Pekerjaan Umum

Ketersediaan jaringan jalan akan mempengaruhi aksesibilitas (kemudahan pencapaian) manusia dan barang. Kemudahan pencapaian tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan dan perputaran ekonomi daerah. Salah satu yang perlu di perhatikan adalah ketersediaan jaringan jalan menuju sentra-sentra produksi.

Selain jaringan jalan, kondisi jaringan Irigasi menjadi bagian dari indikator untuk menilai kondisi urusan wajib berkenaan dengan pekerjaan umum. Keberadaan jaringan irigasi adalah untuk menunjang sistem pengairan perawahan.

Permasalahan yang di dapati untuk urusan pekerjaan umum, antara lain terdiri dari:

- a) Masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan yang layak, khususnya untuk jalan desa, jalan produksi dan jalan usaha tani.

- b) Belum optimanya fungsi jaringan irigasi
 - c) Rendahnya kualitas konstruksi yang di hasilkan
 - d) Kurangnya koordinasi lintas sektor dan lintas SKPD/lembaga
 - e) Lemahnya perencanaan dan pengawasan teknis
- 4) Perumahan

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik lingkungan. Berdasarkan profil kesehatan puskesmas dan Bidang P2 dan Wabah Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2011, persentase rumah sehat yang ada sebesar 59,4 % artinya rumah sehat yang ada sudah melebihi setengah dari total jumlah rumah yang ada secara keseluruhan.

Permasalahan untuk urusan perumahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari:

- a) Masih terdapatnya rumah yang belum memiliki jamban/WC pribadi.
- b) Belum optimalnya penataan kawasan permukiman
- c) Belum optimalnya fungsi drainase perkotaan yang ada

5) Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

Permasalahan penataan ruang yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari:

- a) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam proses pengurusan IMB
- b) Belum adanya legalisasi terhadap rencana tata ruang wilayah
- c) Belum adanya kebijakan yang mengatur tentang perencanaan/penataan ruang di tingkat kabupaten

d) Kurangnya kajian/studi yang berkenaan dengan perencanaan dan penataan ruang

6) Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan dapat di artikan sebagai suatu tahapan awal dalam proses pembangunan, yang akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan juga merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembanguan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi yang ada.

Permasalahan untuk urusan wajib perencanaan pembangunan, adalah sebagai berikut:

- a) Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan
- b) Terbatasnya ketersediaan data dan informasi dalam menunjang perencanaan pembangunan daerah
- c) Masih lemahnya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi perencana dan peneliti
- d) Adanya SKPD yang belum memiliki Renstra dan Renja
- e) Adanya pembangunan infrastruktur tanpa berpedoman dengan dokumen perencanaan yang sudah ada.

7) Perhubungan

Perhubungan erat hubungannya dengan tingkat aksesibilitas manusia dan barang. Permasalahan untuk urusan perhubungan, antara lain terdiri dari:

- a) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam perilaku berlalu lintas
- b) Belum tersedianya fasilitas terminal angkutan darat sebagai tempat pemberhentian sementara serta tempat bongkar muat barang dan penumpang
- c) Belum adanya fasilitas pelabuhan untuk mendukung transportasi laut
- d) Terbatasnya pelayanan angkutan penumpang antar daerah dalam propinsi maupun antar propinsi.

8) Lingkungan Hidup

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup merupakan bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan diharapkan dapat dilakukan secara cermat, berhati-hati dan berkelanjutan yang didukung dengan penegakan hukum secara adil dan konsisten, konservasi kawasan, peningkatan peranserta masyarakat dalam menanggulangi permasalahan lingkungan.

Di masa depan, berbagai isu perdagangan global seperti gerakan green consumer, persyaratan ketat dalam perdagangan internasional seperti ecolabelling, ecoeficiency, ISO 14000, produksi bersih dan persyaratan komoditi ramah lingkungan akan semakin menguat. Hal ini akan berpengaruh terhadap sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Bolaang Mongondow Utara.

Permasalahan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari:

- a) Masih adanya masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya.
- b) Rusaknya ekosistem mangrove di beberapa tempat
- c) Masih adanya pembukaan lahan baru dengan metode pembakaran
- d) Kurangnya penanganan terhadap DAS
- e) Belum tersedianya sarana dan pra sarana sistem pengolahan sampah
- 9) Pertanahan

Urusan yang terkait dengan pertanahan salah satunya dapat dilihat adalah dengan persentase lahan yang bersertifikat. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan/mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian di dalam kepemilikan lahan. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan. Saat ini belum tersedia data tentang persentase tanah yang bersertifikat. Adapun permasalahan dibidang pertanahan adalah:

- a) Maraknya perubahan fungsi lahan;
- b) Masih rendahnya status kepemilikan tanah (tanah bersertifikat);
- c) Masih terdapat ketidakjelasan status kepemilikan tanah akibat dari pelebaran jalan
- d) Sulitnya pengalihan fungsi HGU

10) Kependudukan dan Catatan Sipil

Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah penduduk. Tercatat pada tahun 2011 jumlah penduduk sebesar 73.621 jiwa. Urusan kependudukan dan catatan sipil, memiliki permasalahan antara lain adalah Lemahnya data base kependudukan yang ada, ini bisa dilihat dengan belum sistematis dan komprehensifnya sistem pendataan penduduk menyangkut:

- a) Ketidak harmonisan data kependudukan di beberapa instansi terkait
- b) Sistem pendataan migrasi penduduk yang belum optimal
- c) Laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi;
- d) Angka beban tanggungan (dependency ratio) relatif tinggi;
- e) Kualitas kependudukan masih rendah, tidak sebanding dengan kuantitas (pertumbuhannya)

11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Salah satu tujuan MDGs (*Millennium Development Goals*) Tahun 2015 yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Upaya untuk mencapai pembangunan yang berwawasan gender. Sedangkan perlindungan anak diarahkan untuk mewujudkan suatu kondisi yang menjamin hak dan tumbuh kembang anak. Indikatornya bisa kita lihat pada keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan.

Permasalahan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Bolaang Mongondow Utara antara lain terdiri:

- a) Masih adanya kekerasan rumah tangga yang menimpah perempuan dan anak
- b) Keterlibatan perempuan dalam lembaga non pemerintahan masih rendah

12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Permasalahan tentang urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Bolaang Mongondow Utara terdiri dari:

- a) Masih adanya pasangan usia subur yang belum mengikuti program KB

- b) Masih kurangnya akses keluarga pra sejahtera terhadap pemberian bantuan usaha

13) Sosial

Selain berhubungan dengan ketersediaan fasilitas peribadatan, urusan sosial berkenaan juga dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan penanganan tertentu, seperti penderita gangguan kejiwaan, anak terantar, pengemis, wanita tuna susila dan lain-lain. Untuk kebutuhan fasilitas peribadatan, jika melihat data yang tersedia maka telah cukup memadai.

Permasalahan urusan sosial di Bolaang Mongondow Utara.

- a) Belum adanya perawatan dan perlakuan khusus untuk penderita gangguan kejiwaan
- b) Masih tingginya angka kemiskinan;
- c) Belum sinkronnya pelaksanaan program antar sektor untuk penanganan masalah sosial;
- d) Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah;
- e) Masih kurangnya sarana dan prasarana sosial.

14) Ketenagakerjaan

Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2011 mengalami peningkatan dari tahun 2010. Angka pengangguran mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Tetapi masih terdapat permasalahan lain pada urusan ketenagakerjaan. Permasalahan tersebut antara lain:

- a) Masih rendahnya kualitas tenaga kerja bila dilihat dari tingkat pendidikan dan keterampilan.
- b) Kurangnya pelatihan tentang peningkatan keterampilan dan kewirausahaan
- c) Rendahnya peluang dan kesempatan kerja disebabkan masih kurangnya variasi lapangan kerja yang tersedia.
- d) Tingginya migrasi tenaga kerja dari daerah lain

15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sebagai salah satu lembaga penggerak perekonomian, koperasi di harapkan mampu mensejahterakan angota-anggotanya. Begitu juga dengan usaha kecil menengah di harapkan mampu mengangkat perekonomian masyarakat.

Permasalahan urusan koperasi dan usaha kecil menengah di Bolaang Mongondow Utara, antara lain terdiri dari:

- a) Berkurangnya jumlah koperasi secara signifikan
- b) Berkurangnya keanggotaan koperasi
- c) Fungsi kelembagaan koperasi belum optimal
- d) Berkurangnya jumlah unit usaha kecil menengah
- e) Belum meratanya bantuan modal terhadap UKM yang ada
- f) Kurangnya partisipasi pemerintah dalam menunjang keberadaan koperasi dan UKM yang ada.
- g) Belum optimalnya pembinaan manajemen usaha bagi koperasi dan pengusaha kecil menengah
- h) Belum optimalnya pengembangan permodalan dalam mendukung usaha koperasi dan pengusaha kecil dan menengah

16) Penanaman Modal

Permasalahan urusan penanaman modal di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara antara lain terdiri dari

- a) Promosi peluang investasi belum dilakukan secara maksimal
- b) Lemahnya koordinasi di tingkat instansi dalam rangka mendorong investasi.
- c) Kurangnya pengembangan jaringan informasi dan promosi investasi
- d) Lemahnya dalam peningkatan pengelolaan sistem penanaman modal di daerah

17) Kebudayaan

Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow utara dahulunya terdiri dari dua kerajaan atau swapraja yaitu Swapraja Kaidipang Besar dan Swapraja Bintauna. Ke dua swapraja inilah

yang kemudian mewariskan budaya dan adat istiadat masyarakat yang masih bertahan sampai sekarang.

Beberapa permasalahan yang terjadi untuk urusan kebudayaan, antara lain adalah:

- a) Terjadinya pergeseran budaya, khususnya dikalangan anak muda.
- b) Belum optimalnya perhatian terhadap benda peninggalan sejarah
- c) Belum terakomodasi secara optimal pendidikan menyangkut kebudayaan lokal.
- d) Tidak diakomodirnya kearifan lokal seperti simbolisasi budaya yang ada dalam pelaksanaan pembangunan.

18) Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dapat dilihat dari adanya organisasi ditingkat kepemudaan. Organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, antara lain terdiri dari Karang Taruna, PPMIBU dan KNPI. Saat ini organisasi kepemudaan yang ada mencoba melibatkan diri dalam mendukung dan mengawal proses pembangunan yang sedang berjalan di Bolaang Mongondow Utara.

Beberapa permasalahan yang ada untuk urusan kepemudaan dan olahraga di Bolaang Mongondow Utara, antara lain adalah:

- a) Terjadinya pergeseran nilai-nilai moral terhadap pola pergaulan pemuda
- b) Belum maksimalnya fungsi dan peran organisasi kepemudaan yang ada
- c) Belum tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang lebih memadai
- d) Belum optimalnya penjangkaran, pelatihan dan pembinaan bibit olahraga

19) Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berkenaan dengan pembinaan terhadap LSM, organisasi masyarakat, OKP serta kegiatan pembinaan politik daerah. Pembinaan dilakukan karena seringkali pengetahuan politik tidak diimbangi dengan wawasan kebangsaan.

Beberapa permasalahan menyangkut urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri antara lain adalah:

- a) Belum optimalnya pembinaan terhadap LSM, Organisasi masyarakat dan OKP yang ada
 - b) Belum meratanya pelayanan antar wilayah terutama di wilayah pedalaman
 - c) Masih kurangnya pembelajaran politik terhadap masyarakat.
 - d) Belum optimalnya kerjasama antara pemerintah daerah, DPRD, Partai politik dan lembaga masyarakat yang ada dalam pelaksanaan pembangunan daerah
- 20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Beberapa permasalahan yang ada di Bolaang Mongondow Utara untuk urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian adalah sebagai berikut:

- a) Lemahnya sistem pengelolaan keuangan daerah
- b) Belum maksimalnya fungsi dan peran perangkat daerah yang ada
- c) Kualitas pelayanan publik oleh aparatur belum sesuai dengan harapan masyarakat.
- d) Masih Kurangnya jumlah PNS yang ada untuk tenaga teknis dan pendidik
- e) Adanya ketidak sesuaian jabatan dengan kompetensi ilmu
- f) Belum optimalnya sistem penerimaan tenaga honorer

21) Ketahanan Pangan

Kebutuhan akan ketersediaan bahan pangan merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin tercukupinya kebutuhan gizi masyarakatnya. Pada tahun 2011 jumlah kalori/energi yang di konsumsi sebesar 2005kka, jumlah tersebut mencapai 100,3 dari total konsumsi energi yang dianjurkan sebesar 2.000kkal.

Permasalahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk urusan ketahanan pangan antara lain:

- a) Tingkat mutu pola konsumsi masyarakat masih kurang beragam, bergizi dan seimbang

- b) Masih adanya daerah yang memiliki resiko kerawanan pangan yang tinggi
- c) Masih adanya kasus gizi buruk

22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada jumlah kelompok binaan LPM, Jumlah LSM, PKK, Posyandu dan program swadaya masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat. Analisis indikator ini belum terlaksanakan karena belum tersedianya data terkait. Adapun permasalahan terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa adalah:

- a) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- b) Masih lemahnya kelembagaan pemerintah desa;
- c) Belum maksimalnya peran kelompok / organisasi pemberdayaan masyarakat seperti LPM;
- d) Alokasi program pembangunan masih dominan padat modal daripada padat karya.
- e) Belum adanya asosiasi kelembagaan desa

23) Statistik

Dokumen statistik merupakan salah satu sumber data dan informasi yang berisikan tentang kondisi daerah sekarang dan tahun-tahun sebelumnya dan di gunakan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan pemerintah kedepan.

Permasalahan urusan statistik antara lain adalah:

- a) Lemahnya tingkat akurasi data statistik
- b) Ketidak harmonisan data statistik dari setiap instansi teknis terkait
- c) Hasil pendataan yang seringkali terlambat sehingga melampaui waktu perencanaan

24) Kearsipan

Kemampuan pengelolaan arsip mutlak diperlukan dalam pemerintahan sebagai bagian dari tertib administrasi. Ketersediaan arsip akan memudahkan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja terhadap masing-masing SKPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Permasalahan urusan kearsipan terdapat antara lain :

- a) Masih lemahnya sistim pengarsipan (masih dominan manual sistem)
- b) Belum terpusatnya pengarsipan dokumen penting daerah

25) Komunikasi dan Informatika

Keberadaan sarana komunikasi dan informatika secara up to date terutama berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai sarana koordinasi internal dan external SKPD di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Keberadaan sarana tersebut juga diperlukan oleh masyarakat untuk meningkatkan akses informasi dan pengetahuan.

Permasalahan untuk urusan komunikasi dan informatika, antara lain adalah:

- a) Belum meratanya kawasan yang terjangkau akses telekomunikasi
- b) Belum tersedianya jaringan telekomunikasi kabel
- c) Masih kurangnya akses terhadap jaringan internet

26) Perpustakaan

Perpustakaan sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Keberadaannya merupakan bagian dari turut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Permasalahan untuk urusan perpustakaan adalah:

- a) Masih terbatasnya buku yang tersedia
- b) Kurangnya peran masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan
- c) Masih minimnya sarana dan prasarana perpustakaan

2. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pilihan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Menurut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Pasa 7 ayat 3, Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah

yang bersangkutan. Urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari:

1) Pertanian

Layanan urusan pilihan untuk sektor pertanian terdiri dari pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2011 sebesar 302.842,76 (juta rupiah) atau sebesar 33,94% dari total PDRB.

Permasalahan urusan pilihan untuk sektor pertanian

- a) Angka produksi pertanian yang masih fluktuatif, khususnya untuk tanaman padi
- b) Penerapan teknologi pertanian yang belum optimal, masih banyak menggunakan metode tradisional
- c) Fungsi kelembagaan belum efektif
- d) Ketergantungan petani terhadap pengusaha/pengumpul tinggi
- e) Sistem jaringan jalan menuju sentra-sentra produksi masih kurang memadai
- f) Belum optimalnya fungsi jaringan irigasi
- g) Terbatasnya jumlah penyuluh
- h) Keterbatasan modal usaha di kalangan petani
- i) Ketersediaan data tentang jumlah produksi dan luas areal produksi masih belum akurat

2) Kehutanan

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kurang lebih seluas 27.062 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Untuk hutan produksi yang ada terdiri dari hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi.

Permasalahan untuk sektor Kehutanan

- a) Masih adanya pembakaran untuk pembukaan untuk kepentingan pembersihan lahan oleh masyarakat;
- b) Perambahan hutan oleh peladang masih sering terjadi;

- c) Program reboisasi belum maksimal (dalam hal pemeliharaan);
 - d) Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan;
 - e) Degradasi kawasan pesisir akibat pengrusakan mangrove
- 3) Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan data dan Informasi dari Dinas pertambangan dan energi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, emas merupakan jenis barang tambang yang memiliki penyebaran terbanyak, yaitu tersebar diempat desa. Saat ini belum terdapat aktifitas eksploitasi dari investor, kecuali beberapa kelompok masyarakat yang mencoba melakukan penambangan secara tradisional dengan perlengkapan seadanya. Kontribusi sektor pertambangan dan galian pada PDRB Bolaang Mongondow Utara sebesar 59.070,86 (juta rupiah) atau sebesar 6,62%

Permasalahan untuk urusan energi dan sumber daya mineral

- a) Ketergantungan penggunaan energi listrik dari daerah luar masih tinggi
- b) Pasokan daya listrik masih terbatas
- c) Belum optimalnya pemanfaatan SDA mineral yang ada
- d) Resistensi masyarakat terhadap kegiatan penambangan masih tinggi

4) Pariwisata

Keindahan dan keunikan alam di beberapa wilayah menjadi daya tarik tersendiri pada sektor pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Di dominasi oleh wisata bahari, wisata alam, wisata sejarah dan budaya menghadirkan potensi dan daya tarik yang memiliki nilai jual tinggi bagi pengembangan dunia pariwisata.

Permasalahan untuk urusan Pariwisata, adalah:

- a) Tidak tersedianya data tentang kunjungan wisatawan
- b) Belum adanya objek wisata yang di kelola secara profesional baik oleh pemerintah daerah maupun swasta

- c) Belum adanya keberlanjutan program perencanaan beberapa objek wisata yang ingin dikembangkan pemerintah daerah.
- d) Rendahnya sistem pengamanan untuk wisatawan

5) Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan dan kelautan juga merupakan sektor andalan kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Potensi sektor perikanan dan kelautan di ditunjang oleh letaknya yang memiliki garis pantai sepanjang 174 Km dan memiliki gugusan terumbu karang yang eksotis.

Permasalahan untuk urusan kelautan dan perikanan, adalah:

- a) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam yang tersedia untuk sektor perikanan budidaya
- b) Keterbatasan modal usaha
- c) Keterbatasan teknologi sehingga masih menggunakan pola tradisional
- d) Kapasitas SDM masih terbatas karena masih kurangnya pemberdayaan masyarakat pesisir
- e) Terbatasnya akses pemasaran terhadap produksi perikanan dan hasil laut
- f) Pemanfaatan daerah-daerah pesisir untuk kegiatan budidaya belum optimal
- g) Keterbatasan tenaga penyuluh perikanan
- h) Lemahnya pengawasan terhadap wilayah perairan laut Bolaang Mongondow Utara

6) Perdagangan

Saat ini belum tersedia pasar induk sebagai salah satu fasilitas perdagangan. Untuk aktifitas perdagangan skala besar dilakukan jadwal mingguan per kecamatan. Untuk kawasan perkotaan dan kecamatan bintauan terdapat dua kali hari pasar dalam seminggu dengan melayani masyarakat di daerah sekitarnya.

Permasalahan untuk urusan perdagangan:

- a) Belum tersedianya pasar induk kabupaten

- b) Data mengenai kegiatan perdagangan masih belum akurat
- c) Belum adanya peran sektor swasta dan asosiasi-asosiasi perdagangan

7) Transmigrasi

Urusan pilihan terkait dengan Transmigrasi berhubungan dengan jumlah UPT atau Unit Permukiman Transmigrasi, Saat ini unit permukiman transmigrasi terdapat di Kecamatan Sangkub. Permasalahan bidang transmigrasi adalah sebagai berikut :

- a) Masih terisolirnya kawasan transmigrasi akibat akses jalan dan jembatan yang dibangun
- b) Rendahnya motivasi masyarakat untuk mengembangkan usaha pada kawasan transmigrasi

8) Industri

Terkait dengan urusan industri, di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum tersedia industri dengan skala besar dan menengah. Saat ini industri yang ada baru berskala kecil dan industri rumah tangga. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 20.596,35 (juta rupiah) atau setara dengan 2,31%.

Permasalahan urusan industri terdiri dari;

- a) Produksi turunan komoditi-komoditi andalan masih terbatas
- b) Belum optimalnya pembinaan terhadap industri-industri kecil.
- c) Belum optimalnya kegiatan promosi terhadap produk-produk industri yang sudah ada

3.2. Analisis Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan dan tantangan yang disebutkan diatas maka selanjutnya dituangkan ke dalam isu-isu strategis untuk memberi arahan dalam perumusan visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2005-2025. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas pemerintahan daerah dan masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar

atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan maka menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan organisasi/institusi dimasa yang akan datang. Suatu isu strategis dapat berlaku umum untuk sebagian besar daerah. Namun, sebagian lainnya, isu strategis hanya berlaku bagi satu daerah tertentu saja karena kekhasan, tantangan, dan peluang yang berbeda tiap daerah.

1. Analisis Isu Bidang Geomorfologis dan Lingkungan Hidup

- 1) Perbedaan kemajuan antar sub-wilayah pegunungan, dataran rendah/ perkotaan dan kawasan pesisir/pantai.

Geomorfologi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang memiliki kelengkapan dimensi wilayah yakni sub-wilayah pegunungan/dataran tinggi, sub-wilayah dataran rendah dan sub-wilayah pesisir/pantai, disatu sisi merupakan modal alamiah karena dengan demikian tersedia sumberdaya alam multidimensi, tetapi disisi lain menyimpan potensi masalah ketika terjadi disparitas kemajuan antar sub-wilayah. Tantangan dalam pembangunan jangka panjang kedepan adalah bagaimana menciptakan keseimbangan perkembangan wilayah khususnya pada aspek kualitas manusia terkait akses pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan keterpenuhan sarana/prasarana wilayah.

Kekuatan yang dapat dimanfaatkan adalah potensi sumberdaya alam spesifik pada masing-masing sub-wilayah khususnya pegunungan dan pesisir terutama yang selama ini belum optimal tergarap seperti potensi pertambangan, wisata alam dan budaya serta kawasan pelabuhan. Kelemahannya adalah keterbatasan kualitas SDM masyarakat pada masing-masing lokalitas serta kapasitas SDM pemerintah dalam merencanakan dan mengimplementasikan program/kegiatan pembangunan secara berbasis kespesifikan sumberdaya lokal.

- 2) Belum optimalnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukan yang tidak hanya berorientasi pertumbuhan tetapi juga menjamin keberlanjutan.

Dalam pembangunan jangka panjang ke depan, krisis tata ruang merupakan ancaman besar bagi pembangunan di Indonesia. Pembangunan Kabupaten Bolaang
RPJP DAERAH BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2005-2025

Mongondow Utara mengalami ancaman serupa, seiring dengan fenomena konversi lahan pertanian ke non pertanian, pembukaan lahan bagi pemukiman akibat pertumbuhan penduduk, perambahan hutan sebagai sumber pendapatan penduduk, serta perluasan investasi pemanfaatan sumberdaya alam. Kecenderungan ini memberi tekanan atas konsistensi pemanfaatan ruang antara ruang untuk kawasan perlindungan dengan ruang untuk kawasan budidaya.

Tantangan ke depan adalah dijalkannya penataan ruang yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang sebagai; 1) arahan bagi lokasi kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat, 2) arahan bagi batasan kemampuan lahan terutama terkait daya dukung lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam, 3) arahan untuk efisiensi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang, serta 4) arahan transformasi *sosio-spasial* pada wilayah tertentu dari ciri perdesaan ke ciri perkotaan.

3) Ancaman kerusakan lingkungan hidup dan tuntutan antisipasi bencana

Seperti halnya di daerah lain, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki wilayah yang rawan terhadap kerusakan lingkungan hidup, dimana yang paling menonjol adalah terjadinya banjir, tanah longsor dan erosi. Sistem geomorfologi yang didominasi wilayah berbukit di beberapa lokasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bisa menimbulkan bencana tanah longsor dan erosi. Disamping rawan bencana tanah longsor wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow juga sangat rawan terhadap bencana *tsunami* karena berada di wilayah patahan, sementara itu abrasi pantai menjadi ancaman ditengah semakin berkurangnya luas/ populasi hutan mangrove dan peningkatan pencemaran akibat aktivitas masyarakat dan perkembangan kota.

Ancaman kedepan adalah dampak perubahan iklim global, dimana peristiwa kekeringan bisa lebih panjang pada musim kemarau dan intensitas curah hujan bisa lebih tinggi dan lama pada musim hujan serta permukaan laut bisa lebih tinggi dan lebih panas. Ini tidak hanya membawa ancaman bagi peristiwa bencana alam, tetapi dalam jangka panjang dan skala luas kerusakan lingkungan hidup dapat berkontribusi bagi krisis air, krisis pangan dan krisis kesehatan.

Tantangan yang akan dihadapi adalah bagaimana meminimalkan dampak kerusakan lingkungan dari setiap kegiatan pembangunan, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengkonservasi dan merehabilitasi lingkungan, mencegah dan

mengendalikan dampak kerusakan lingkungan dari investasi swasta, serta mempromosikan dan menyadarkan masyarakat luas tentang urgensi pertanian organik ramah lingkungan tidak hanya karena alasan lingkungan hidup tetapi juga karena alasan kesehatan.

2. Analisis Isu Strategis Bidang Perekonomian

- 1) Masih rendahnya PDRB per kapita dibandingkan rata-rata Provinsi dan Kabupaten sekitar

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan daerah suatu wilayah dengan jumlah penduduk negara tersebut. Besarnya pendapatan regional per kapita dalam hal ini PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Pendapatan per kapita di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan masih lebih rendah dari rata-rata PDRB Provinsi Sulawesi Utara maupun Kabupaten/Kota sekitarnya. PDRB per kapita Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2007 hanya sebesar Rp. 7.320.00 naik menjadi Rp. 12.590.000 pada tahun 2011. PDRB per kapita rata-rata Sulawesi Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 sebesar Rp. 18.070.000, dengan demikian capaian PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih relatif tertinggal.

Walaupun pendapatan per kapita Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan kecenderungan peningkatan disebabkan meningkatnya PDRB atas dasar harga berlaku maupun konstan, nilainya masih cukup rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sulawesi Utara. Namun demikian laju pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita akan mengalami hambatan karena laju inflasi yang cenderung meningkat, dan ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat.

Dengan demikian tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pendapatan per kapita dengan mengendalikan laju inflasi. Kekuatan yang dimiliki Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam meningkatkan pendapatan perkapita adalah dinamika aktivitas perekonomian. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya kontribusi beberapa sektor baik sektor manufaktur maupun sektor jasa. Selain itu, juga berkaitan dengan semakin

baiknya infrastruktur yang tersedia, mekanisme perizinan yang semakin mudah yang mendorong perkembangan sektor usaha.

- 2) Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2010 mencapai 7,6 persen dan tahun 2011 mencapai 8,17. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi rata-rata Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2010 mencapai 7,16 persen, Sedangkan tahun 2011 8,30 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditopang oleh sektor bangunan, keuangan, persewaan dan jasa-jasa, sementara kontribusi dari sektor pertanian semakin menurun. Dengan demikian tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan dukungan sektor yang secara signifikan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan tersebut, serta mengakselerasi transformasi struktural perekonomian dari dominasi sektor pertanian ke dominasi sektor nonpertanian.

Kekuatan yang dimiliki dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah adanya peraturan daerah tentang perlindungan investasi, mulai terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan dan pertumbuhan sektor-sektor non agribisnis serta ketersediaan infrastruktur ekonomi. Peluang yang dimiliki dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi adalah bagaimana menarik investor sehingga menaikkan tingkat partisipasi angkatan kerja serta mengurangi jumlah penduduk miskin. Kelemahan yang dihadapi adalah kualitas sumberdaya manusia yang masih belum memadai untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi.

- 3) Adanya penurunan produksi komoditas pertanian

Perkembangan produksi pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura menunjukkan peningkatan. Untuk Komoditi Padi Sawah, pada tahun 2010 sempat mengalami pertambahan Luas area produksi menjadi 10.469 Ha dan di ikuti oleh meningkatnya produksi beras menjadi 63.812,80 Ton, tatapi pada tahun 2011 mengalami penurunan luas areal produksi menjadi 8.248 luas areal produksi dan 56.977,50 Ton produksi beras.

Komoditi Jagung selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan luas areal produksi dan diikuti juga dengan penurunan produktifitas jagung. Pada tahun 2007 Luas areal produksi 8.595 Ha dan menjadi 1.845 Ha pada tahun 2011, Sedangkan tingkat produksi menurun menjadi 3.920 Ton pada tahun 2011 yang pada tahun 2007 sempat mengalami tingkat produksi tertinggi dalam waktu 5 tahun terakhir yaitu 27.504 Ton.

Tahun 2009, luas area produksi untuk komoditi kedelai, mencapai 367 Ha dengan jumlah produksi 370 Ton, pada tahun 2010 mengalami penurunan yang signifikan yaitu, untuk areal produksi 83 Ha dan jumlah produksi turun mencapai 97, 40 Ton, tetapi pada tahun 2011 mengalami peningkatan kembali menjadi 138 Ha untuk luas areal produksi dan 151, 80 Ton untuk jumlah produksi komoditi kedelai.

Berdasarkan hasil analisis, luas lahan untuk penggunaan pertanian mencapai 54052 ha tetapi yang baru dimanfaatkan baru mencapai 10.314 ha atau sekitar 19,08%. Luas lahan pertanian terbesar adalah luas areal untuk tanaman padi yang mencapai 79,96% dari total penggunaan lahan pertanian. Ini berarti pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum optimal.

Produksi komoditas pertanian dapat ditingkatkan apabila didukung oleh penyediaan infrastruktur berupa irigasi dan sarana produksi yang terjangkau. Namun mengingat alih fungsi lahan cenderung meningkat, perluasan areal tanam semakin sulit. Selain itu, secara jangka panjang kondisi ekologis perlu dipertimbangkan demi keberlanjutan, sehingga peningkatan produksi yang idealnya didorong tidak mengandalkan sepenuhnya teknologi an-organik tetapi diimbangi dengan teknologi organik.

4) Masih tingginya tingkat kemiskinan

Angka kemiskinan Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2011 sebesar 9,82 % atau masih di atas angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara yaitu berkisar 8,46 % tetapi masih di bawah angka kemiskinan Nasional yaitu 12,49 %. Pada tahun 2010 angka kemiskinan Bolaang Mongondow Utara mengalami peningkatan yaitu sebesar 10,23 % dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2009 sebesar 9,93 %.

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mereduksi kemiskinan dengan berdasarkan pada pemahaman kebutuhan masyarakat miskin, serta menjalankan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar secara bertahap. Masalah yang dihadapi kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan, keterbatasan pemahaman dan komitmen dalam mengembangkan potensi pada wilayah berpenduduk miskin, serta berbagai masalah dalam aspek kultural dan struktural masyarakat miskin itu sendiri.

3. Analisis Isu Strategis Bidang Sosial Budaya

1) Tekanan populasi yang akan semakin besar akibat pertumbuhan penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditiga tahun terakhir secara umum mengalami penambahan. Pada tahun 2011 tercatat jumlah penduduk sebanyak 73.621 jiwa yang sebelumnya pada tahun 2009 berjumlah 68.201 jiwa dan pada tahun 2010 tercatat sebanyak 71150 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tiga tahun terakhir berdasarkan hasil analisis dengan data yang tersedia, sebesar 3,89 %, sehingga diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2025 bisa mencapai 125.741 jiwa. Dengan kecenderungan pertumbuhan itu, tekanan populasi atas ketersediaan ruang dan sumberdaya akan semakin besar.

Oleh karena itu, tantangan pembangunan secara jangka panjang adalah bagaimana mempertahankan pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan memperhatikan keseimbangan proporsi penduduk usia produktif dan non-produktif serta distribusi penduduk antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Tantangan lainnya adalah peningkatan kualitas penduduk khususnya perempuan sehingga dapat menjadi potensi pembangunan yang produktif serta perhatian pada rumah tangga miskin agar pertumbuhan penduduk pada golongan ini tidak menjadi beban pembangunan.

- 2) Rendahnya kualitas manusia dilihat dari indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli

Rendahnya kualitas manusia ditandai oleh pencapaian indeks pembangunan manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Utara jika dibandingkan dengan IPM di Sulawesi Utara maupun rata-rata nasional. IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sekalipun mengalami peningkatan namun laju pertumbuhannya cenderung statis dan dari sisi pemeringkatan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2007 nilai Indeks Pembangunan Manusia adalah 71 dan terus meningkat menjadi 73,06 pada tahun 2011. IPM Bolaang Mongondow Utara masih di bawah IPM Provinsi Sulawesi Utara yang pada tahun 2011 bernilai 76, 51.

Komitmen dan perhatian yang serius dari pemerintah dan pemerintah provinsi melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan sumberdaya manusia khususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan perlu mendapat dukungan pemerintah kabupaten sehingga memungkinkan terjadinya sinergitas sumberdaya pembangunan secara jangka panjang. Pembangunan kesehatan dan pendidikan akan diperhadapkan pada tantangan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan guna pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta penyediaan tenaga pendidik, kependidikan dan kesehatan yang memiliki profesionalisme tinggi.

- 3) Besarnya aspirasi pengamalan nilai dan norma agama dalam berbagai dimensi kehidupan pada tatanan sosial.

Menguatnya aspirasi dan tuntutan pengamalan nilai dan norma agama khususnya agama Islam dalam berbagai dimensi kehidupan ditandai dengan terpromkosikannya citra Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai salah satu kota wilayah yang taat menjalankan agama, semangat keberagamaan masyarakat yang masih cenderung tinggi, dan adanya peran serta yang tinggi dari lembaga-lembaga keagamaan dalam pembinaan umat serta terciptanya toleransi antar umat beragama.

Aspirasi pengamalan nilai agama ini telah direspons dengan perkembangan sarana ibadah yang tahun 20010 mencapai 91 buah mesjid dan 5 buah mushalla, meningkat menjadi 95 buah mesjid dan 7 buah mushalla pada tahun 2011. Tantangan kedepan adalah arus modernisasi dan globalisasi yang cenderung bertentangan dengan nilai-nilai agama, semakin menguatnya paham kapitalisme, pluralisme dan liberalisme dalam kehidupan

masyarakat sehingga cenderung akan menggeser dan meminggirkan nilai-nilai agama. Pembangunan bidang keagamaan dimasa datang memiliki peluang untuk semakin memerankan agama sebagai sumber etos bagi aktivitas pembangunan, mengingat perannya dalam penciptaan SDM berkualitas yang mampu mentransformasikan potensi dan sumberdaya pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

- 4) Berkurangnya fungsi nilai/norma sosial-budaya dan kearifan lokal dalam mengaktualisasikan identitas tatanan.

Berbagai tradisi sosial-budaya yang selama ini berfungsi dalam kehidupan masyarakat telah berkurang aktualisasinya. Begitu pula berbagai prinsip kehidupan yang bersumber dari hikmah kebijaksanaan para tetua dan leluhur dan menjadi substansi kearifan lokal telah berkurang vitalisasinya sebagai pedoman kehidupan. Pada hal, unsur nilai dan norma sosial budaya demikian merupakan basis identitas yang menjadi simbol dari eksistensi tatanan sosial masyarakat Bolaang Mongondow Utara.

Tantangan kedepan adalah semakin besarnya arus pengetahuan dan nilai dari luar yang memasuki tatanan sosial melalui media informasi khususnya siaran televisi, internet dan telekomunikasi. Penetrasi nilai dan budaya tersebut dapat mengancam kespesifikan karakter dan identitas tatanan sosial sehingga diperlukan upaya revitalisasi dan reaktualisasi nilai, norma, seni dan kearifan lokal-asli dalam merespons secara adaptif-kreatif penetrasi nilai, norma dan pengetahuan yang dibawa oleh media informasi.

- 5) Besarnya tuntutan atas kehidupan berdemokrasi dan berpolitik serta kepatuhan terhadap hukum

Secara khusus, kehidupan berdemokrasi dan berpolitik yang semakin kuat ditandai oleh sejumlah partai politik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan tetapi partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif relatif masih belum maksimal.

Tantangan dalam pembangunan bidang politik dan demokratisasi dimasa datang adalah penegakan etika dan moralitas sebagai nilai dasar berdemokrasi dan berpolitik, peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam berdemokrasi khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dan menjaga serta memastikan penyelenggaraan

pemilihan yang taat asas. Kelemahan dalam kehidupan berdemokrasi dan berpolitik dewasa ini antara lain masih terjadinya inkonsistensi aturan, penegakan hukum yang belum konsisten dan reformasi hukum dan birokrasi yang belum optimal.

- 6) Besarnya tuntutan untuk menjaga dan mempertahankan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terletak di jalur lalu lintas yang ramai baik darat maupun laut. Untuk jalur darat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terletak di jalur trans Sulawesi yang merupakan wilayah pengembangan nasional. Sedangkan wilayah perairan merupakan jalur laut bebas baik domestik maupun internasional..

Salah satu tantangan kedepan adalah kecenderungan munculnya bentuk kerawanan/kejahatan baru yang dipicu oleh terbukanya wilayah dalam rangka pembangunan ekonomi yang memudahkan mobilitas barang dan manusia seperti kejahatan teknologi elektronik dan kejahatan psikotropika. Dengan demikian, diperlukan langkahantisipatif dan kordinatif pada bidang keamanan dan ketertiban untuk mencegah dan menekan ekses pembangunan ekonomi terhadap munculnya tindak kriminal.

4. Analisis Isu Strategis Bidang Sarana dan Prasarana

- 1) Besarnya potensi pemanfaatan sarana/prasarana sistem transportasi darat dalam mendorong kemajuan sosial-ekonomi daerah.

Eksistensi jalur darat trans sulawesi memiliki potensi sangat strategis dalam mendorong kemajuan sosial-ekonomi daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Letak adminstrasi yang di lintasi oleh jalur trans sulawesi memberi keuntungan tersendiri buat daerah ini, lalu lalang arus angkutan umum baik barang maupun penumpang selayaknya dapat memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun belum tersedianya berbagai sarana dan prasarana yang menunjang aktifitas perhubungan menjadikan kendala terhadap perkembangan sektor perhubungan di daerah ini. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah, Terminal angkutan darat dan Pelabuhan penyebrangan.

Kekuatan untuk memanifestasikan potensi transportasi darat adalah tersedianya areal daratan yang luas dan masih kosong serta terletak tidak jauh dari jalur perlintasan Gorontalo RPJP DAERAH BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2005-2025

- Manado sehingga mudah ditata untuk pengembangan selanjutnya sebagai kawasan ekonomi khusus. Kekuatan jalur transportasi darat adalah sangat dekat dengan wilayah pantai sehingga kedepannya pengembangan pelabuhan laut bisa terintegrasi dengan sistem transportasi darat.

- 2) Diperlukannya pengembangan moda transportasi dalam merespons pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah.

Dengan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah seperti saat ini, sarana dan prasarana transportasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah relatif memadai dalam melayani pergerakan manusia dan barang. Dalam perubahan menuju tahun 2025, kondisi transportasi akan mengalami peningkatan baik dari segi jaringan pelayanan maupun jaringan prasarana. Hal ini sejalan dengan perkembangan sektor yang ditunjang oleh transportasi. Keberadaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai kabupaten perlintasan yang terletak pada jalur lintas Sulawesi antara Makassar, Gorontalo dan Manado, juga cukup berpengaruh terhadap perkembangan jaringan prasarana khususnya ruas jalan Gorontalo-Bolaang Mongondow Utara-Manado, dengan demikian perkembangan volume lalu lintas pada ruas jalan ini membutuhkan antisipasi, terutama dalam kesiapan lahan dan pembatasan izin membangun pada jarak tertentu dari jalan.

Rencana pengembangan industri strategis dan kawasan wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara maupun kabupaten tetangga cukup memberikan andil dalam peningkatan pergerakan di masa depan. Perkembangan produksi komoditas pertanian, eksploitasi pertambangan dan terbangunnya beberapa pusat perdagangan di masa depan membutuhkan antisipasi moda transportasi yang tepat dalam pelayanannya begitu pula jaringan prasarana yang mendukungnya. Selain itu munculnya moda transportasi alternatif dalam melayani masyarakat ke depan akan tetap menjadi perhatian baik yang ada saat ini, juga bilamana muncul di pasaran moda transportasi hemat bahan bakar yang juga dapat dimanfaatkan sebagai angkutan pedesaan.

- 3) Diperlukannya peningkatan kapasitas sarana-prasarana pengairan dan sumberdaya air dalam merespons peningkatan kebutuhan air irigasi dan air bersih

Sarana dan prasarana irigasi serta sumberdaya air telah berkembang dalam dekade terakhir, namun dalam dua dekade kedepan diperlukan antisipasi berhubung meningkatnya

kebutuhan air untuk usahatani dan air bersih. Saat ini untuk menunjang peningkatan produktivitas terdapat 18 daerah irigasi yang tersebar di empat kecamatan dengan panjang saluran irigasi mencapai 34.967,22 meter dan jumlah pintu air mencapai 61 buah. Disamping saluran irigasi, sarana dan pra sarana pengairan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang memegang peranan penting adalah bendungan sangkub, bendungan pontak dan bendungan irigasi paku.

Tantangan yang perlu dijawab untuk merespons kekurangan sumber air pada masa datang adalah penajaman koordinasi antar instansi terkait dalam menangani kelestarian hutan di hulu sungai, pembangunan waduk/bendung tambahan untuk mengairi sawah tadah hujan, penambahan irigasi desa untuk mengurangi lahan tadah hujan, peningkatan konstruksi untuk bendung semi teknis menjadi bendung teknis serta konstruksi saluran tanah ke saluran permanen, dan pencegahan alih fungsi lahan.

5. Analisis Isu Strategis Bidang Pemerintahan Umum

- 1) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan.

Struktur kelembagaan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah ditata untuk sedapat mungkin menjalankan berbagai fungsi yang dibutuhkan dalam kondisi struktur dan kebutuhan personil yang ramping. Tantangan kedepan adalah berfungsinya kelembagaan secara efektif dan efisien sesuai tupoksi masing-masing SKPD serta semakin meningkatnya tuntutan praktek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dibalik penyelenggaraan fungsi-fungsi tersebut.

Adanya legislasi daerah yang melahirkan produk hukum daerah, baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati, yang memberikan dasar hukum/legitimasi pembentukan organisasi perangkat daerah, merupakan kekuatan bagi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam penataan kelembagaannya. Kelemahan terletak pada belum optimalnya perubahan pola pikir dan kultur birokrasi, serta belum optimalnya koordinasi inter dan antar SKPD sehingga masih ditemui tumpang tindih

dan hambatan dalam implementasi kebijakan. Peluang kedepan yang dapat dimanfaatkan adalah adanya regulasi nasional dan pengembangan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tantangan terletak pada semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas yang belum diimbangi oleh kemampuan SDM pemerintah daerah dalam penguasaan teknologi informasi di era globalisasi.

- 2) Belum optimalnya perwujudan profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Meskipun secara kuantitatif sumber daya aparatur pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah memadai, namun belum semua pegawai memiliki kemampuan yang cukup dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi-fungsi manajemen birokrasi. Tugas pokok dan fungsi dimaksud mulai dari penyiapan data dan informasi pemerintahan dan pembangunan, perumusan rencana program/kegiatan, implementasi program/kegiatan, hingga pengawasan dan evaluasi. Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menangani isu ini adalah sistem pembinaan karier pegawai yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan kelemahan yang dihadapi adalah kurang siapnya sumber daya aparatur dalam menghadapi globalisasi dan pemanfaatan teknologi dan informasi.

- 3) Pelayanan umum kepada masyarakat belum didukung dengan baik oleh operasionalisasi sistem, teknologi dan personil dengan kualifikasi yang memadai.

Regulasi perizinan terkait pelayanan publik yang telah dibentuk di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, begitupun dengan adanya Peraturan Daerah perlindungan investasi yang memberikan kemudahan investasi, merupakan kekuatan untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan umum kepada masyarakat. Kelemahan terletak pada belum diterapkannya fungsi-fungsi manajemen pada semua jenis pelayanan seperti belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur Pelayanan, kurangnya sumber daya dan penganggaran. Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan umum adalah terjadinya pergeseran paradigma pelayanan dari *Old Public Adminstrasion* (OPA) menjadi *New Public Management* (NPM) dan terakhir dikembangkan paradigma *New RPJP DAERAH BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2005-2025*

Public Service (NPS), yang selanjutnya tertuang dalam Undang-Undang Pelayanan Publik serta Peraturan-Peraturan Menteri tentang Standar Pelayanan Minimal. Adapun tantangan yang perlu dijawab adalah semakin meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat dalam pembangunan yang menuntut kebijakan pemerintah daerah lebih transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

- 4) Pendelegasian kewenangan ke Kecamatan atau pelimpahan wewenang kepada camat belum dioptimalkan sehingga dapat menghambat aksesibilitas pelayanan

Dengan karakteristik wilayah kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang bervariasi antara wilayah pegunungan, dataran rendah dan pesisir/pantai, menjadikan kebutuhan pelayanan atas masyarakat memerlukan respons yang cepat dan tepat sesuai karakteristik kebutuhannya. Untuk itu, menjadi tantangan bagi pemerintah kecamatan untuk bisa lebih berfungsi dalam merespons berbagai kebutuhan layanan masyarakat tersebut, melalui kewenangan yang didelegasikan kepada kecamatan, khususnya untuk urusan sederhana dan memerlukan penyelesaian cepat.

Komitmen Pimpinan Daerah untuk melimpahkan wewenang kepada camat dalam mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat terutama untuk pelayanan yang bersifat sederhana, seketika, mudah dan murah serta berdaya lingkup setempat, merupakan kekuatan untuk mengoptimalkan pelimpahan kewenangan tersebut. Adanya komitmen tersebut dapat dilihat dengan terakomodirnya pelimpahan kewenangan terhadap kecamatan sebagaimana pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa "Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah". Hal ini diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang menyatakan bahwa "Selain melaksanakan tugas umum pemerintahan, camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, kordinasi, pembinaan dan kewenangan lain yang dilimpahkan". Ancamannya adalah berubah-ubahnya peraturan perundang-undangan terutama yang mengatur struktur organisasi perangkat daerah termasuk kecamatan yang

RPJP DAERAH BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2005-2025

otomatis akan mempengaruhi pola organisasi kecamatan dan cenderung mengabaikan tipologi atau kategorisasi kecamatan.

5) Penguatan otonomi desa dan keberdayaan tatanan masyarakat belum optimal.

Desa adalah unit sosiogeografis dimana keberdayaan masyarakat dalam memanifestasikan prakarsa dan keswadayaannya dapat terwujud. Untuk itu, penguatan atas otonomi desa merupakan keniscayaan demi tercapainya otonomi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan spesifik-lokalitasnya. Tantangan kedepan adalah bagaimana menguatkan kelembagaan dan SDM desa serta memanfaatkan potensi manusia dan modal sosial desa agar desa menjelma menjadi tatanan yang berkualitas dan mandiri.

Kekuatan untuk menangani isu ini adalah adanya peraturan hukum positif yang mengatur mengenai desa antara lain tentang Pembentukan BPD, tentang Tatacara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perda tentang Alokasi Dana Desa, Tatacara Pembentukan dan Penggabungan Desa serta peraturan perundang-undangan Daerah lainnya yang merupakan bentuk pembinaan pemerintah Daerah menuju penguatan otonomi desa. Kelemahannya adalah belum memadainya kemampuan SDM/perangkat desa dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintahan di atasnya. Selain itu, inovasi pemerintahan desa dalam menggali sumber-sumber pendapatan desa belum memadai, hal ini terlihat pada masih kurangnya peraturan desa yang terbentuk. Peluang yang dapat dimanfaatkan adalah adanya kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan administrasi pemerintahan desa yang tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk kebijakan mengenai penetapan Sekretaris Desa sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ancamannya adalah semakin pesatnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi tidak diimbangi dengan kesiapan kapasitas sistem (kebijakan), sumber daya manusia, dan kelembagaan di tingkat desa.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Perumusan Visi

Visi mengandung harapan yang ingin di capai berdasarkan potensi, permasalahan pembangunan dan Isu-isu strategis. Merumuskan visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Berdasarkan hasil penyusunan rancangan awal RPJPD Bolaang Mongondow Utara, terdapat 3 opsi visi daerah yang di tawarkan. Ketiga opsi visi RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2005-2025 dapat dipilah sebagai berikut

Tabel IV.59. Perumusan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi
I	Maju	Bolaang Mongondow Utara yang Maju, Berbudaya, Religi dan Sejahtera
	Berbudaya	
	Religi	
	Sejahtera	
II	Demokratis	Bolaang Mongondow Utara yang Demokratis, Berkeadilan, Berdaya Saing dan Sejahtera
	Berkeadilan	
	Berdaya Saing	
	Sejahtera	
III	Mandiri	Bolaang Mongondow Utara yang Mandiri, Demokratis, Berkeadilan dan Sejahtera
	Demokratis	
	Berkeadilan	
	Sejahtera	

Dengan mempertimbangkan masukan dari seluruh *stakeholder* maka semua pihak bersepakat untuk menyederhanakan visi tersebut dalam sebuah kalimat singkat. Visi tersebut adalah:

"Mewujudkan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang Maju, Berbudaya, Religius, Demokratis, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkeadilan"

Pilihan visi tersebut diatas bertumpu pada situasi dan kondisi Bolaang Mongondow Utara dengan melihat potensi, permasalahan dan isu strategis serta harapan dan impian

pemerintah di masa yang akan datang. Penentuan visi juga telah didasarkan pada rumusan awal penyusunan RPJP Kabupaten Bolaang Mongondow

Perumusan visi yang didasarkan opsi visi rancangan awal RPJPD, memperlihatkan bahwa pembangunan jangka panjang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2005-2025 hendak mewujudkan sebuah kondisi masa depan atau visi yang perwujudannya menjadi harapan bagi seluruh pihak terkait daerah. Rumusan visi tersebut, selain memperhatikan visi RPJP Nasional dan visi RPJPD Provinsi Sulawesi Utara, juga mengacu pada kondisi nyata dan isu strategis Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta aspirasi berbagai unsur dari pihak masyarakat, pemerintah maupun pelaku usaha Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Adapun penjabaran visi dari Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2005-2025 adalah

Tabel IV.60. Penyusunan Penjelasan Visi

Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Maju	Artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi oleh spirit untuk terus meningkatkan kemampuan daerah yang lebih baik di masa yang akan datang yang di dukung oleh kualitas sumber daya manusia yang, pengelolaan sumber daya alam dan sistem tata pemerintahan yang baik. Beberapa ukuran kemajuan, dapat dilihat pada peningkatan kualitas diri sumber daya manusianya, baik dari pendidikan maupun kesehatan, peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi; Pembangunan sarana dan prasarana daerah yang berkualitas dan merata hingga ke daerah pedalaman/terpencil; Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi

	kepentingan pembangunan; Meningkatnya sistem tata kelolah pemerintahan yang baik
Berbudaya	Berbudaya dapat diartikan sebagai nilai dan norma yang berlaku di masyarakat yang menunjang perkembangan pembangunan daerah Ukuran berbudaya adalah dengan melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai warisan budaya yang menjunjung tinggi akhlak dan moral serta peninggalan-peninggalan warisan sejarah sebagai khasana kekayaan budaya bangsa . Budaya diharapkan mampu melakukan filterisasi terhadap budaya asing yang memberi dampak negatif terhadap proses pembangunan daerah
Religius	Dapat diartikan sebagai karakter masyarakat yang menjunjung tinggi dan taat terhadap nilai-nilai agama dan kepercayaan masing-masing serta menjamin kebebasan beribadah dan saing menghargai perbedaan dalam mendukung pembangunan daerah
Sejahtera	Menunjukkan kemakmuran daerah yang terpenuhi kebutuhan ekonomi maupun sosial masyarakatnya. Ukuran pencapaiannya dapat dilihat dengan: Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, menurunnya tingkat kemiskinan, menekan angka pengangguran; Hadirnya sistem perekonomian yang handal yang menjamin

	terciptanya iklim usaha yang lebih baik; Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang di tandai dengan terpenuhinya hak sosial masyarakat terhadap akses pada peayanan dasar, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial.
Demokratis	Demokratisasi diharapkan dapat menciptakan iklim politik yang elegan dan sehat, pendidikan poitik yang baik, terjaminnya hak asasi manusia, perlakuan yang sama di depan hukum, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, semakin membaiknya niai-nilai toleransi, kerja sama dan sistem mufakat dalam pengambilan keputusan bersama. Secara umum kondisi demokrasi yang di harapkan adalah; Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik baik langsung maupun tidak; Pengakuan, penghargaan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia; persamaan hak bagi seluruh masyarakat dalam segala bidang; lembaga peradilan yang independen sebagai alat penegakan hukum; kebebasan pers dalam menyampaikan informasi yang benar dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah dan pengakuan terhadap keberagaman, suku, agama, golongan dan sebagainya.
Berkeadilan	Artinya bahwa pemerintah daerah dan masyarakatnya menjunjung tinggi hak dan kewajibanya dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Keadilan yang dimaksud tercermin pada semua aspek kehidupan seperti pemberian kesempatan yang sama bagi

	masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan pemenuhan hak-hak politiknya serta perlakuan di hadapan hukum.
Berdaya Saing	Adalah kondisi di mana daerah mampu berdiri sejajar atau lebih dengan daerah-daerah lain dalam proses pembangunan dengan memanfaatkan potensi dan kekuatan yang ada serta meminimalisir atau menghilangkan kelemahan atau tantangan yang ada. Berdaya saing dapat diukur melalui kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.

4.2. Perumusan Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan (*the chosen track*) bagi pemerintahan daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi *stakeholder* pembangunan secara keseluruhan.

Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Perumusan misi adalah suatu upaya untuk menyusun peta perjalanan yang memungkinkan pemerintahan daerah memiliki dasar yang jelas dalam mengembangkan program-program prioritas.

Tabel IV.61. Perumusan Misi

POKOK- POKOK MISI	STAKEHOLDER PEMBANGUNAN		
	Masyarakat	Pemerintah Daerah	Pelaku Ekonomi
Maju	Berperan meningkatkan kualitas diri dari segi pendidikan baik formal maupun non formal, kesehatan dan turut berpartisipasi dalam pembangunan	Menumbuhkan keunggulan kompetitif daerah, memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam meningkatkan sumber daya dan kualitas diri, menghadirkan pembangunan yang berkualitas dan merata	Membantu dan bekerjasama dengan masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM dan berperan aktif dalam pembangunan disega bidang
Berbudaya	Berperan dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta menjadikannya sebagai falsafah hidup	Memberikan perlindungan terhadap warisan budaya dan sejarah.	Menghargai dan turut melestarikan nilai-nilai budaya yang ada
Religi	Menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing dengan taat dan menghargai perbedaan	Menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif bagi masyarakatnya dalam menjalankan agama dan kepercayaan	
Sejahtera	Berani mengambil peluang dan tantangan usaha, terus meningkatkan kemampuan perekonomian pribadi, keluarga dan lingkungan sekitar	Memberikan kemudahan akses terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan menjamin kesejahteraan masyarakat	Membangun hubungan kemitraan yang baik dengan pemerintah dan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat
Demokratis	Turut serta berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan hak	Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap masyarakat dalam keterlibatan mereka dalam pembangunan,	

	politik dan tetap menjaga stabilitas keamanan daerah, serta saling menghargai perbedaan	memberikan pendidikan politik yang baik	
Berkeadilan	Saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing tanpa memandang perbedaan	Memberikan dan menjamin rasa keadilan masyarakatnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban mereka	Menghargai hak dan kewajiban para pekerja
Berdaya Saing	Memanfaatkan semua potensi diri dalam peningkatan kualitas baik dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, hubungan sosial dan lingkungan sekitar	Meningkatkan kualitas daerah dari segi pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan lingkungan serta terus membuka diri terhadap hubungan kerjasama di skala regional maupun internasional	Berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas

Misi I : Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas;

Misi ini mengandung upaya-upaya terkait peningkatan indeks pendidikan, peningkatan indeks kesehatan dan peningkatan indeks daya beli masyarakat, dimana pencapaian berbagai aspek ini merupakan indikasi bagi luasnya pilihan-pilihan warga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam kehidupannya. Peningkatan SDM diindikasikan dengan meningkatnya mutu pendidikan masyarakat; tersedianya sumberdaya pendidikan yang handal; meningkatnya proporsi masyarakat yang berpendidikan tinggi; meningkatnya kualitas tenaga kerja yang produktif; meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan meningkatnya peran pemuda dan perempuan di seluruh bidang pembangunan

Misi II : Mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik; adalah dengan lebih memantapkan prinsip-prinsip tata kelolah pemerintahan yang baik dan bersih;

membangun akuntabilitas pemerintahan yang bertanggung jawab; kemitraan yang serasi antara lembaga eksekutif dan legislatif; sistem pelayanan yang efektif, efisien dan terpadu untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik sesuai dengan yang diharapkan

Misi III : Mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan merata; adalah dengan meningkatnya jumlah pembangunan infrastruktur yang berkualitas serta terencana dalam menunjang laju pertumbuhan pembangunan daerah; pemerataan pembangunan hingga ke daerah perbatasan dan pelosok; dan menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana dasar.

Misi IV : Mewujudkan budaya yang berperadaban; menjadikan warisan nilai-nilai budaya, agama dan kepercayaan sebagai pilar pembangunan sehingga terciptanya perilaku masyarakat yang berbudaya luhur; berkembangnya karakter masyarakat yang mandiri, berbudi luhur, taat terhadap agama dan kepercayaan masing-masing, toleransi, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan bergotong royong; meningkatkan budaya tertib hukum; dan terpeliharanya situs-situs peninggalan sejarah,

Misi V : Mewujudkan Struktur perekonomian yang handal dan berdaya saing; dengan melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan dengan memanfaatkan potensi-potensi ekonomi yang ada terutama potensi sumber daya alam sehingga terciptanya peningkatan ekonomi masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah;

Misi VI : Meningkatkan fungsi sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup; memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia se-arif dan se-bijaksana mungkin untuk mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan tanpa merusak atau mengganggu kelestariannya.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk Masing-Masing Misi

Keadaan ideal yang ingin diwujudkan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai visi pembangunan 2005-2025 adalah

"Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara yang Maju, Berbudaya, Religius, Demokratis, Berdaya Saing, Sejahtera dan berkeadilan"

Untuk mewujudkan pencapaian Visi Kabupaten tersebut diatas, maka diperlukan nilai-nilai dasar (*basic value*) yang harus dimiliki oleh setiap pelaku pembangunan dan berpegang teguh pada nilai – nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh seluruh elemen masyarakat . Nilai – nilai kearifan lokal yang dimaksud adalah yaitu

" Mopopiana, Mototaviana, Agu Mononantobana" yang artinya Saling Berbaikan ,Saling Menyayangi dan Saling Mengingatkan.

Misi pembangunan untuk mewujudkan visi tersebut adalah: (1) Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas; (2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; (3) Mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan merata; (4) Mewujudkan budaya yang berperadaban; (5) Mewujudkan struktur perekonomian yang handal dan berdaya saing; (6) Meningkatkan fungsi sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup;

Agar misi pembangunan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan kebijakan umum sebagai payung bagi arah kebijakan pembangunan secara sektoral, sub-wilayah, dan periodisasi lima tahunan pada RPJM Daerah selama periode 2005-2025. Adapun substansi kebijakan umum RPJP Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2005-2025 adalah:

1) Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas

Peningkatan kualitas manusia merupakan muara dari pencapaian seluruh upaya pembangunan. Kualitas manusia menjadi prioritas utama karena terkait langsung dengan pelaku sekaligus penerima manfaat pembangunan. Tingginya kualitas manusia menunjukkan kinerja yang tinggi dari manfaat dan dampak pembangunan, tingginya kualitas manusia juga menunjukkan jaminan bagi keberlanjutan pencapaian pembangunan karena akan dikelola oleh pelaku pembangunan yang berkualitas. Tujuan dari kebijakan umum ini adalah tercapainya IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada posisi sejajar dengan kabupaten dan kota yang maju di Sulawesi Utara. Indikator pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2025 adalah: (1) angka melek huruf mencapai diatas 99 persen; (2) rata-rata lama sekolah mencapai sekitar 12 tahun; (3) rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah, rasio guru dan murid berada pada posisi sejajar dengan kabupaten dan kota yang maju di Sulawesi Utara; (4) angka harapan hidup diatas 72 tahun dan atau mendekati rata-rata Sulawesi Utara yang mencapai 72,01 tahun; (5) angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, dan tingkat pertumbuhan penduduk terus mengalami penurunan dan berada dibawah/mendekati rata-rata Sulawesi Utara; (6) rasio posyandu per satuan balita, rasio puskesmas/pustu per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk berada pada posisi sejajar dengan kabupaten dan kota yang maju di Sulawesi Utara; (7) daya beli masyarakat minimal sama dengan/mendekati rata-rata daya beli masyarakat Provinsi Sulawesi Utara

2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur, efisiensi birokrasi dan akuntabilitas harus dilakukan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi. Kapasitas pemerintahan dan pelayanan harus ditingkatkan terus karena dinamika lingkungan strategis menuntut adaptasi dan kreativitas sumberdaya manusia dan kelembagaan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan yang senantiasa berkualitas dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Kapasitas pemerintahan dan pelayanan sangat ditentukan oleh sistem,

kelembagaan, SDM dan teknologi, sehingga substansi kebijakan ini mencakupi aspek-aspek tersebut.

Tujuan dari kebijakan umum ini adalah semakin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif-efisien dan memuaskan masyarakat seiring dengan peningkatan kualitas SDM dan penguatan kelembagaan pemerintahan. Indikator pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2025 adalah: (1) meningkatnya kapasitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang mampu merespons dinamika lingkungan strategis; (2) semakin efektif dan efisien sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi dan menjangkau seluruh wilayah; (3) meningkatnya kinerja hasil layanan dan kepuasan masyarakat serta pelaku usaha pada berbagai bidang layanan yang dapat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat; (4) semakin meningkatnya kualitas SDM pemerintah yang sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsinya; (5) meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah dan berfungsi dengan baik yang senantiasa sesuai dengan tuntutan lingkungan strategis

3) Mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan merata

Peningkatan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas menjadi prioritas kebijakan karena salah satu alasan keberadaan negara adalah mensejahterakan rakyat. Substansi kebijakan ini bukan hanya pada peningkatan tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan tersebut. Peningkatan kesejahteraan yang menimbulkan kesenjangan sosial-ekonomi tidak akan menjamin keberlanjutan pembangunan, karena itu upaya peningkatan kesejahteraan senantiasa dibarengi dengan upaya pemerataan.

Tujuan dari kebijakan umum ini adalah tercapainya kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada posisi sejajar dengan kabupaten dan kota yang maju di Sulawesi Utara. Indikator pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2025 adalah: (1) struktur perekonomian semakin bergeser dari dominasi sektor pertanian ke dominasi sektor non pertanian baik dalam kontribusi nilai PDRB maupun dalam penyerapan tenaga kerja; (2) pertumbuhan ekonomi/ pertumbuhan PDRB diatas/mendekati rata-rata Sulawesi Utara; (3) pendapatan perkapita/ nilai PDRB perkapita minimal sama dengan /mendekati rata-rata Sulawesi Utara; (4) laju inflasi dibawah rata-

rata/mendekati laju inflasi Provinsi Sulawesi Utara; (5) indeks gini distribusi pendapatan minimal sama dengan/mendekati rata-rata Sulawesi Utara; (6) persentase penduduk di bawah garis kemiskinan lebih rendah dari /mendekati rata-rata Sulawesi Utara; (7) persentase penduduk bekerja/tidak menganggur di atas 90 persen dan angka partisipasi angkatan kerja semakin meningkat; (8) persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani di atas rata-rata Sulawesi Utara/semakin meningkat; (9) kegiatan kepemudaan , olahraga dan seni-budaya semakin berkembang; (10) kesetaraan gender, partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan dan manajemen pembangunan, serta perlindungan anak terus membaik dan di atas rata-rata Sulawesi Utara.

4) Mewujudkan budaya yang berperadaban.

Budaya adalah merupakan sebuah ciri khas dari sebuah bangsa. Setiap wilayah memiliki budaya yang berbeda. Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam melestarikan budaya dalam masyarakat adalah kuatnya nuansa religius di kalangan masyarakat, karena agama merupakan landasan paling utama dari kehidupan manusia, sehingga segala perilaku, tindakan dan aktivitas oleh seluruh unsur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam mewujudkan diri sebagai daerah maju di Sulawesi Utara, idealnya bernafaskan agama dan budaya. Substansi kebijakan ini tidak hanya pada bagaimana penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang bermuara pada makin kuatnya etika atau norma dalam kehidupan masyarakat Bolaang Mongondow Utara, tetapi juga pada bagaimana manifestasi fungsionalnya dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan dari kebijakan umum ini adalah pemantapan ketahanan budaya yang religius masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diarahkan untuk mendorong pelestarian, pengembangan nilai-nilai budaya daerah dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat yang memiliki jatidiri dan berketahanan budaya yang mampu mendorong pelaksanaan dan pencapaian target pembangunan. Sasaran Utama dari tujuan ini hingga tahun 2025 adalah 1) rendahnya konflik horisontal antar sesama warga masyarakat yang berkaitan dengan isu agama dan sosial budaya 2) meningkatnya kerukunan antar umat beragama 3) meningkatnya sarana ibadah

5) Mewujudkan struktur perekonomian yang handal dan berdaya saing

Pengembangan struktur perekonomian diarahkan untuk berlangsungnya transformasi struktur perekonomian sehingga menjelang tahun 2025 kontribusi sektor primer (pertanian secara umum) terus berkurang dan semakin berimbang dengan sektor sekunder (industri pengolahan hasil produk primer) dan tersier (jasa perdagangan dan keuangan serta informasi dan komunikasi) baik dalam nilai PDRB maupun dalam penyerapan tenaga kerja; melalui perbaikan pada kegiatan agronomis kearah peningkatan produksi yang ramah lingkungan serta akselerasi pengembangan rantai nilai produk primer dalam kerangka agribisnis, agroindustri dan agropolitan secara terpadu dan bersimbiosis dengan pengembangan sektor industri dan sektor jasa dengan berbasis pada interkoneksi desa-desa dengan ibu kota kecamatan.

Pembangunan struktur ekonomi yang kuat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara harus ditunjang oleh pembangunan pertanian yang menekankan produktivitas tinggi dengan rantai nilai yang menekankan kualitas dari segi ekologis/organik, nilai tambah pengolahan hasil, efektivitas dan efisiensi usahatani serta didukung oleh kemampuan teknis dan kekuatan kelembagaan pada petani/nelayan/peternak guna tercapainya pendapatan rumah tangga petani/nelayan/peternak yang tinggi

6) Meningkatkan fungsi sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup

Peningkatan kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam merupakan keniscayaan bagi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berhubung kondisi geomorfologi yang memiliki dimensi pegunungan dan pesisir secara sejajar mengapit kawasan budidaya, sehingga kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam akan berdampak buruk bagi kawasan budidaya tersebut. Selain itu, perubahan iklim global dan peristiwa bencana merupakan tantangan yang senantiasa harus direspons oleh setiap tatanan daerah. Substansi kebijakan ini terutama pada upaya pemanfaatan ruang yang konsisten dengan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW), pengelolaan sumberdaya alam yang memperhatikan kelestarian sumberdaya alam, serta penanganan bencana dan antisipasi dampak perubahan iklim.

Tujuan dari kebijakan ini adalah terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan SDA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara sejajar dengan kabupaten dan kota yang maju di Sulawesi Utara. Indikator pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2025

adalah: (1) semakin optimalnya pemanfaatan ruang yang konsisten dengan RTRW, terpeliharanya proporsi kawasan lindung dan kawasan budidaya, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah yang ideal, rasio bangunan yang memiliki izin mendirikan bangunan perjumlah bangunan yang semakin meningkat, luas wilayah perkotaan yang semakin proporsional, luas wilayah industri/kawasan ekonomi khusus yang semakin proporsional, luas wilayah banjir yang semakin berkurang, luas wilayah kekeringan yang semakin berkurang; (2) semakin optimalnya pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan yang ditandai oleh tingkat pencemaran yang terjaga pada ambang toleransi dan luas lahan kritis yang semakin berkurang atau minimal tidak bertambah; (3) tertanganinya dampak bencana alam dan perubahan iklim dengan baik.

Untuk mencapai misi yang telah dijelaskan diatas maka dirumuskan sasaran pokok serta indikator dan arah kebijakan yang akan dilakukan hingga tahun 2025 dan dapat dilihat pada tabel 62.

Tabel V.62. Misi, Sasaran Pokok, Indikator Pencapaian dan Arah Kebijakan

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Misi1. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas	Sasaran 1. Peningkatan mutu pendidikan	1. Mendorong tercapainya pendidikan dasar, menengah dan tinggi 2. Pengembangan peran, kualitas serta pemerataan institusi aparatur institusi pendidikan (tenaga pengajar/pendidik) 3. Peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar/pendidik 4. Penyediaan sarana prasarana pendidikan yang bermutu dan merata 5. Peningkatan sistem evaluasi yang komprehensif dan akuntabel untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas 6. Pemenuhan tuntunan anggaran dan pembiayaan pendidikan dengan melibatkan berbagai elemen 7. Memberikan beasiswa bagi anak yang kurang mampu dan berprestasi
	Sasaran 2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1. Mendorong terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat serta menerapkan pola hidup sehat 2. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas 3. Mengadakan dan meningkatkan distribusi tenaga medis dan obat-obatan bermutu, efektif dan aman dengan harga yang terjangkau 4. Pengembangan instalasi dan fasilitas kesehatan yang memadai

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
		5. Menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan serta peningkatan usia harapan hidup 6. Mendorong pemenuhan kebutuhan asupan gizi masyarakat 7. Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu
	Sasaran 3. Peningkatan peran pemuda dan perempuan di seluruh bidang pembangunan	1. Mendorong minat dan bakat berorganisasi dan berolahraga di kalangan kepemudaan 2. Memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindak kekerasan fisik maupun psikis
	Sasaran 4. Peningkatan kualitas tenaga kerja	1. Mendorong peningkatan kompetensi dan daya saing pencari kerja 2. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja di setiap sektor ekonomi 3. Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja 4. Mendorong kerja sama dengan lembaga tenaga kerja dengan dunia usaha
Misi 2. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik	Sasaran 1. Peningkatan profesionalisme dan manajemen pemerintahan	1. Penataan birokrasi pemerintahan 2. Peningkatan kinerja pelayanan publik 3. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik 4. Mendorong peningkatan kualitas aparatur 5. Penerapan teknologi informasi dalam menunjang kerja-kerja pemerintahan
	Sasaran 2. Perencanaan pembangunan yang handal	1. Mengoptimalkan forum SKPD sebagai ruang untuk curah pendapat dan saran sekaligus koordinasi 2. Mengoptimalkan peran BAPPEDA sebagai lembaga perencana dan lembaga riset 3. Mengirim tenaga teknis PNS untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang S3 4. Memfasilitasi staf perencana di SKPD terkait untuk dilatih tata cara pembuatan renstra

Misi 3. Mewujudkan Pembangunan yang berkualitas dan merata	Sasaran 1. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan	1. Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat 2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga infrastruktur daerah
	Sasaran 2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur	1. Menciptakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas 2. Merencanakan pembangunan secara komprehensif dan sistematis
	Sasaran 3. Peningkatan pemerataan pembangunan	1. Mendorong laju pertumbuhan infrastruktur daerah 2. Mempercepat pembangunan di daerah-daerah tertinggal 3. Peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan
	Sasaran 4. Peningkatan sarana dan pra sarana pemukiman	1. Menciptakan lingkungan hunian yang asri 2. Menciptakan ruang bersosialisasi bagi masyarakat seperti pembangunan taman kota 3. Menciptakan sistem drainase perkotaan yang bisa menanggulangi banjir
	Sasaran 5. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	1. Membangun terminal dengan fasilitas yang memadai 2. Membangun fasilitas pelabuhan laut yang bertaraf internasional 3. Mempermudah pengurusan izin trayek angkutan umum
Misi 4. Mewujudkan budaya yang berperadaban	Sasaran 1. Menjadikan nilai-nilai budaya, agama dan kepercayaan sebagai pilar pembangunan	1. Melestarikan kebudayaan lokal dan menyaring masuknya budaya asing 2. Membangun karakter masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya 3. Menciptakan dan mendorong kerukunan antar umat beragama 4. Menciptakan stabilitas keamanan 5. Mendorong terciptanya pembangunan yang mengakomodir unsur kearifan lokal

	Sasaran 2. Memelihara kelestarian kesenian tradisonal dan situs-situs sejarah	1. Mendorong perkembangan kesenian tradisonal 2. Merawat dan melindungi situs-situs peninggalan bersejarah 3. Mendorong perkembangan wisata pendidikan, sejarah dan budaya
Misi 5. Mewujudkan struktur perekonomian yang handal dan berdaya saing	Sasaran 1. Peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah	1. Mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi kerakyatan 2. Memperkuat kompetensi kewirausahaan 3. Memberikan kemudahan dan jaminan terhadap akses penanaman modal 4. Memberikan jaminan perlindungan usaha bagi pelaku ekonomi kecil 5. Mendorong dan Meningkatkan kualitas produk
Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	Sasaran 2. Berkembangnya dunia usaha berbasis potensi dan keunggulan daerah	1. Mendorong pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, energi dan sumber daya mineral 2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja berbasis sektor 3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang 4. Mendorong dan mendukung penggunaan ilmu pengetahuan teknologi dalam pengolaan potensi SDA
	Sasaran 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas penanaman modal	1. Mendorong terwujudnya kualitas iklim usaha, promosi dan kerjasam investasi 2. Meningkatkan kualitas kelembagaan dalam pelayanan penanaman modal 3. Mempermudah proses pengurusan izin usaha tanpa mengabaikan peraturan yang berlaku 4. Meningkatkan kerjasama investasi dan perdagangan
	Sasaran 4. Peningkatan peran lembaga ekonomi/keuangan	1. Mendorong tumbuhnya lembaga-embaga keuangan mikro 2. Menjadikan para pelaku ekonomi sebagai mitra
Misi 6. Meningkatkan fungsi sumber daya alam	Sasaran 1. Peningkatan pemanfaatan SDA	1. Mendorong pengelolaan SDA dan penggunaan teknologi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan

dan kualitas lingkungan		
	Sasaran 2. Peningkatan kualitas lingkungan	1. Mewujudkan lingkungan hunian yang asri dan sehat 2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan berbasis mitigasi 3. Mendorong penerapan regulasi yang kuat untuk perlindungan lingkungan 4. Menetapkan kawasan penting seperti kawasan lindung dan wilayah lahan abadi pertanian untuk menghindari alih fungsi lahan
	Sasaran 3. Peningkatan sistem penataan ruang	1. Mempercepat legalisasi RTRWK dan Rencana Detail tata ruang 2. Melakukan sosialisasi RTRWK yang telah di Perdakan kepada masyarakat, sosialisasi tersebut termasuk sosialisasi sanksi hukum

Tabel V.63.Tahapan dan Prioritas

Misi 1. Mewujudkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas					
Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Tahapan			
		2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
1	2	3	4	5	6
1. Peningkatan mutu pendidikan	Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk mendorong tercapainya pendidikan dasar dan penyediaan sarana pendidikan yang bermutu	✓			
	Melanjutkan peningkatan mutu pendidikan dengan mendorong tercapainya pendidikan dasar, penyediaan sarana pendidikan yang bermutu dan peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar/pendidik		✓		
	Peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan anggaran dan pembiayaan pendidikan dengan melibatkan berbagai elemen			✓	
	Peningkatan mutu pendidikan dengan mengarahkan pada peningkatan sistem evaluasi yang komprehensif dan akuntabel untuk menghasikan lulusan yang berkualitas				✓
2. Peningkatan derajat kesehatan Masyarakat	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan	✓			
	Melanjutkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan serta mendorong pemenuhan kebutuhan asupan gizi masyarakat		✓		

	• Peningkatan Sarana dan SDM Kesehatan (Kuantitas dan Kualitas)				
	• Peningkatan derajat kesehatan masyarakat diarahkan dengan meningkatkan distribusi tenaga medis dan obat-obatan bermutu, efektif dan aman dengan harga terjangkau			✓	
	• Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, sehat dan menerapkan pola hidup sehat serta mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas dengan partisipasi aktif masyarakat				✓
3. Peningkatan kualitas ketenagakerjaan	• Peningkatan kualitas ketenagakerjaan dengan mendorong peningkatan kompetensi dan daya saing pencari kerja serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja di tiap sektor ekonomi	✓			
	• Peningkatan kualitas ketenagakerjaan dengan mendorong peningkatan kompetensi dan daya saing pencari kerja serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja di tiap sektor ekonom • Penjaminan keselamatan tenaga kerja		✓		
	• Peningkatan kualitas ketenagakerjaan dengan mendorong peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja			✓	
	• Peningkatan kualitas ketenagakerjaan diarahkan pada mendorong kerjasama dengan lembaga ketenagakerjaan dan dunia usaha				✓

4. Peningkatan peran pemuda dan perempuan diseluruh bidang pembangunan	• Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dengan mendorong minat berorganisasi dan olah raga dikalangan pemuda dan perempuan serta memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindak kekerasan fisik maupun psikis • Pemberdayaan Perempuan dan pemuda		✓		
--	---	--	---	--	--

Misi 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik					
Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Tahapan			
		2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
1	2	3	4	5	6
1. Peningkatan profesionalisme dan manajemen pemerintahan	• Peningkatan profesionalisme dan manajemen pemerintahan dengan mendorong penataan birokrasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik yang lebih baik	✓			
	• Peningkatan profesionalisme dan manajemen pemerintahan diarahkan melakukan penataan birokrasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik, peningkatan akses pelayanan serta mendorong peningkatan kualitas aparatur		✓		
	• Peningkatan profesionalisme dan manajemen pemerintahan dengan mendorong penerapan teknologi informasi dalam menunjang kerja-kerja pemerintahan • Menciptakan aparatur yang bersih bebas dari KKN			✓	
	• Peningkatan kualitas pelayanan publik (mudah, murah, tepat waktu) dengan prinsip enterpreneur				✓

Misi 3. Mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan merata					
Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Tahapan			
		2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan	• Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan dengan mendorong kegiatan pemberdayaan masyarakat	✓			
	• Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan dengan mendorong kegiatan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga infrastruktur daerah • Peningkatan kualitas SDM masyarakat sebagai obyek dan subyek pembangunan		✓		
2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur	• Peningkatan kualitas infrastruktur dengan menciptakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas	✓			
3. Peningkatan pemerataan pembangunan	• Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur dengan menciptakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merencanakan pembangunan secara komprehensif dan sistematis, Dengan memperhatikan potensi dan tata ruang wilayah		✓		
	• Peningkatan pemerataan pembangunan dengan mendorong laju pertumbuhan infrastruktur daerah dan mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah desa tertinggal			✓	

	• Peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur maupun ekonomi di arahkan pada peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan				✓
--	---	--	--	--	---

Misi 4. Mewujudkan budaya yang berperadaban					
Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Tahapan			
		2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
1	2	3	4	5	6
1. Menjadikan nilai-nilai budaya, agama dan kepercayaan sebagai pilar pembangunan	• Menjadikan nilai-nilai budaya, agama dan kepercayaan sebagai pilar pembangunan dengan meestarikan kebudayaan lokal, membangun karakter masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, menciptakan stabilitas keamanan serta mendorong terciptanya pembangunan dan mengakomodir unsur kearifan local		✓		
2. Memelihara kelestarian kesenian tradisonal dan situs-situs sejarah	• Pelestarian kesenian tradisional dan situ-situs sejarah dengan mendorong perkembangan kesenian tradisional, merawat dan meindungi situs-situs peninggalan sejarah untuk menumbuhkembangkan perkembangan wisata pendidikan, sejarah dan budaya		✓		
	• Mendorong minat dan kreatifitas generasi muda dalam pelestarian nilai-nilai budaya			✓	
3. Menjadikan budaya dan kesenian daerah sebagai daya tarik wisata	• Menggiatkan promosi budaya dan kesenian daerah				✓

Misi 5. Mewujudkan struktur perekonomian yang handal dan berdayasaing					
Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Tahapan			
		2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
1	2	3	4	5	6
1. Berkembangnya dunia usaha berbasis potensi dan keunggulan daerah	Berkembangnya dunia usaha berbasis potensi dan keunggulan dengan mendorong pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, energi dan sumberdaya mineral.	✓			
	Berkembangnya dunia usaha berbasis potensi dan keunggulan dengan mendorong pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, energi dan sumber daya mineral, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang			✓	
	Berkembangnya dunia usaha berbasis potensi dan keunggulan daerah berorientasi penerapan teknologi dalam pengolaan potensi SDA				✓
2. Peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah	Peningkatan kapasitas pelaku mikro, kecil dan menengah dengan memperkuat kompetensi kewirausahaan		✓		
	Peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah dengan mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi kerakyatan serta memberikan kemudahan dan jaminan terhadap akses pendanaan modal usaha			✓	
	Peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah di arahkan dapat memberikan jaminan perlindungan usaha bagi pelaku ekonomi mikro, keci dan menengah serta mendorong peningktan kualitas produk				✓

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas penanaman modal	Peningkatan kualitas dan kuantitas penanaman modal dengan mendorong terwujudnya kualitas iklim usaha, promosi dan kerjasama investasi serta mempermudah proses perizinan usaha tanpa mengabaikan regulasi yang berlaku		✓		
	Peningkatan kualitas dan kuantitas penanaman modal diarahkan pada meningkatkan kualitas kelembagaan dalam pelayanan penanaman modal				✓
4. Peningkatan peran lembaga ekonomi/keuangan	Peningkatan peran lembaga ekonomi/keuangan dengan membangun pola kemitraan antar para pelaku ekonomi			✓	
	Peningkatan peran lembaga ekonomi/keuangan diarahkan dengan mendorong tumbuhkembangnya lembaga-lembaga keuangan mikro				✓

Misi 6. Meningkatkan fungsi sumberdaya alam dan kualitas lingkungan					
Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan	Tahapan			
		2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
1	2	3	4	5	6
1. Peningkatan pemanfaatan SDA	Peningkatan pemanfaatan dengan mendorong pengelolaan SDA dan penggunaan teknologi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan		✓		
2. Peningkatan kualitas lingkungan	Peningkatan kualitas lingkungan dengan mewujudkan lingkungan hunian yang asri dan sehat		✓		

	• Peningkatan kualitas lingkungan dengan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan berbasis mitigasi			✓	
	• Peningkatan kualitas lingkungan di arahkan pada penerapan regulasi yang kuat untuk perlindungan lingkungan • Perlindungan dan pemeliharaan fungsi-fungsi lingkungan hidup				✓

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

6.1. Prinsip Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 merupakan pedoman pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang mempunyai jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD Bolaang Mongondow Utara 2005-2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bolaang Mongondow Utara. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan didukung oleh instansi terkait yang ada di wilayah Bolaang Mongondow Utara dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan dalam RPJPD Bolaang Mongondow Utara 2005-2025. Agar terjadi kesinambungan dalam penyusunan kebijakan daerah, maka calon Bupati dan wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara harus mempedomani RPJPD Bolaang Mongondow Utara Tahun 2005 – 2025 dalam menyusun visi dan misi daerah.
2. Pemerintah Bolaang Mongondow Utara melalui Bappeda Bolaang Mongondow Utara perlu menyebarluaskan dokumen RPJPD Bolaang Mongondow Utara kepada seluruh pemangku kepentingan daerah, terutama kepada calon Bupati dan calon wakil Bupati melalui Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bolaang Mongondow Utara dan partai-partai politik di wilayah Bolaang Mongondow Utara sehingga sasaran pembangunan 20 (dua puluh) tahun dapat dilaksanakan dan selaras dengan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka menengah.
3. Bupati dan wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara terpilih dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berpedoman pada RPJPD Bolaang Mongondow Utara 2005-2025.

4. RPJPD Bolaang Mongondow Utara 2005-2025 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. Untuk menjamin konsistensi antara RPJP Bolaang Mongondow Utara 2005-2025 dengan RPJMD, Bappeda Bolaang Mongondow Utara berkewajiban melakukan evaluasi terhadap rancangan akhir RPJPD.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan yang termaktub dalam RPJPD Bolaang Mongondow Utara 2005-2025 dengan sebaik-baiknya.
6. Dalam rangka implementasi RPJPD Bolaang Mongondow Utara 2005-2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bolaang Mongondow Utara berkewajiban untuk melakukan penjabaran RPJPD Bolaang Mongondow Utara 2005-2025 ke dalam RPJMD Bolaang Mongondow Utara.

6.2. Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi

1. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Bolaang Mongondow Utara.
Mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Bolaang Mongondow Utara 2005-2025 meliputi:
 - a. Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD Bolaang Mongondow Utara 2005-2025 mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Bolaang Mongondow Utara.
 - b. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD Bolaang Mongondow Utara 2005-2025.
 - c. Pemantauan dan supervisi RPJPD Bolaang Mongondow Utara 2005-2025 harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Bolaang Mongondow Utara telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Bolaang Mongondow Utara.

- d. Hasil pemantauan dan supervisi RPJPD Bolaang Mongondow Utara 2005-2025 digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Bolaang Mongondow Utara, telah dilaksanakan melalui RPJMD Bolaang Mongondow Utara.
 - e. Kepala Bappeda Bolaang Mongondow Utara melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Bolaang Mongondow Utara 2005-2025. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi RPJPD Bolaang Mongondow Utara 2005-2025 ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda Bolaang Mongondow Utara melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
 - f. Kepala Bappeda Bolaang Mongondow Utara melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Bolaang Mongondow Utara 2005-2025 kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara.
2. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Bolaang Mongondow Utara

Mekanisme evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan jangka panjang Bolaang Mongondow Utara meliputi:

- a. Evaluasi terhadap hasil RPJPD Bolaang Mongondow Utara 2005-2025 mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- b. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD Bolaang Mongondow Utara 2005-2025.

Penilaian digunakan untuk mengetahui;

- a. Realisasi antara sasaran pokok RPJPD Bolaang Mongondow Utara 2005-2025 dengan capaian sasaran RPJM Bolaang Mongondow Utara.
- b. Realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD Bolaang Mongondow Utara 2005-2025 dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.

BAB VII PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Bolaang Mongondow Utara 2005-2025 ini merupakan arahan perencanaan pembangunan yang mencakup semua aspek. RPJP Daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang bersifat mengikat seluruh pihak terkait dari pihak pemerintah, dunia usaha dan masyarakat madani untuk berkontribusi secara kordinatif, partisipatif, efektif dan efisien.

Sebagai dokumen perencanaan, RPJP Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utar memayungi semua perencanaan pembangunan daerah ini selama periode 2005-2025. Dokumen perencanaan inilah yang mengikat setiap periode perencanaan lima tahunan agar berjalan secara berkelanjutan dalam mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan berkontribusi pada perwujudan visi jangka panjang Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional.

Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, akan tergantung pada (1) komitmen dari kepemimpinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif. Untuk itu partisipasi dan peran aktif dari seluruh *stakeholder* yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sangat diperlukan untuk mengawal RPJPD hingga tahun 2025.